

**IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN DESA UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)**

(Studi di Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:

FATA FIKRUL ISLAM

NIM. 0910310054



Dosen Pembimbing :

Dr. M.Saleh Soeaidy, MA

Drs. Heru Ribawanto, MS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

MOTTO, PERSEMBAHAN dan PESAN**MOTTO:**

“Hidup ini memang tidak selamanya indah, sama seperti ruangan yang tidak selamanya terang tapi kenapa kita harus terus ketakutan dalam kegelapan jika kita bisa menyalakan lilin, cukup hanya dengan lilin kecil yang membuat ketakutan kita berkurang dan mengingatkan kita bahwa ada cahaya selain kegelapan. Cukup dengan lilin kecil, kebahagiaan kecil, maka hidup kita tidak akan gelap” .

“Jangan takut melangkah dengan suatu perbedaan, karena kenyataannya tuhan selalu memberikan sesuatu kepada umatnya dengan cara dan hasil yang beragam” .

PERSEMBAHAN :

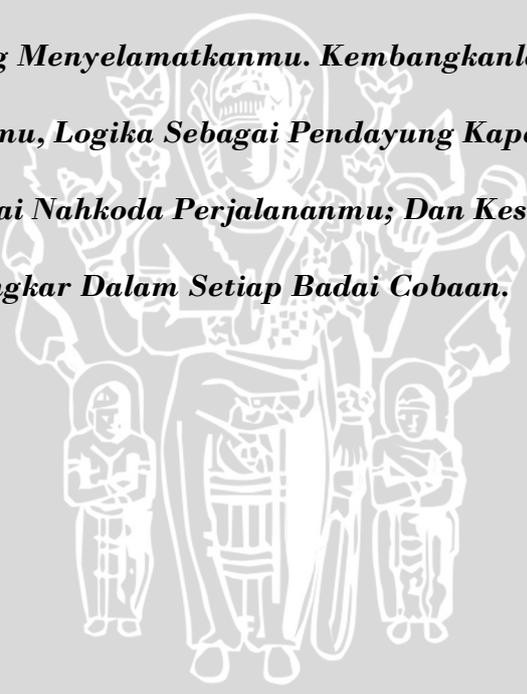
“Kupersembahkan semua hasil jerih payah penulisan skripsiku ini untuk
bapakku tercinta

(alm) Drs . H. Zubaidi, S.Ag, M.Pdi, karena berkat beliauah penulis dapat menyelesaikan karya ini, pengorbanan, do'a serta motivasi yang beliau berikan adalah nyawa bagi penulis untuk selalu semangat dan berusaha menyelesaikan setiap tugas yang penulis emban”.

PESAN :

Dan Terakhir Pesan yang Disampaikan Oleh (Alm) Bapak, Seperti yang Selalu Ia Kutip Menirukan dari Salah Satu Idola Beliau, Ali Bin Abi Thalib (Ra).

Wahai Anakku! Dunia Ini Bagaikan Samudra Di Mana Banyak Ciptaan Ciptaan Nya Yang Tenggelam. Maka Jelajahilah Dunia Ini Dengan Menyebut Nama Allah. Jadikan Ketakutanmu Pada Allah Sebagai Kapal Kapal Yang Menyelamatkanmu. Kembangkanlah Keimanan Sebagai Layarmu, Logika Sebagai Pendayung Kapalmu, Ilmu Pengetahuan Sebagai Nahkoda Perjalananmu; Dan Kesabaran Sebagai Jangkar Dalam Setiap Badai Cobaan.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**
(Studi Di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)

Disusun Oleh : Fata Fikrul Islam

NIM : 0910310054

Fakultas : Ilmu Administrasi

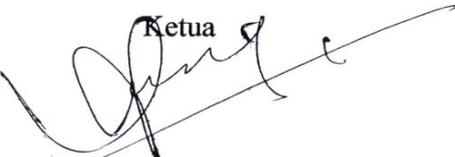
Jurusan : Administrasi Publik

Kosentrasi : -

Malang, 26 Juli 2013

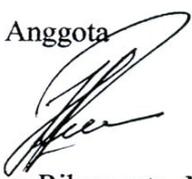
Komisi Pembimbing

Ketua


Dr. M. Saleh Soeaidy, MA

NIP. 19540212 1981031 006

Anggota


Drs. Heru Ribawanto, MS.

NIP. 19520911 197903 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Juli 2013
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Fata Fikrul Islam
Judul : Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) (Studi di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupten Nganjuk).

Dan Dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



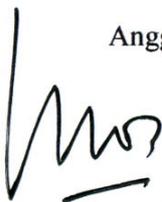
Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
NIP:19540212 1981031 006

Anggota,



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP: 19520911 197903 1 002

Anggota,



Dr. Irwan Noor, MA
NIP: 19611024 198601 1 002

Anggota,



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP: 19690524 200212 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 23 Juli 2013.

Mahasiswa



Nama: Fata Fikrul Islam

Nim : 0910310054

RINGKASAN

Islam, Fata Fikrul, 2013, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, Anggota : Drs. Heru Ribawanto, MS. (219 Hal + xvii).

Kebijakan pembangunan yang dilakukan selama ini, dengan berbagai bentuk dan variasinya, pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan secara *massif* tersebut, menimbulkan suatu dampak lain yaitu berupa eksploitasi terhadap sumberdaya dan lingkungan hidup. Sehingga terjadi degradasi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu pembangunan dengan paradigma baru, yakni pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dan Program hutan desa di Desa Jambi, Kecamatan Baron ini merupakan suatu bentuk gagasan dari kebijakan pelestarian lingkungan, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), yang memadukan aspek keberlanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Milles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Program Hutan Desa di Desa Jambi dalam peranannya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan program Hutan Desa ini adalah turunan dari program Ijo royo-royo di Kabupaten Nganjuk namun dirancang dengan strategi yang lebih inovatif untuk menumbuhkan antusiasme masyarakat, dengan penanaman ribuan pohon, dari berbagai jenis tanaman agar tidak hanya mendapatkan dampak dari satu sisi saja yaitu lingkungan, namun juga mampu menghasilkan dampak lain dari segi penambahan ekonomi masyarakat dan tentunya juga meningkatkan sistem sosial untuk masyarakat sendiri. Dan hambatan dari pelaksanaan program hutan desa di Desa Jambi ini muncul dari perawatan terhadap tanaman, terbatasnya lahan milik warga serta pengawasan yang masih minim.

Saran dari penelitian ini adalah harus ada pengembangan secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program hutan desa, agar penyebar luasan program ini tidak hanya memberikan hasil secara internal namun juga dapat tersebar secara eksternal dalam lingkup di Kecamatan Baron, serta di Kabupaten Nganjuk. agar manfaat di dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini dapat secara luas di nikmati oleh masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program Hutan Desa, Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).*

SUMMARY

Islam, Fata Fikrul 2013, Commission Advisor, Chairman: Dr. M. Soeaidy Saleh, MA, Member: Drs. Heru Ribawanto, MS. (219 + xv Pages).

Development policy is done so far, with a variety of forms and variations are basically done in order to improve the level of social welfare. But, the development of which was the massive, causing an others impact in the form of exploitation of resources and the environment. It so happens degradation of the social, economic, and environment. So for the solve this problem need for a the development of with the new paradigm, which is sustainable development. And, the village forest program (*Program Hutan Desa*) in Jambi Village, District Baron is a form of the idea of environmental sustainability, with the goal to achieve sustainable development, which combines aspects of social sustainability, economic and environment. This study using descriptive method with qualitative approach. The research was conducted through observation, interviews, and documentation. Model analysis of the data used by researchers is the model data analysis Milles and Huberman, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion.

Results of this research discuss about the implementation of Village Forest Programme (*Program Hutan Desa*) this Jambi village in its role to achieve sustainable development, implementation the Village Forest is a derivative of a this Ijo Royo-royo Programme in Nganjuk Regency but are designed with an innovative strategy to grow greater public enthusiasm, with the planting of thousands of trees, of various types of plants that not only getting the impact from one side only the environment, but is also be able to produce other effects in terms of the addition of economic and social systems must also increase to the people themselves. And, the resistance of the implementation of village forest programme (*Program Hutan Desa*) in this Jambi village emerged from the treatment plant, the limited land owned by citizens and are still limits control.

Suggestions of this research is the need for overall development of programs related to the implementation of village forest programme (*Program Hutan Desa*), so that the dissemination of this program not only gives the results internally, but also externally can spread within the scope of the in the District Baron, as well as in Nganjuk. In order to realizing benefits of sustainable development can be widely enjoyed by the all people in Nganjuk Regency.

Keywords: *Policy Implementation, Village Forest Programme (Program Hutan Desa), Sustainable Development*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) (Studi di Desa Jambi Kecamatan Baron, Nganjuk)*** dengan baik, lancar, serta tanpa ada halangan yang berarti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini (Terima Kasih Bapak).

4. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai (Terima Kasih Bapak).
5. Para dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan dan mengarahkan dalam segala hal.
6. Bapak Imam Mahmudi,, selaku kepala seksi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Baron.
7. Bapak In'am Ichwan, selaku Kepala Desa Jambi, terima kasih atas kesempatan untuk diijinkan melakukan penelitian di Desa Jambi
8. Bapak Subroto, selaku Kabayan I di Desa Jambi, Terima kasih pak telah memberikan berbagai informasi terkait pelaksanaan program Hutan Desa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
9. Bapak Didik Sujarwo dan Darianto, selaku kabayan II dan Kasun Ringin Kembar, terima kasih banyak atas kesediaan panjenengan yang secara detail memberikan masukan dan informasi terkait program Hutan Desa.
10. Turuntuk ayahanda (alm) Drs H. Zubaidi, S.Ag, M.Pdi, yang ada di alam sana, terima kasih bapak atas bimbinganmu selama 20 tahun terakhir, semua karya ini untukmu, semoga dengan selesainya karya ini mimpi kecilmu segera bisa aku penuhi (amin).
11. Keluargaku Ibunda siti lik'rom, Mas.Hakim, Mbk.Hawa, Ana Jauharul, Dek.Qiya, mbh.dhok Martonah, Pak.Mor, Mak.Rul, Takul, dan Bilqi

terima kasih banyak atas segala doanya, hanya ini sedikit yang bisa aku berikan, hormatku untuk kalian semua.

12. Sahabatku Ismuhadi Heru Wijaya (Sahabat yang paling ikhlas selama ini), terima kasih beck selalu mau memberikan masukan dan opini-opini serta diskusi kecilnya yang membangun, sehingga karya ini segera aku selesaikan. Hanya tuhan yang tahu kebaikanmu.

13. Nino, Untuk segala hal yang telah engkau berikan, semoga menjadi pembelajaran kita dimasa depan karena memang tidak ada yang abadi untuk semua hal termasuk perasaan. Namun keyakinan ini tetap, kamu akan abadi dan menjadi yang paling terbaik untuk hidup ini. Terima kasih.

14. Teman-temanku magang, Asih Widi Lestari (Dempul), Arditya M.HK, Awwin Nur Maksumah, dan Heni, terima kasih atas kesempatan magang bersamanya.

15. Teman-temanku di Fasttrack dan Double Degree yang selalu memberikan keceriaan dan semangat MbK Lailul Mursyidah, MbK Agit Kristiana, MbK Friska O, Susilo Wati, Asih, Ismuhadi Heru, Miftah, dan Nasrun, dan terima kasih untuk standar tingginya.

16. Saudara-saudaraku terbaik Ariem Ts, Toto Youris, Chandra Ariesta, Langgeng RP, Hendra, Rangga Reisdian, Zulmi, Hardianto (Bendol), Yoana, Rochyani Naditya, Prayuda Setia, Rossery Ayu, Gunawan P. Hartiyas Raditya, terima kasih untuk hari-hari cerianya, semoga perjuangan kita berlanjut di Masa depan.

17. Segenap teman-temen jajaran KKK dan kabinet medeni : Lutfi,, Heru P, Cahyo. Arif, Andri Manggala, Farid, Yusuf, ,Taufiq, Akip, Faisal, Dani, , Yudha, Lola, Putri Titian, King Keni, Sean, Paksi, Cob Oki, Hilman Wildana Putra, Fendi Febrianto, Gigih K. dan temen-temen lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2009, atas dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi semua pihak.

Malang, 22 Juli 2013

Fata Fikrul Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO, PERSEMBAHAN	ii
PESAN.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	16
1. Konsep Kebijakan Publik	16
2. Proses Kebijakan Publik	24
3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	25
4. Model Implementasi Kebijakan Publik	34
B. Teori Program	53
1. Pengertian Program	53
2. Implementasi Program	54
3. Program Hutan Desa	58
C. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	60
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	60
2. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan	64
3. Strategi Pembangunan Berkelanjutan.....	70
4. Penghijauan Lingkungan	73
5. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup.....	76



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	79
B. Fokus Penelitian.....	81
C. Lokasi Penelitian.....	83
D. Sumber Data	84
E. Teknik Pengumpulan Data.....	86
F. Instrumen Penelitian	89
G. Analisis Data.....	91

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	95
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	95
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	100
B. Hasil Data Fokus Penelitian.....	116
1. Implementasi Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	116
a. Gambaran Penyusunan Implementasi Program....	116
a) Proses Penyusunan dalam Menyelenggarakan Program Hutan Desa di Desa Jambi untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	124
b) Sumber Daya dalam Program Hutan Desa di Desa Jambi.....	131
b. Pelaksanaan Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>	134
a) Komunikasi antar semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program.....	137
b) Sasaran pelaksanaan sebagai tujuan program hutan desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.....	142
c. Dampak dari Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	147
a) Secara Ekonomi.....	147
b) Secara Sistem Sosial.....	152
c) Secara Lingkungan.....	154
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	156

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian	163
1. Implementasi Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	163
a. Gambaran Penyusunan Implementasi Program Hutan Desa	163
a) Proses Penyusunan dalam Menyelenggarakan Program Hutan Desa di Desa Jambi untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	168
b) Sumber Daya dalam Program Hutan Desa di Desa Jambi.....	175
b. Pelaksanaan Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	180
a) Komunikasi antar semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program.....	183
b) Sasaran pelaksanaan sebagai tujuan program hutan desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.....	189
c. Dampak dari Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	191
a) Secara Ekonomi.....	192
b) Secara Sistem Sosial.....	194
c) Secara Lingkungan.....	195
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	197

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	205
B. Saran	208

DAFTAR PUSTAKA	211
-----------------------------	------------



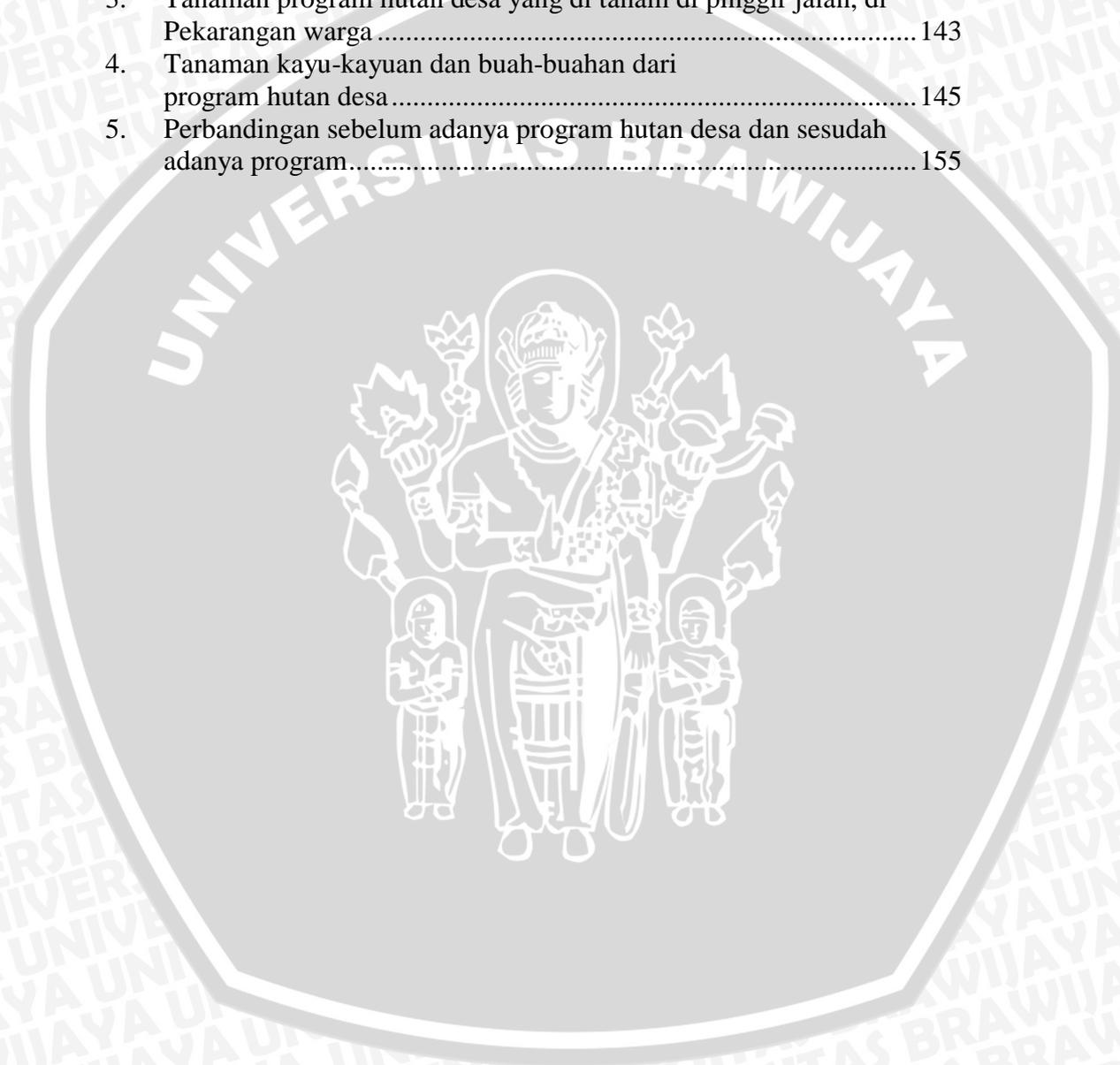
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Desa dan Jarak antar Desa Ke Kecamatan dan Pasar.....	96
2.	Jumlah Dusun, RT, RW dan Kepala Keluarga Per Desa Tahun 2012	97
3.	Daftar Nama Camat di Kecamatan Baron	98
4.	Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Baron 2012.....	99
5.	Sejarah Pembangunan Desa.....	102
6.	Distribusi Tanaman ke Desa-Desa di Kecamatan Baron 2010.....	118
7.	Rapat Pembahasan Peraturan Desa (Perdes) Desa Jambi 2008.....	127
8.	Susunan Kepengurusan Kegiatan Program Hutan Desa Melalui Organisasi Tani Amanah	128
9.	Surat Edaran Bupati Nganjuk 2010	138
10.	Data Hasil Laporan Tanaman Program Pelestarian Lingkungan di Desa Jambi Kecamatan Baron 2012.....	149
11.	Data Hasil Laporan Tanaman Program Pelestarian Lingkungan di Desa Jambi Kecamatan Baron 2012.....	149
12.	Data Hasil Laporan Tanaman Program Pelestarian Lingkungan di Desa Jambi Kecamatan Baron 2012.....	150
13.	Data Hasil Laporan Tanaman Program Pelestarian Lingkungan di Desa Jambi Kecamatan Baron 2012.....	150
14.	Laporan Partisipasi Warga Desa dalam Kegiatan Desa 2008-2011	153



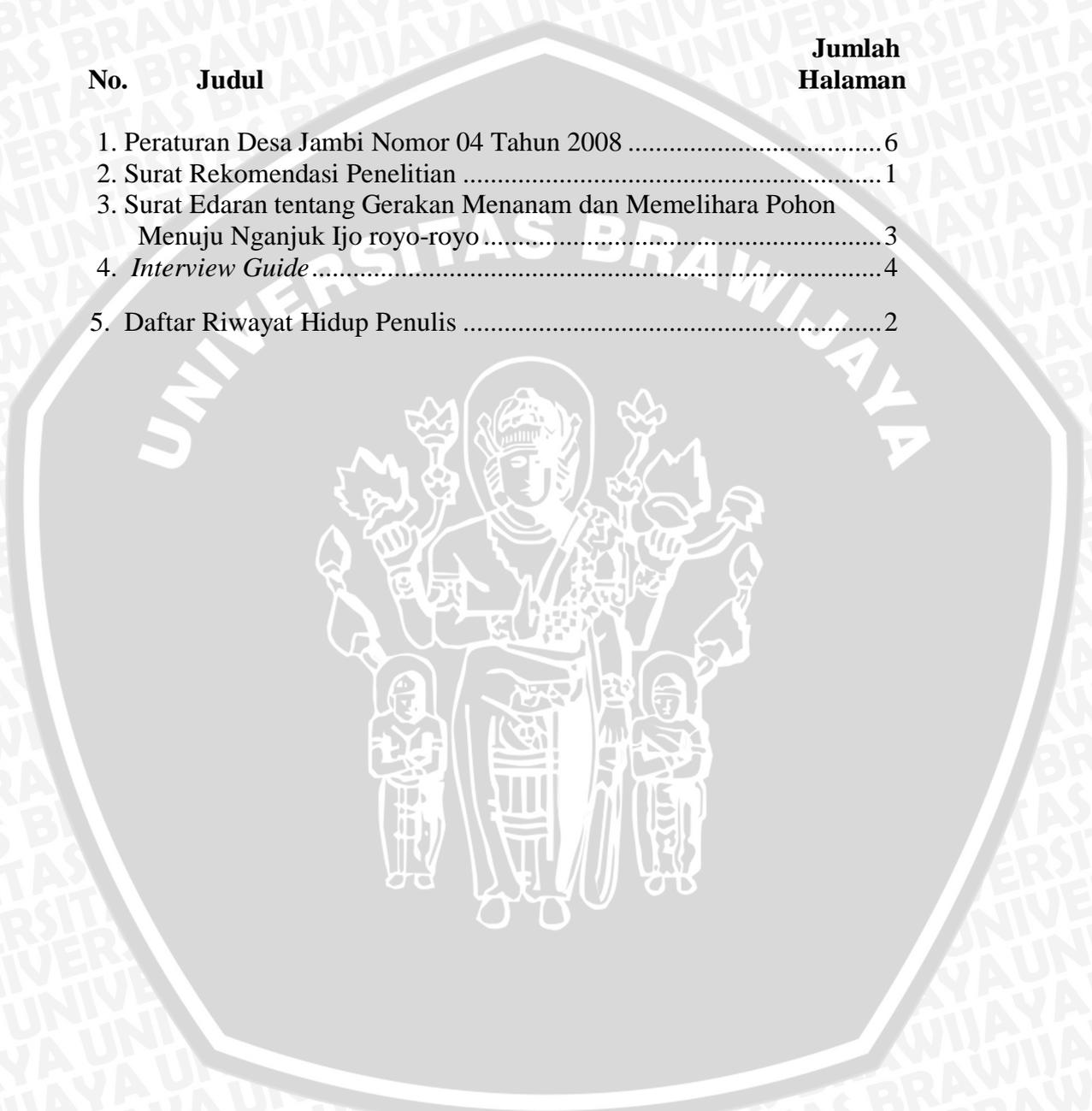
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi.....	49
2.	Komponen-komponen analisis data model interaktif.....	92
3.	Tanaman program hutan desa yang di tanam di pinggir jalan, di Pekarangan warga.....	143
4.	Tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan dari program hutan desa.....	145
5.	Perbandingan sebelum adanya program hutan desa dan sesudah adanya program.....	155



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Jumlah Halaman
1.	Peraturan Desa Jambi Nomor 04 Tahun 2008	6
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	1
3.	Surat Edaran tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon Menuju Nganjuk Ijo royo-royo	3
4.	<i>Interview Guide</i>	4
5.	Daftar Riwayat Hidup Penulis	2



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Berbagai macam suku, adat dan kebudayaan berada di dalamnya. Semua aspek segi kehidupan pun turut serta menjadi ragam kekayaannya. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik hingga kebudayaan. Dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia, banyak sekali hal-hal dan permasalahan yang perlu dibenahi dari sudut-sudut terkecilnya hingga masalah yang meluas dan mencakup permasalahan nasional. Mulai dari bencana alam, kerusuhan politik, hingga masalah-masalah kemanusiaan seperti kemiskinan.

Kemiskinan sebagaimana dikatakan (Cahyat, 2007:2) dalam Jurnal Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga bahwa.

“Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan”.

Maka, pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Upaya pembangunan yang dilakukan selama ini, dengan berbagai bentuk dan

variasinya, pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak berhenti sampai disini, adanya pembangunan juga akan menimbulkan masalah lain yaitu eksploitasi terhadap sumber daya alam, eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Selama lebih dari 30 tahun Indonesia menganut paradigma pembangunan nasional yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia mengandalkan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) sebagai tumpuan pembangunan. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA) tidak terlalu menjadi perhatian. (Asdak, 2012:33).

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) selama ini, terlalu banyak memberikan perhatian pada pemenuhan gaya hidup konsumtif manusia dan kurang memperdulikan kaidah-kaidah konservasi. Hal ini telah mengakibatkan merosotnya kualitas sumber daya alam (SDA) termasuk jumlah cadangan sumber daya alam (SDA). Degradasi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) akibat salah merawat sumber daya alam (SDA) ini terlihat pada sektor-sektor sumber daya alam (SDA) strategis dalam pembangunan nasional terutama pada sektor kehutanan dan pertanian (Asdak, 2012:34).

Di sektor kehutanan, akibat pengambil-alihan sumber daya hutan menyebabkan laju kerusakan hutan berkisar antara 1,5-2,0 juta (ha) per tahun. Kerusakan hutan tersebut telah menimbulkan permasalahan dari mulai kelangkaan bahan baku (kayu dan non kayu termasuk tanaman obat-obatan), bencana kebakaran hutan dan banjir, serta terjadinya konflik sosial antarmasyarakat dan antar masyarakat dan perusahaan atau

pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun dengan luasan yang meningkat (Asdak, 2012:34).

Berangkat dari paparan singkat di atas menunjukkan bahwa degradasi sumber daya alam (SDA) dan penurunan kualitas lingkungan hidup (LH) di Indonesia, tidak dapat difahami dalam konteks satu faktor saja. Degradasi sumber daya alam (SDA) dan penurunan kualitas lingkungan hidup (LH), kemiskinan di Indonesia yang persisten ditengah laju pembangunan ekonomi yang semakin *massif* semuanya bukanlah permasalahan yang terisolasi dan berdiri sendiri.

Sejatinya Permasalahan pembangunan tersebut berakar dari perlakuan kita sendiri dalam memperlakukan lingkungan alam tempat kita berada. Dengan kata lain, pandangan hidup dan sistem nilai yang di anut dalam melaksanakan pembangunan sudah tidak sesuai lagi dengan fenomena permasalahan pembangunan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Sehingga untuk menanggulangnya, diperlukan paradigma pembangunan nasional yang secara *holistic* harus selalu diupayakan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan untuk ekonomi serta memperhatikan pula keberadaan lingkungan.

Pembangunan dengan visi keseimbangan, artinya mampu mengangkat kesejahteraan tetapi tidak merugikan aspek yang lain baik itu aspek lingkungan, ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan tersebut adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development*) dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan Berkelanjutan mencakup

tiga lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan pada perlindungan lingkungan.

Sebagaimana yang termuat di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan:

”Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Ketiga hal tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong kesuksesan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan juga dapat kita lihat salah satunya, dalam tujuan pembangunan millennium 2015 yang tertuang disana adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup (Siti Aisyah, 2010:2). Berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup maka Negara-negara yang ikut serta menandatangani Deklarasi Millennium PBB pada September 2000 menyetujui agar:

1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan .
2. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
3. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

Komitmen Indonesia sendiri untuk berkontribusi di dalam pembangunan berkelanjutan khususnya untuk mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan adalah membuat kebijakan pelestarian

lingkungan, dengan cara mengalakan program penanaman sejuta pohon maupun gerakan satu miliar pohon.

Selain hal tersebut komitmen pemerintah juga sudah ada di dalam konstitusi di negara kita, karena Sumber utama dan kebijakan utama di Indonesia semuanya bersumber kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hingga saat ini, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah empat kali di amandemen, dimana konsep mengenai pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* telah dimasukkan dalam amandemen yang keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Disana termuat adanya pengaturan mengenai hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia dan juga di adopsinya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berwawasan lingkungan dalam UUD 1945 artinya, hal ini menjadikan konstitusi kita sudah berlandaskan akan kepedulian terhadap masalah lingkungan dan kelestariannya yang menyangkut kehidupan dimasa kini dan nanti. Ini dapat kita lihat juga secara detail dalam Pasal 28 huruf A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Hal ini kemudian di implementasikan oleh seluruh wilayah di Negeri ini. Dengan adanya sistem desentralisasi tentunya setiap daerah memaknai, melakukan dan melaksanakan program penanaman sejuta

pohon untuk pelestarian lingkungan ini dengan berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing di dalam manajemen dan menyelaraskan dengan potensi dan karakter daerahnya sendiri.

Sebagai wujud dari ketaatan melaksanakan sistem desentralisasi, dalam hal ini kabupaten nganjuk, yang merupakan salah satu Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jawa Timur juga melaksanakan, menerapkan Pembangunan berkelanjutan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Beberapa program dicetuskan di dalam rangka untuk melestarikan lingkungan, salah satunya yaitu Program Ijo Royo-royo.

Program Ijo Royo-Royo adalah Program yang dicanangkan Bupati Nganjuk, Drs.H.Taufiqurrahman bersama Harian Jawa Pos pada tanggal 27 Mei 2008, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Nganjuk yang asri, penuh dengan habitat flora, yang sejalan dengan upaya pencegahan dan perlambatan dampak pemanasan global. (<http://www.kecbaron.blogspot.com/.../baron-juara-ii-program-nganjuk-ijo-royo.html>)

Sasaran dari program tersebut adalah terutama untuk penduduk desa, yang didalam hal ini Pemda (Pemerintah Daerah) memberikan ribuan bibit pohon melalui kepala desa, yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat. Mekanisme ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala desa Jambi dan Kebayan I Desa Jambi yang menyatakan bahwa:

“Cara pemberiannya adalah Bibit pohon untuk program Ijo Royo royo ini, dilakukan oleh Pemerintah daerah, lalu memberikannya kepada Kepala Desa dan kemudian di teruskan kepada seluruh Masyarakat”. (Sumber: Wawancara, Senin 17 Desember 2012 Pukul 10.30 Wib)

Tujuan dari program tersebut secara jangka pendek adalah untuk penghijauan terutama untuk pencegahan dan perlambatan dampak pemanasan global dan jangka panjangnya diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat lewat pemanfaatan hasil tanaman yang telah ditumbuh kembangkan. Hal tersebut merupakan strategi didalam upaya pembangunan berkelanjutan masyarakat desa.

Kebijakan pelestarian dan penghijauan sebenarnya juga menjadi agenda program pada pemerintahan Bupati sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan Ir. Siti Nurhayati (2003-2008) namun program tersebut mengalami kendala didalam pelaksanaannya karena sosialisasi dan mekanisme penerapan program yang kurang baik dari pemerintah daerah kabupaten Nganjuk, sehingga masyarakat tidak banyak yang peduli akan program ini.

Hal tersebut juga dikuatkan lewat wawancara dengan Kamituwo II Desa Jambi, yang mengatakan bahwa:

”Sebelumnya juga ada program pelestarian lingkungan dan penghijauan lewat pemberian bibit pohon, yang dilakukan oleh Ibu Hanung (Ir.Siti Nurhayati) namun program ini hanya dilaksanakan sekedaranya, bisa dikatakan hanya formalitas dan bibit tanaman atau pohon yang diberikan juga kurang produktif dan masa hidupnya juga pendek seperti pohon Turi dan Pepaya dan tanaman yang diberikan juga tidak sebanyak sekarang ini”

(Sumber: Wawancara, Senin 17 Desember 2012 Pukul 10.45 Wib).

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggagas program pelestarian lingkungan dan penghijauan dengan lebih baik, lewat program Ijo-royo-royo ini, artinya dengan lebih terkonsep, dengan mekanisme yang jelas, serta sosialisasi dan pengawasan yang lebih baik. Diharapkan

dengan penataan ulang program tersebut manfaat ke masyarakat akan lebih baik lagi dengan semangat penghijauan dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, karena tanaman yang diberikan selain lebih banyak, tanamannya juga lebih produktif yang diberikan.

Salah satu wilayah di kabupaten Nganjuk yang sukses dalam melaksanakan program ini adalah wilayah kecamatan Baron, Kecamatan Baron yang di dalam program ini memperoleh juara II dalam pelaksanaan Ijo Royo royoy membuat rancang strategi yaitu:

1. Menetapkan lokasi unggulan dalam 5 wilayah yaitu Desa Baron, Desa Jambi, Desa Mabung dan Desa Katerban dan seluruh lingkungan pendidikan;
2. Kelima lokasi unggulan tersebut, dibagi dalam tanggung jawab 5 komponen yaitu: Kantor Kecamatan Baron, Cabang Dinas PPKBS, KUA Baron berlokasi di Desa Jambi; Polsek Baron, Puskesmas dan BRI berlokasi di Desa Baron; Koramil, Cabang Dinas Kimprasda, Dipertabun berlokasi di Desa Mabung dan Katerban, serta Cabang Dinas Dikpora mengoordinasikan penanaman di seluruh lingkungan sekolah se-Kecamatan Baron;
3. Mengupayakan tananam produktif (buah-buahan), agar rasa memiliki warga menjadi lebih besar sehingga timbul niat untuk memelihara;
4. Khusus bagi PNS, wajib menanam dan memberi label nama di setiap tanamannya, untuk selanjutnya bertanggungjawab pada kelestarian tanaman. (<http://www.kecbaron.blogspot.com/.../baron-juara-ii-program-nganjuk-ijo-royo.html>)

Berdasarkan fenomena diatas dapat diketahui bahwa salah satu desa yang menjadi sasaran dan sentra keberhasilan program tersebut adalah Desa Jambi, yang sejauh dari pengamatan peneliti dari wawancara, serta pengamatan langsung ketika pra-riset, program Ijo Royo-royo ini telah dilaksanakan dengan baik yaitu dalam bentuk “program hutan desa”

hal ini telah diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Desa (Perdes) No.04 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa.

Program Hutan Desa ini, diwujudkan dengan pemberian 25.000 paket pohon pada periode pertama pada tahun 2008, serta periode kedua yakni sebanyak 25.000 pohon pada tahun 2011, yang merupakan pemberian langsung dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk masyarakat Desa Jambi, penanaman pohon tersebut bisa dilakukan di pinggir jalan dan dipekarangan, pohon tersebut antara lain berupa: Sengon, Rambutan, Jabon, Mahoni, Aburia, Jati, Mangga dan Gmelina.

Program Hutan Desa ini adalah bentuk pelaksanaan dari pelestarian lingkungan yang tujuan jangka pendeknya adalah untuk penghijauan, untuk menciptakan udara yang segar, dan untuk memperbanyak daerah resapan air. Ini adalah karena keadaan cuaca yang panas dan berkurangnya penyerapan air. Serta tujuan jangka panjangnya adalah untuk nilai tambah ekonomi masyarakat, karena pohon-pohon tadi yang ditanam nantinya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sendiri selain itu seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa tanamannya adalah tanaman atau bibit pohon yang produktif dan masa hidupnya juga lama artinya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik itu dari segi ekonomis maupun ekologis.

Masyarakat Desa Jambi juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam program ini dan tentunya sangat berbeda dari program sebelumnya yang kurang terrespon dengan baik. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh

aparatur Desa Jambi berdasarkan wawancara dengan Kebayan I dan Kamituwo II di Desa Jambi.

“Dengan adanya Program Hutan Desa ini masyarakat Jambi sangat antusias, hal ini bisa dilihat dari partisipasi warga Desa Jambi serta banyaknya pohon yang ditanam dipekarangan dan di tepi jalan faktor dominannya adalah tanamannya lebih produktif dan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi serta kejelasan pelaksanaan program ini sangat baik, jadi warga juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam mensukseskan program ini. Serta keberadaan dari Perdes (Peraturan Desa) juga semakin menguatkan program ini”. (Sumber: Wawancara, Senin 17 Desember 2012 Pukul 11.00 Wib).

Tidak berhenti sampai disini, Tentunya dalam pelaksanaan dari program ini juga ada kendala yang dihadapi, antara lain terbatasnya lahan yang dimiliki warga, karena tidak semua warga memiliki lahan dengan luas yang sama, selain itu tingkat antusiasme dari masyarakat dalam merawat dan menumbuhkan tanaman sampai dapat dimanfaatkan dan tumbuh subur adalah kendala serta masalah yang akan dihadapi berikutnya. Namun diatas itu semua program hutan desa ini adalah bagian dari kebijakan pelestarian lingkungan yang memiliki manfaat dari beberapa aspek yaitu sosial, ekonomi dan tentunya lingkungan, yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang, karena ada manfaat jangka pendek dan jangka panjang berarti ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Maka berdasarkan dari fenomena latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM HUTAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)”** (Studi Di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Program Hutan Desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung dari implementasi program hutan desa, di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat perumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program hutan desa untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi program hutan desa untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang implementasi program hutan desa untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait, antara lain:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Implementasi program hutan desa untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable Development*), sehingga dikemudian hari akan lahir inovasi program-program yang lain yang relevan dengan kondisi fenomena yang terjadi di masyarakat akan muncul untuk

memberikan dampak, manfaat untuk kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Nganjuk pada khususnya serta pemerintahan desa diseluruh Kabupaten Nganjuk pada umumnya, dengan penerapan Implementasi program hutan desa didalam kaitannya untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable Development*), agar dapat mengaplikasikan dan menjalankannya dengan sebaik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan terutama didalam mewujudkan kemakmuran masyarakat dan eksistensi kelestarian lingkungan hidup.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu-kesatuan, diataranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima subbab. *Pertama*, akan mendiskripsikan latar belakang. *Kedua*, perumusan masalah penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, kontribusi penelitian. *Kelima*, sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan dan mencantumkan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Yaitu : *pertama*, Kebijakan Publik yang di dalamnya termuat: Konsep Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Konsep Implementasi Kebijakan Publik dan Model Implementasi Kebijakan Publik, *Kedua*, Teori Program, yang terdiri dari pengertian program, Implementasi Program dan Program Hutan Desa, dan *ketiga*, Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang di dalamnya terdiri dari Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, Strategi Pembangunan Berkelanjutan, Penghijauan Lingkungan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan dan menggambarkan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi atau situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik yang dipakai pada proses pengumpulan data, analisis data, serta instrument penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari dua subbab. *Pertama*, akan menguraikan tentang gambaran umum Kecamatan Baron dan Desa Jambi yang meliputi

deskripsi umum, keadaan lokasi dan profil lokasi. Kedua, menguraikan hasil dan fokus penelitian mengenai implementasi program hutan desa, dampak program hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program hutan desa untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Artinya pada Bab Pembahasan ini akan mengemukakan tentang hasil dan pembahasan yang terdiri dari data umum dan data fokus penelitian. Untuk data fokus penelitian akan dilakukan analisis, pada tahap ini interpretasi data dengan teori-teori dan metode penelitian yang telah dikemukakan pada BAB II dan BAB III.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat yang nantinya berguna untuk Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Akademisi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sering membaca dan mendengar berbagai informasi baik dari media cetak (surat kabar) maupun elektronik (Televisi) yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kita mendengar berbagai kebijakan misalnya di bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya, kita juga sering pula menyaksikan adanya perubahan kebijakan, revisi kebijakan, dan pengawasan kebijakan. Dalam dunia perusahaan dikatakan bahwa kebijakan perusahaan, birokrat mengacu pada kebijakan normal, bahkan individu kadang-kadang juga mengakui bahwa dirinya telah memiliki kebijakan berkaitan dengan berbagai isu tertentu.

Ketika analisis kebijakan (*policy analysis*) menjadi disiplin intelektual terapan terhadap masalah publik (*public problem*), *policy* telah menjadi fokus utama (*central focus*) analisis kebijakan, termasuk didalam mengenai pengertian dan substansi kebijakan Leslie A. Pal (1987) dalam (Widodo, 2006:9).

Apa yang kita baca, dengar, dan kita lihat seperti contoh diatas menunjukkan bahwa kebijakan memiliki kesamaan posisi dan sudut pandang pada satu sisi dan pada sisi lain menunjukkan pada suatu rangkaian tindakan tertentu. Sementara posisi kebijakan hanya sebagai

sebuah peraturan semata. Ketiga pemahaman kebijakan tersebut diatas bisa kita jadikan sebagai pedoman (*guide*), baik bagi mereka yang mengimplementasikan maupun bagi mereka yang akan melakukan penelitian atau observasi kebijakan.

Pilihan kebijakan sebagai pedoman (*guide*) sangat tepat digunakan bagi pemula, sedangkan bagi mereka yang melakukan analisis kebijakan membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik. Artinya memang tidak ada definisi kebijakan publik yang bisa secara umum diterima dalam literature akademis. Para akademisi dan evaluator lainnya sering kali menganggap benar kategori seperti kebijakan ekonomi dan keuangan, kebijakan sosial, kebijakan pendidikan, kebijakan pertanian, kebijakan pertanahan, kebijakan energi, kebijakan imigrasi, kebijakan perikanan, dan sebagainya. Substansi kebijakan tersebut cenderung menjadi batasan yang telah melembaga baik dikalangan menteri, agen administratif, dan undang-undang. Bagaimanapun juga seorang analisis dapat juga membaca suatu kebijakan dalam berbagai hal maupun tindakan pemerintah yang bisa jadi tidak saling berhubungan.

Untuk mengatasi masalah konseptual kebijakan tersebut, dalam hal ini akan dipaparkan beberapa definisi kebijakan. Definisi tersebut oleh Leslie A. Pal (1987) dalam (Widodo, 2006:10), dikategorikan menjadi dua macam, kategori pertama, definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan. Kategori

kedua, lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah berkaitan dengan pemerintah tersebut.

Definisi kebijakan yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *A Purposive course of action followed by actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern. "Public policies are those policies developed by governmental bodies an officials" (James E. Anderson).*
2. *A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actor concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve (W.I Jenkins).*
3. *Public policy is whatever government choose to do or no to do (Thomas R. Dye)*
4. *Action or nonaction in response to demands (Stuart H. Rakoff and Guenther F. Schaefer).*
5. *A projected program of goal value and practices (Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan).*
6. *Policy is , in its most general sense, the pattern of action that resolves conflicting claims or provides incentives for cooperation (Fred M. Frobook).*

Sementara pengertian kebijakan pada sisi yang menekankan pada dampak, oleh Leslie A. Pal (1987) dalam (Widodo, 2006:11). diidentifikasi sebagai berikut:

1. *What governments actually do and why (Richard Simeon).*
2. *Action taken by government (Ira Sharkansky)*
3. *A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decision or action, and such a course has to be perceived and identified by the analysis in question.*

Definisi diatas menyarankan akan tersedianya ruang untuk menginterpretasikan sebuah kebijakan publik. Bahkan masing-masing definisi hanya memiliki sedikit perbedaan satu dengan lainnya, yakni dalam melakukan analisis secara menyeluruh. Bagaimanapun juga, pada

tataran umum kebijakan publik tidak seharusnya sama (*synonymous*) dengan semua apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara keputusan (*decisions*) dengan kebijakan (*policies*). Dari hari ke hari pemerintah membuat keputusan, beberapa di antaranya disampaikan (*informed by policies*) sementara yang lainnya hanya sebagai reaksi terhadap lingkungannya. Padahal, banyak aktivitas pemerintah yang semata-mata melaksanakan kebijakan, namun aktivitas dan praktik tersebut bukanlah merupakan kebijakan itu sendiri. Sebagai contoh Misalnya, keputusan pemerintah di suatu kota menaikkan pajak sebesar 5% yang bukan mencerminkan (*not reflect*) kebijakan peningkatan perpajakan. Hal tersebut lebih tepat menggambarkan sebagai suatu respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang bisa saja diarahkan oleh kebijakan untuk menyeimbangkan anggaran pemerintahan di suatu kota tersebut.

Jika demikian, apa sesungguhnya kebijakan itu? Leslie A. Pal (1987) dalam (Widodo, 2006:12) mengemukakan bahwa kebijakan diartikan “*as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems*”. Sedangkan kebijakan publik (*public policy*) oleh Dye (1978) dalam (Wahab, 2008:51) diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Maksudnya adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam (Wahab, 2008:51), yang mengemukakan bahwa

kebijakan publik adalah “*what government say and do, or not to do, it is the goals or the goals or pupose of government program.*” Artinya kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan kartasasmita (1997) dalam (Widodo, 2006:13) mendefinisikan “kebijakan sebagai serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”.

Pengertian kebijakan pada point terakhir yang didefinisikan oleh Kartasasmita merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan: (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah. (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi pemerintah, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Anderson dan Islamy (1994) dalam (Widodo, 2006:13) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Friedrich dan wahab (1991) dalam (Widodo, 2006:13) mengartikan kebijakan sebagai:

“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Selain itu, lembaga Administrasi Negara (2000) dalam (Widodo, 2006:13) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu respon dari suatu sistem politik terhadap *demands/claims* dan *supports* yang mengalir dari

lingkungannya. Berdasarkan pengertian ini, Dye (1978) dalam (Widodo, 2006:13) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu: (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan. Dunn dalam (Widodo, 2006:13) juga mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) *stakeholder* kebijakan, (b) kebijakan publik (*policy contents*), dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*). *Stakeholder* disebut juga sebagai “*policy actors*” atau “*political actors*”. Mustopadijaja (1992) dalam (Widodo, 2006:13) menambahkan satu elemen lagi, yaitu terkait kelompok sasaran kebijakan (*target groups*). Sementara menurut David Easton dalam (Widodo, 2006:13) sistem terdiri atas unsur *inputs*, *process*, *outputs*, *feedback*, dan *lingkungan*. Lingkungan kebijakan dibagi menjadi dua macam, yaitu *intra* dan *extra societal environment*. Dalam lingkungan kebijakan mengalir dua *inputs* yaitu *demands/claims* dan *supports* yang kemudian diproses kedalam sistem politik yang selanjutnya melahirkan *policy outputs*, berupa *policy* dan *decision*. *Policy outputs* kembali ke *social environment* sebagai respons (*feedbacks*) terhadap *demands/claims* dari *social environments*.

Berdasarkan berbagai definisi, pengertian diatas dari banyak ahli kebijakan publik tersebut dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dan Islamy (1994) dalam (Widodo, 2006:14) yang antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi kepada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan ataupun pola tindakan dari pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka kebijakan publik dibuat dalam rangka “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan.”Kebijakan publik berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan wahab (1991) dalam (Widodo, 2006:14).

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macamnya, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakn publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (*only those that move people to action become policy problems*). Oleh karena itu, merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan yang esensial dalam proses kebijakan publik.

Karena dalam proses kebijakan publik perlu memperhatikan siapa yang berwenang untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi kinerja kebijakan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Wilson menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda (*two distinct functions of government*), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitanya dengan pembuatan kebijakan (*public policy making*) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara (*has to do with policies or expressions of the state will*), sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (*has to do the execution of these policies*).

Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik (*political master*), dan melaksanakan kebijakan politik tadi merupakan kekuasaan administrasi negara. Namun karena administrasi negara tadi memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan politik dan secara umum disebut dengan *discretionary power* atau keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka timbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan secara “*benar*” dan tidak secara “*buruk*”. Atas dasar itulah perilaku politisi membuat kebijakan publik dan administrasi negara (birokrasi publik). Dalam melaksanakan kebijakan publik tadi perlu dikontrol dan dievaluasi,

sejauh mana kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Kontrol ini diperlukan agar kebijakan publik yang dibuat benar-benar dapat memecahkan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat sebagai esensi dari lahirnya sebuah kebijakan publik.

2. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja muncul, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Anderson (1979) dalam (Widodo, 2006:16) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adoption*, (d) *policy implementation*, dan (e) *policy assessment/evaluation*. Sedangkan Ripley (1985) dalam (Widodo, 2006:16) membedakan dalam empat tahapan, yaitu (a) *agenda setting*, (b) *formulation and legitimating of goal and programs*, (c) *program implementation, performance, and impact*, (d) *decision about the future of the policy and program*.

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam (Widodo, 2006:16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan kebijakan merupakan tahapan pengusulan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi

- perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
 5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
 6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Proses kebijakan sebagaimana telah dikemukakan diatas merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) kebijakan dievaluasi.

3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat penting. Bersifat penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, bila menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan

juga telah diantisipasi diimplementasikan dengan perencanaan dan strategi yang matang.

Kamus Webster dalam (Wahab, 1997:64) merumuskan bahwa implementasi secara pendek sebagai *“to provide the means for carrying out”* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *“to give practical effects to”* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1976) dalam (Wahab, 1997:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencangkup baik usaha-usaha untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (1974) dalam (Widodo, 2006:86) juga menguraikan batasan implmentasi kebijakan sebagai:

“policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandate by policy decisions”.

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Pada suatu saat suatu tindakan-tindakan yang telah ditetapkan, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam (Widodo, 2006:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events”.

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam (Widodo, 2006:87) lebih lanjut mengemukakan bahwa :

“This definition encompasses not only the behavior of the administrative body which has responsibility for the program and the compliance of target groups, but also the web of direct and indirect political, economic, and social forces that bear intended and unintended of the program”

Maksudnya adalah bahwa definisi ini menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri

kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan akhirnya berdampak pada yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*) dari suatu program.

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier dalam (Widodo, 2006:87), menjelaskan dengan lebih detail bahwa proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu dan kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), serta dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Selanjutnya muncul pertanyaan, aktivitas-aktivitas apakah yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut? Menurut Darwin (1998) dalam (Widodo, 2006:89), persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu: pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Jones dalam (Widodo, 2006:89) mengatakan bahwa aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut:

- a. *Organisasi; the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.*
- b. *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*

- c. *Application; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.*

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi (*Interpretasion*) merupakan aktivitas *interpretasi* (Penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, other agree upon objectives or instruments*).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas maka yang perlu mendapat perhatian dan persiapan dalam proses implementasi kebijakan interpretasi, organisasi, penyediaan risorsis, dan manajemen program, serta penyediaan layanan dan manfaat pada publik. Atas dasar hal tersebut, maka masalah implementasi semakin lebih jelas dan luas. Implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

a. Pelaksana Kebijakan (*policy Implementor*)

Pelaksana kebijakan (*policy implementor*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun stidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah.
2. Sektor swasta (*private sector*).
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM).
4. Komponen masyarakat.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap

(Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tertentu sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain.

Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai Koordinator. Bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap

pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

f. Tahap Aplikasi (*application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahap yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu bagian dari proses analisa kebijakan publik adalah model implementasi kebijakan publik, di dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Mater dan Van Horn, Edward III, Grindle, dan Mazmanian dan Sabatier.

Model Edward III (1984) dalam (Widodo, 2006:96) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*.

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan

proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementator*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan secara signifikan.

Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi.

Oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima

dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jelas tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya adalah salah satu bagian elemen terpenting pula dalam model implementasi sebuah kebijakan. Edward III (1980) dalam (Widodo, 2006:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III (1980) dalam (Widodo, 2006:98) menegaskan bahwa:

“Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara lebih efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.

Disisi lain Van Horn & Van Matter (1974) dalam (Widodo, 2006:98) juga menyatakan bahwa *“new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan diatas meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya

peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

a) Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini Sumber daya (*resources*) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) dalam (Widodo, 2006:98) menegaskan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Edward III (1980) dalam (Widodo, 2006:98) pada bagian sebelumnya menegaskan bahwa:

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack resources to do an effective job, implementation will not effective”.

Jika sudah demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sekalipun demikian, agar diperoleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu ditegaskan oleh Edward III (1980)

dalam (Widodo, 2006:99) menyatakan bahwa: “*it is not enough for there to be an adequate number of implementors to carry out a policy. Implementors must possess the skill necessary for the job at hand*”.

Selain itu, sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*). Oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementor*) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulations*) berlaku.

Sumber daya manusia pelaku kebijakan (*implementors*) juga harus mengetahui orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Di samping itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Tidak cukupnya sumber daya berarti peraturan (*law*) tidak akan bisa ditegakkan (*enforced*), pelayanan tidak disediakan, dan peraturan yang digunakan tidak bisa dikembangkan.

Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal tersebut ditegaskan oleh Edward III (1980) sebagaimana yang terdapat dalam (Widodo, 2006:100) dalam kesimpulan studinya yakni *“Budgetary limitations, and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the service that implementors can be provide to the public”*.

Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *incentive* sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Berkaitan dengan itu, Van Horn & Van Matter (1974) dalam (Widodo, 2006:100) menyatakan *“new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*.

Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup. Berkaitan dengan

hal tersebut, Edward (1980) dalam (Widodo, 2006:100) menegaskan bahwa:

“ Changing the personnel ingovernment bureaucracies is difficult and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors disposition is to alter the disposition of existing implementors through the manipulation of existing implementors through the manipulation of incentives by high-level policy makers may influence their action”.

Besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk *“rewards and punishment”*. Meskipun dalam pelaksanaannya diakui sulit seperti yang ditegaskan oleh Edwards III (1980) dalam (Widodo, 2006:101) menyatakan bahwa :

“Rewards are the other side of the incentive coin, but they are even more difficult for executives to administer than penalties. In all levels of the executives and judicial branch of government, individual performance is difficult to reward with pay increases”.

Bahkan insentif tersebut dapat mengarah pada terjadinya *“goal displacement”* para pelaku kebijakan, sebagaimana digambarkan oleh Edwards III (1980) dalam (Widodo, 2006:101) bahwa:

“incentives can be to goal displacement. Bureaucrats who are provided incentive to implement policies may begin to pursue goals others that those intended by their superior. Vague and diverse goal,poor measure of performance, and obscure implementation directives make it difficult to evaluate the success of many policies. When a criterion of success is developed for a policy, bureaucrats may attempt to beat the system by emphasizing most whatever is being measured by their superiors, independent of wetter or not their action advance the policy goal”.

Dalam kondisi seperti yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu ditetapkan atau disertakan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus menyertakan atau menyediakan sistem insentif bagi para petugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani.

c) Sumber Daya Peralatan (*Facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III, 1980) dalam (Widodo, 2006:102).

Pernyataan yang muncul adalah bagaimana pengaruh terbatasnya fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan kebijakan. Edwards III (1980) dalam (Widodo, 2006:102) menegaskan bahwa:

“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementator may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won’t succeed”.

Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Mengapa demikian, karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah lama atau kuno terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu, informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Di samaping itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat

dalam implementasikan agar di antara mereka memiliki kemauan untuk melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

George E. Edward III (1980) dalam (Widodo, 2006:103) menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Apabila lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan saja wibawa lembaga akan merosot di mata masyarakat yang dilayani, tetapi jauh lebih dari itu masalah yang mengemuka tidaka akan segera dipecahkan,bahkan cenderung terus mengalami tumbuh kembang di hadapannya. Selain itu,bisa jadi pemecahan masalah yang ada di hadapannya kurang sesuai atau tepat, karena yang membuat keputusan bukan lembaga yang lebih dekat dan lebih tahu masalahnya dan apa penyebabnya. Jika demikian, lembaga yang paling dekat dengan yang dilayani, bahkan pelaku utama kebijakan harus diberi kewenangan yang

cukup membuat keputusan sendiri dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi bidang kewenangannya.

Sumber daya sebagaimana telah disebutkan diatas, merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan atau aturan-aturan (*laws*) tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan, dan pengaturan-pengaturan (*regulation*) yang beralasan tidak akan dikembangkan .

c. Disposisi (*Disposition*)

Sebagaimana ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka sangat mendalam dan memahaminya (*Comprehension and understanding*).

Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), tidak peduli (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Horn & Van Matter (1974) Sebagaimana yang dikutip dalam (Widodo, 2006:104) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut. Tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan Edward III (1980) dalam (Widodo, 2006:105).

Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, sebagaimana yang dikatakan Van Mater & Van Horn (1974). Dalam (Widodo, 2006:105) antara lain: terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*); intensitas terhadap kebijakan .

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standard an tujuan kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standard an tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standard an tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *crucial*. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan, Van Mater & Van Horn (1974) dalam (Widodo, 2006:105). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hal ini dikatakan oleh Van Mater & Van Horn, (1974) dalam (Widodo, 2006:105).

Pada akhirnya intensitas disposisi para pelaku (implementor) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun menurut Edward III (1980) sebagaimana yang dikutip dalam (Widodo, 2006:106),

implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Dimensi fragmentasi (*fragmentation*) menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita atau instruksi nya akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya langka.

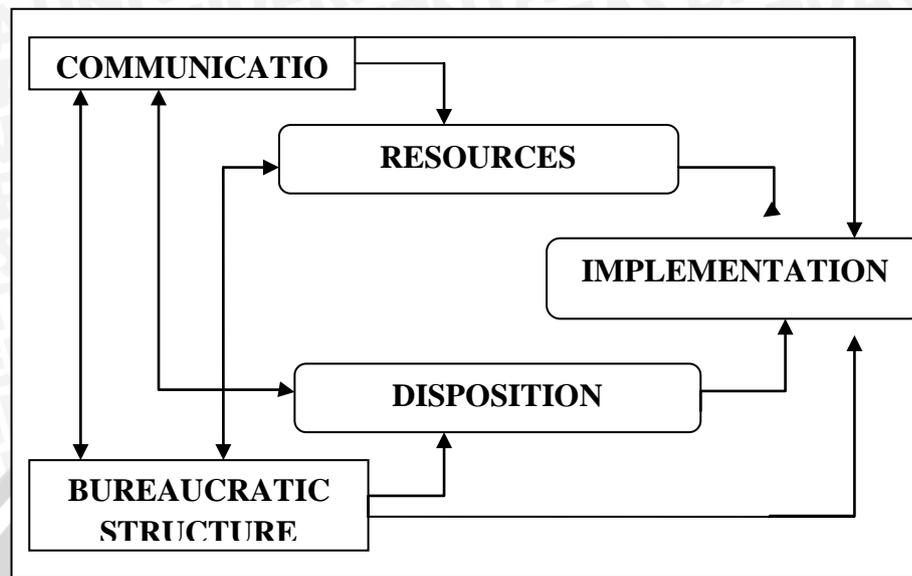
Dengan kata lain organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksana kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang insentif. Hal ini berpeluang terjadi distorsi

komunikasi yang akan menjadi penyebab gagalnya pelaksana suatu kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang menyeluruh, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintang koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-perubahan tidak seperti biasanya) menciptakan kegaduhan, kebingungan, yang semua itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakn yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian pula tidak jelasnya *standard operating procedure*, baik menyangkut mekanisme sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Secara skematis model proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat pada gambar I dibawah ini:



Gambar 1 : Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi

Sumber: George E. Edward III, *Implementing Public Policy*, (1980) dalam (Widodo, 2006:107).

Komunikasi merupakan proses transformasi kebijakan tidak saja kepada para pelaku kebijakan (*policy implementators*), tetapi juga kepada kelompok sasaran (*target groups*) dan lembaga sosial masyarakat (LSM) yang konsentrasi pada masalah kebijakan. Melalui proses komunikasi tersebut, para pelaku yang teridentifikasi dalam struktur birokrasi menjadi jelas (*clarity*) apa yang menjadi substansi kebijakan, mencangkup apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan.

Dengan diketahui dan dipahami substansi kebijakan akan lebih mudah dalam menyusun *standard operating procedure* (SOP) sebagai dimensi dari struktur birokrasi. Kejelasan substansi kebijakan dan SOP melaksanakan kebijakan menjadikan disposisi para pelaku kebijakan semakin jelas. Semakin jelas substansi dan SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah para pelaku kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu,

atau menolak kehadiran kebijakan sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang untuk melaksanakan kebijakan.

Melalui komunikasi ini pula, sumber daya (*resources*) apa saja dan berapa banyak yang diperlukan juga semakin mudah ditentukan untuk melaksanakan kebijakan. Baik sumber daya manusia, informasi, keuangan, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Intensitas dan efektivitas komunikasi kebijakan ini sangat membutuhkan sosok atau figure pimpinan organisasi publik yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas dalam memainkan peran mereka selama proses pelaksanaan kebijakan berlangsung.

Struktur birokrasi merupakan variabel kedua yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sebagaimana telah dikemukakan diatas meliputi aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dimensi struktur birokrasi ini dibedakan menjadi dua macam, yakni dimensi fragmentasi dan dimensi *standard operating procedure* (SOP). Struktur birokrasi ini mempengaruhi tingkat intensitas dan efektivitas komunikasi kebijakan. Semakin terfragmentasi struktur birokrasi juga semakin membutuhkan koordinasi yang intensif dan hal ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi. Apabila komunikasi kebijakan mengalami distorsi sangat berpeluang di antara para aktor kebijakan kurang bahkan tidak memiliki pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang substansi kebijakan.

Akibatnya, peluang terjadinya kegagalan pelaksanaan kebijakan juga semakin besar. Demikian pula semakin jelas SOP (*standard operating procedure*), semakin mudah pula menentukan risorsis, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketepatan dalam menentukan risorsis yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, niscaya akan memberi peluang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kurang cukup atau terbatasnya risorsis yang tersedia dan diperlukan para pelaku kebijakan, niscaya memberi peluang terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin struktur birokrasi terfragmentasi pelaku kebijakan, semakin besar menimbulkan konflik di antara mereka. Akibatnya, hubungan di antara mereka menjadi tidak harmonis. Konflik dan hubungan yang tidak harmonis di antara pelaku kebijakan ini tentu saja akan menimbulkan perbedaan disposisi di antara mereka dalam melaksanakan kebijakan.

Implikasinya, pelaksanaan kebijakan berpeluang terjadi kegagalan. SOP juga akan mempengaruhi tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil apa yang dapat dicapai atau dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Kejelasan ini akan memudahkan

seseorang dalam menetapkan disposisi diri dan organisasinya dalam melaksanakan kebijakan. Manakala manfaat dan keuntungan kebijakan ini diketahui sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, sehingga disposisi para pelaku dan organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, semakin jelas bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak terkecuali di dalam implementasi program hutan desa di Desa Jambi Kecamatan Baron dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai bagian dari penerapan suatu proses kebijakan untuk keberhasilan suatu program artinya memang harus ada integrasi diantara ke empat variabel tersebut meskipun itu tidak mudah karena rintangan ataupun tantangan serta hambatan juga akan terjadi sebagai bagian kesempurnaan pelaksanaan program Hutan desa ini nantinya ketika berjalanya program, namun dengan tanggung jawab dan kesadaran semua pihak yang terlibat serta semua elemen yang ikut menjadi bagian program ini nantinya diharapkan hambatan dapat diatasi dengan baik dan sukses . Oleh karena itu, apabila pelaksanaan kebijakan publik bisa berhasil, keempat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.

B. Teori Program

1. Pengertian Program

Berbagai takrif tentang program pembangunan, dapat diketahui bahwa program di samping bersifat alokatif dan diskriptif, program juga bersifat inovatif dan multi fungsi. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nations (1971) dalam (Zauhar, 1993:2) bahwa:

Programme is taken to mean form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities.

Dengan suatu program berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba dipecahkan. Karena demikian banyaknya problem yang muncul dalam masyarakat, maka diperlukan pula program yang banyak. Atas dasar itulah maka di kebanyakan negara sedang berkembang muncul beragam program semisal program KB, peningkatan gizi, wajib belajar, pembangunan desa, penanggulangan perencanaan lingkungan, dan lain-lain. Program tersebut disamping bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu (*problem solving*) dimaksudkan juga agar masyarakat bangkit motivasinya dan inovasinya, karena mereka tertarik pada program yang dicanangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut disadari benar bahwa kelangkaan sumber merupakan hal yang tak dapat dihindari. Oleh karenanya maka para pengelola pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat. Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

- a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas;
- b) Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan;
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin;
- d) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut;
- e) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri;
- f) Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. (United Nation, 1971) dalam (Zauhar, 1993: 2).

2. Implementasi Program

Setiap perumusan kebijakan (program) selalu diiringi dengan suatu implementasi. Betapapun baiknya suatu program tanpa implementasi yang baik dan benar maka tidak akan banyak yang berarti. Suatu program hanyalah rencana bagus diatas kertas kalau tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan. Udoji dalam (Wahab, 1991:45) menyatakan bahwa pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah sesuatu yang lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan.

Pressman dan Wildavsky dalam (Hessel Nogi, 2003:17) mengartikan implementasi sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan dalam mencapai tujuan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Definisi lain tentang implementasi diberikan oleh Lineberry. Menurut Lineberry dalam (Putra, 2003:8) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam (Putra, 2003:84) mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu.

Dari beberapa pemahaman yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan

yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Dari sebuah Undang-undang muncul sebuah peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, adalah bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat. Kelihatannya implementasi merupakan hal yang mudah, namun kenyataannya sangatlah kompleks.

Untuk mengefektikan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam (Wahab, 1991:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I:

Terdiri atas kegiatan-kegiatan:

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
2. Menentukan standar pelaksanaan.
3. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II:

Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunaan struktur staff, sumber daya, prosedur, biaya, serta metode.

Tahap III:

Merupakan kegiatan-kegiatan:

1. Menentukan jadwal.
2. Melakukan pemantauan.
3. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada dalam tercapainya kegiatan implementasi.

Program akan menunjang implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan tersebut.
3. Adanya peraturan-peraturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi anggaran yang dibutuhkan.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Lebih lanjut Jones (1991) dalam (Hessel Nogi, 2003:30) memberikan pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program itu telah gagal dilaksanakan. Berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya, unsur pelaksana merupakan unsur ketiga dalam proses implementasi suatu program.

Dari wacana diatas dapat disimpulkan bahwa, apakah suatu program terimplementasi dengan efektif atau tidak dapat diukur dengan standar penilaian yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Jones dalam (Hessel Nogi, 2003:32).

- a. Interpretasi

Interpretasi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijaksanaan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan. Tahap ini yaitu bagaimana menafsirkan agar program dapat menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Organisasi

Pelaksanaan dilakukan dengan pembentukan badan-badan atau unit-unit untuk menyelenggarakan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Hal ini dapat dilihat melalui:

1. Struktur organisasi, yang berkaitan dengan interaksi, hirarki, tujuan, dan sifat-sifat.
2. Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Sumber dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.
4. Metode kerja/ prosedur kerja, yaitu berhubungan dengan sistem dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerja secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif.
5. Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal. Dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum.
6. Anggaran dana.

c. Penerapan

Penerapan segala keputusan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari program.

3. Program Hutan Desa

Program hutan desa adalah salah satu program penghijauan yang tujuan jangka pendeknya adalah untuk penghijauan dan/atau untuk pelestarian lingkungan serta memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah

penghasilan. Program hutan desa yang ada di desa jambi kecamatan Baron ini adalah program turunan dari kebijakan Bupati Nganjuk untuk pelestarian dan penghijauan dari program Nganjuk Ijo Royo-royo.

Program yang dicanangkan Bupati Nganjuk, Drs.H.Taufiqurrahman bersama Harian Jawa Pos pada tanggal 27 Mei 2008 lalu, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Nganjuk yang asri, penuh dengan habitat flora, yang sejalan dengan upaya pencegahan dan perlambatan dampak pemanasan global. Jadi diharapkan dengan program Nganjuk Ijo Royo-royo melalui kebijakan penghijauan ini akan tercipta solusi dari permasalahan lingkungan yang semakin mengawatirkan (<http://www.kecbaron.blogspot.com/.../baron-juara-ii-program-nganjuk-ijo-royo.html>).

Manifestasi dari program Ijo-Royo-royo dikabupaten Nganjuk ini kemudian diterjemahkan secara kreatif dan inovatif oleh masing-masing daerah di wilayah Kabupaten Nganjuk. Salah satunya adalah Kecamatan Baron yang pada Tahun 2008 menjadi juara II didalam pelaksanaan program Ijo Royo-royo, dan Desa Jambi yang merupakan wilayah dari Kecamatan Baron adalah salah satu wilayah unggulan dari program Ijo Roro-royo tersebut.

Program Ijo Royo-royo di Desa Jambi Kecamatan Baron di kenal dengan sebutan Program Hutan Desa, hal ini tercantum di Dalam Peraturan Desa (Perdes) Jambi No. 04 Tahun 2008 tentang pelestarian lingkungan yang menyebutkan bahwa:

“Telah dilaksanakan program tersebut untuk melestarikan dan melindungi lingkungan sebagai tindak lanjut dari program IJo Royo-royo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk”. Tujuan yang ingin dicapai dari Program Hutan Desa ini selain memang untuk

penghijauan, perlindungan dan kelestarian lingkungan adalah untuk juga sebagai:

- a) Tersedianya tanaman yang berkualitas yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat.
- b) Sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan.
- c) Sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai penanaman pohon. (Proposal Program Pembuatan (Kebun Bibit Rakyat, 2011:1).

Di Desa Jambi Kecamatan Baron Program Hutan Desa ini dilaksanakan dengan penanaman pohon yang jumlahnya 50.000 Batang Pohon yang diberikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Jambi, untuk ditanam di Pekarangan rumah masing-masing, di sepanjang pinggir jalan, di tanah Kas Desa dan di poros Dusun yang masih di dalam kawasan wilayah Desa Jambi. Tanaman yang ditanam adalah tanaman produktif (kayu-kayuan dan buah-buahan) yang tujuannya adalah agar rasa memiliki warga menjadi lebih besar sehingga timbul niat dan tekad untuk menumbuhkan, melestarikan dan merawat. Sehingga diharapkan tujuan dari keberlanjutan secara sosial, lingkungan dan ekonomi akan tercipta untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang lewat Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron ini.

C. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat karena pembangunan adalah untuk dinikmati seluruh masyarakat

dari semua lapisan tidak terkecuali untuk kalangan atas maupun bawah. Dengan demikian dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan seluruh rakyat dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut (Kartasmita, 1996:67) dikatakan bahwa di dalam pembangunan:

“Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Itulah hakekatnya peran pemerintah dan masyarakat di Indonesia”.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah.

“Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah setidaknya pada tahap awal pembangunan yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar untuk kehidupan masyarakat, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, pasar, dan sebagainya. Sedangkan prasarana sosial meliputi prasarana pendidikan seperti sekolah-sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. Pembangunan

berkelanjutan menuntut administrasi publik yang tanggap terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, baik itu lingkungan fisik alam, lingkungan ekonomi maupun lingkungan sosial.

Salah satu faktor yang dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dipopulerkan melalui *laporan World Conservation Strategy dari the International Union for the Conservation of Nature* pada tahun 1980 Seperti yang dikutip dalam Jurnal Sosial Humaniora dari (Sariffuddin dan Susanti, 2011:30). Laporan ini menyatakan bahwa pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial untuk kaum miskin diseluruh dunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

Sedangkan (Budimanta, 2005:13) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah:

“Suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses

dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya”.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumber daya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Otto Soemarwoto dalam (Sutisna, 2006:45), mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok ukur tersebut meliputi:

- 1) Tolok ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*) dapat diukur dengan berbagai indikator. Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan. Terkait dengan tolok ukur pro lingkungan ini, Syahputra (2007) menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu meliputi:
 - a. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaidah ekologi.
 - b. Pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaruhi (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestariannya serta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resources*).
 - c. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.
 - d. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*).

- 2) Tolok ukur pro rakyat miskin (*pro-poor*) bukan berarti anti kepada orang kaya, yang dimaksud pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin memerlukan perhatian khusus karena tidak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah. Pro rakyat miskin dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI) yang dikembangkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
- 3) Tolok ukur pro kesetaraan gender atau pro-perempuan (*pro-women*), kesetaraan gender ini dapat diukur dengan menggunakan *genderrelated Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) untuk suatu daerah. Jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi disparitas gender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan.
- 4) Tolok ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja (*pro-livelihood opportunities*) dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), index gini, pendapatan perkapita, dan lain-lain.
- 5) Tolok ukur pro dengan bentuk negara kesatuan RI merupakan suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.
- 6) Tolok ukur anti korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diselesaikan serta berbagai hal lain yang terkait dengan gerakan anti KKN yang diterapkan atau dilaksanakan di suatu daerah bersangkutan.

2. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan utuh menyeluruh menghadapi tantangan permasalahan yang bersifat kompleks. Kompleksitas persoalan pembangunan meningkat sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial budaya yang menyertai perjalanan hidup manusia. Sejalan dengan perkembangan organisasi sosial, kapasitas teknologi yang dihasilkan oleh manusia juga mengalami peningkatan seiring dengan

perjalanan waktu. Meningkatnya organisasi sosial dan kapasitas teknologi ternyata telah mengubah persepsi kita terhadap makna pembangunan. Selain mengubah persepsi tentang pembangunan, perubahan organisasi sosial dan kapasitas teknologi juga telah mengubah pola interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya Hughes (2000) dalam Asdak (2012:33). Kedua perubahan tersebut diatas membawa konsekuensi meningkatnya konsumsi sumberdaya alam (SDA), dimana pada kebanyakan kasus telah menyebabkan gangguan terhadap Lingkungan Hidup (LH) dan Keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA). Tingkat gangguan tersebut, pada banyak kasus, telah sampai pada kondisi yang tidak menyembuhkan (*irreversible*).

Pembangunan Berkelanjutan umumnya di definisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), diperlukan tiga syarat, yaitu keberlanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Keambrokan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), disamping mempunyai nilai ekonomi juga mengandung nilai moral dan nilai ekologi. Sebagai bangsa yang melaksanakan pembangunan saat ini,

kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang, yaitu memberikan kesempatan yang sama atau bahkan lebih baik bagi generasi mendatang untuk melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan harus menguntungkan generasi saat ini dan generasi mendatang. Keseluruhan proses dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Sedangkan nilai ekologis yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia. Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia diharapkan tidak mengancam kehidupan makhluk lain karena gangguan terhadap makhluk lain tersebut, pada gilirannya akan mengganggu kehidupan manusia. Dengan demikian, dimensi ekologi lebih menekankan pada pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terganggunya fungsi dasar ekosistem sehingga tidak akan mengganggu fungsi layanan ekologi (*ecological service*). Oleh karenanya, tuntutan ke arah konservasi ekosistem makin besar karena meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati oleh pertumbuhan jumlah penduduk, anomali iklim, pola konsumsi dan oleh sebab antropogenik lainnya.

Selain dimensi ekonomi dan ekologi, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development*) juga mengacu pada dimensi sosial. Dimensi sosial mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi keuntungan secara adil, partisipasi, pemberdayaan masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Upaya ke arah terselenggaranya aspek sosial dalam proses pembangunan harus terus dilaksanakan. Uraian singkat tersebut diatas mengisyaratkan bahwa pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dapat dicapai apabila terjadi keselarasan pencapaian tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekologi. Sebagai contoh, pencapaian pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek pemerataan dan aspek daya dukung lingkungan akan menghasilkan pembangunan yang rapuh masing-masing faktor sosial, ekonomi, dan ekologi juga mempunyai persyaratan tersendiri untuk berlangsungnya keberlanjutan sistem ekonomi, sosial dan ekologi.

1) Keberlanjutan Sistem Sosial

Sumber daya alam (SDA) seharusnya dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Keberlanjutan sistem sosial (*Social Sustainability*) lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas daripada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Keberlanjutan sistem sosial dapat dicapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis Putnam (1993) dalam Asdak (2012:40). Kombinasi dari kohesi sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan,

hukum, disiplin, dan moralitas akan menentukan dan menjadi bagian yang penting dari modal sosial yang mungkin agak sulit untuk dikuantifikasikan, tapi penting untuk diperhatikan. Untuk terwujudnya modal sosial tersebut diatas, peran agama dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi penting. Tanpa pegangan ajaran agama dan/atau sistem nilai yang berasal dari kebudayaan yang kondusif terhadap keberlanjutan sistem sosial, maka modal sosial dapat mengalami kemerosotan untuk selanjutnya runtuh sebagaimana halnya dengan modal fisik.

2). Keberlanjutan Ekonomi

Secara umum yang dikatakan sebagai keberlanjutan ekonomi (*Economic Sustainability*) adalah dalam pengertian “mempertahankan” kapital atau menjaga agar kapital (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan ketika kapital tersebut dimanfaatkan, Dieren (1995) dalam (Asdak, 2012:41). Dari keseluruhan kapital yang selama ini dikenal, yaitu sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial, para pakar ekonomi lebih memberikan perhatian pada sumber daya alam, misalnya sumber daya hutan, air dan udara karena keberadaan sumber daya ini relatif masih masih memadai. Namun demikian, karena para pakar ekonomi lebih sering menggunakan *monetary term* dalam menilai suatu sumber daya alam, maka mereka agak kesulitan dalam menentukan nilai *monetary* untuk sumber daya alam yang termasuk *intangible*. Selama ini, ongkos ekonomi lingkungan dianggap sebagai

faktor eksternal (*Externalities*). Saat ini, oleh adanya tekanan dari berbagai pihak, perlu mempertimbangkan ongkos ekonomi dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Ongkos ekonomi lingkungan tersebut perlu diperhitungkan dalam analisis ekonomi suatu proyek pembangunan melalui kebijakan dan teknik analisis yang tepat (*Internalized the externalities*).

3) Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis sangat diperlukan oleh kehidupan umat manusia karena keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, dalam segala aktivitas yang dilakukannya, manusia seharusnya menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam masih di bawah daya dukung lingkungannya serta limbah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya tersebut juga di bawah ambang batas. Untuk mencapai hal tersebut, manusia harus mampu belajar untuk hidup selaras dan tidak “melawan” hukum lingkungan. Dengan kata lain, manusia harus mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan keterbatasan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya termasuk kemampuan alam dalam mengakomodir limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Selain masalah limbah, pemanfaatan sumber daya manusiapun juga diupayakan masih dalam batas di mana laju tumbuh sumber daya alam lebih besar daripada laju pemanfaatannya. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sebagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut

seharusnya disisihkan untuk membiayai upaya terciptanya (inovasi) teknologi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan/atau untuk menciptakan bentuk kegiatan (ekonomis) pasca pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbarui tersebut. Dengan demikian, aktivitas sosial dan ekonomi yang didukung kemampuan ekologi akan keberlanjutan mengiringi laju pembangunan.

Meskipun pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) selalu menjadi acuan dalam setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah, kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Indonesia secara substansial belum banyak dilaksanakan. Oleh karena itu, dapat dimengerti bila besaran kerusakan lingkungan tidak menurun bahkan cenderung meningkat. Selain belum dilaksanakannya kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), distorsi implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama adanya kecenderungan mengedepankan kepentingan sektoral dan kepentingan masing-masing wilayah (administratif) dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

3. Strategi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Banyak langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) antara lain, strategi pembangunan

berkelanjutan versi *Organization for economic Co-operation and Development* (OECD). Menurut konsep OECD (2001) dalam (Asdak, 2012:42) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan cara, pertama, menelaah pandangan-pandangan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) terhadap isu-isu prioritas yang diperlukan dalam menentukan strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Kemudian memperkirakan keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh dari implementasi strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Perlu dikemukakan di sini bahwa langkah-langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) tidak harus dilaksanakan dengan cara yang kaku (*rigid*). Dalam praktiknya, banyak di antara langkah-langkah tersebut perlu dilaksanakan secara bersamaan dan beberapa dilaksanakan ketika muncul kesempatan. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), sebagaimana yang dijelaskan oleh (Asdak, 2012:43):

- 1) Menciptakan dan/atau menguatkan lembaga koordinasi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan serta mengupayakan agar lembaga tersebut mempunyai cukup kewenangan dan sumber dana untuk melaksanakan tugasnya.
- 2) Membangun dan/atau memperbaiki komitmen politik dari sejak proses persiapan hingga pelaksanaan dan melibatkan berbagai elemen dari pusat hingga daerah.
- 3) Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang diharapkan berperan dalam persiapan dan implementasi strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan mendorong terjadinya diskusi tentang peran masing-masing yang terlibat.
- 4) Menjamin atau memastikan terciptanya suasana adanya rasa memiliki (*Sense of Belonging*) strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) oleh masing-masing kementerian

sektoral dan lembaga lain yang terlibat serta masyarakat luas dan kalangan bisnis dan industri.

- 5) Menggerakkan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Hal ini dilaksanakan melalui identifikasi, mengamankan dan mengalokasikan sumber daya pada waktu dan cara yang tepat. Untuk itu, diperlukan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Keahlian dan sumber pengetahuan termasuk pelatihan.
 - b. Dukungan pengelolaan, legalitas dan kelembagaan.
 - c. Sumber daya finansial.
- 6) Mengidentifikasi dan mencari kesepakatan tentang peran masing-masing pemangku kepentingan, misalnya hak masing-masing pemangku kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan.
- 7) Memetakan proses strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*)
 - a. Identifikasi isu-isu yang perlu ditelaah, visi, tujuan dan tanggung jawab.
 - b. Identifikasi proses dan mekanisme yang digunakan dalam strategi pembangunan saat ini.
 - c. Telaah/review hasil dicapai dibawah strategi dan mekanisme pembangunan saat ini dalam konteks sinergitas, kesenjangan, konflik dan keluaran yang diperoleh.
 - d. Mengenali konflik sektoral yang terjadi termasuk konsistensi dan upaya untuk mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan tersebut.
 - e. Identifikasi tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki sinergitas dan mengatasi kesenjangan yang masih terjadi.
- 8) Mengembangkan dan memperbaiki koordinasi dan koherensi antar strategi dari tingkat internasional hingga tingkat lokal, antar dan dalam sektor.
- 9) Menciptakan atau memperbaiki regulasi yang mengatur proses strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) melalui:
 - a. Mendiskusikan dan menyepakati proses pengambilan keputusan dan hasilnya serta bersepakat tentang cara menyelesaikan persoalan yang timbul.
 - b. Melakukan koordinasi tentang cara-cara negosiasi dan pengelolaan konflik.
- 10) Menciptakan dan memperbaiki persyaratan untuk analisis regular, perdebatan/diskusi, komunikasi, perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat memainkan peran secara optimal dalam mencapai strategi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

4. Penghijauan Lingkungan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup”.

Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Selanjutnya di ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat (RPPLH).

Pembangunan berkelanjutan dalam Undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Sedangkan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat (RPPLH) adalah: “Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu”.

Salah satu upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka dilakukan kegiatan penghijauan. Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini (Yakin, 2004:24) mendefinisikan Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut juga dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan artinya bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Upaya dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan, tidaklah hanya mengandalkan pemerintah saja, namun lebih jauh masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Diantaranya yaitu dengan pola pendidikan melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya menata dan memelihara

kelestarian lingkungan hidup. Membangun kesadaran masyarakat yang mempunyai wawasan lingkungan yang luas merupakan “pilar” dalam menjaga kondisi lingkungan benar-benar jauh dari berbagai sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebab, pada dasarnya masalah lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri.

Masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan etika atau moral lingkungan yang tinggi benar-benar dibutuhkan dalam setiap pembangunan di Indonesia. Tidak terkecuali adanya penegakan hukum lingkungan secara tegas dan terarah. Lebih jauh, dengan mengacu pada hal tersebut setidaknya wawasan lingkungan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Masalah lingkungan, seperti banjir, tanah longsor dan kelangkaan air bersih yang sering terjadi di sebagian wilayah Indonesia, memang merupakan salah satu efek dari adanya pemanasan global. Bukan saja menimpa Indonesia, namun di negara-negara lain pun juga ikut merasakan. Walaupun sering dilanda banjir dimusim penghujan, Indonesia dalam waktu tertentu juga mengalami kelangkaan air bersih, terutama untuk keperluan pertanian. Hal tersebut adalah merupakan suatu bukti konkret akibat kurangnya kesadaran masyarakat kita dalam melestarikan lingkungan hidup. Jika hal ini dibiarkan, ini akan berpengaruh pula

terhadap kualitas kehidupan terutama kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

a. Peranan Penghijauan Lingkungan

Penghijauan lingkungan merupakan solusi tepat untuk mengatasi segala bencana akibat kerusakan lingkungan seperti banjir. Jika program penghijauan difungsikan dengan optimal, dan sistem drainase diperbaiki, sampah dikelola secara benar serta pembangunan dinding penahan banjir (DAM) dilaksanakan ditambah peran serta segenap warga dalam hal penghijauan lingkungan, banjir pasti dapat dicegah dan diatasi secara tuntas. Penghijauan (*Go Green*) adalah program “sayangi bumi” yang sangat tepat untuk dijadikan untuk dijadikan solusi, agar bumi tetap bisa diwariskan serta dinikmati oleh generasi masa yang akan datang yaitu anak cucu kita nantinya (<http://www.sayangibumi.blogspot.com>). Adapun peranan dari penghijauan lingkungan yaitu dapat sebagai resapan air, ruang interaksi, dan menyerap polusi udara, dan juga mengatasi permasalahan global (*global warming*).

5. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Sifat keterkaitan sumber daya alam dan tatanan lingkungan mengharuskan

cara dan mekanisme pembangunan yang memperhatikan keterkaitan tersebut.

Hal ini memberikan konsekuensi dimana pengembangan yang dilakukan di suatu sektor harus memperhatikan dampaknya pada pengembangan sektor lainnya. Selain itu, keterkaitan manusia pribadi sebagai makhluk sosial dengan lingkungan sosialnya perlu diperhatikan pula. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri saja, tetapi juga memperhatikan dampak pembangunan terhadap kedudukan manusia sebagai makhluk sosial (Yakin, 2004:25).

Lebih lanjut menurut (Yakin, 2004:26) dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pembangunan itu sarat akan nilai, dalam arti bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi.
- b) Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat dan semua pihak yang terkait.
- c) Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.
- d) Pembangunan membutuhkan kriteria dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
- e) Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar tepat guna, berhasil

guna, dan berdaya guna. Disinilah peran pemerintah sebagai regulator agar setiap keputusan pembangunan harus memasukkan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, disamping pengentasan kemiskinan dan pola konsumsi sehingga hasil pembangunan akan memberikan hasil yang paling baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln seperti yang dikutip dalam (Moeleong, 2007:5) penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

Berkenaan dengan penelitian deskriptif, menurut (Usman, 2008:130) menyatakan bahwa:

“Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti yang lainnya, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali responden dan teman sejawat)”.

Sedangkan Metode Kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2008:143) digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian

tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Oleh karena itu, Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena di dalam fenomena di lapangan peneliti berupaya untuk menggambarkan bagaimana fenomena terkait Implementasi program Hutan desa untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) Di Desa Jambi Kecamatan Baron, kemudian penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisa apakah Implementasi Program Hutan Desa tersebut memenuhi kriteria untuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Maksudnya adalah Pemilihan analisis data kualitatif ini adalah dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif itu adalah untuk menguji sesuatu hal, artinya Faktor X akan diujikan untuk mendapatkan dampak berupa Y, ini sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti bahwa apakah implementasi program hutan desa ini akan berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tentu dengan pembuktian dari survey, wawancara dan Analisis dari data selama penelitian dilapangan kemudian dikaitkan dengan Teori Implementasi Kebijakan, Model Implementasi Kebijakan Edward III, dan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan secara sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum dalam tahap pertama dilaksanakan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum atau menyeluruh tentang subyek atau situasi yang diteliti.

Menurut (Moleong, 2007:94) fokus penelitian digunakan peneliti agar tahu persis data mana dan data tentang apa dan data mana yang perlu dikumpulkan dan dengan penetapan fokus jelas dan mantap peneliti dapat menentukan pula data mana yang tidak perlu digunakan dan yang akan dibuang. selanjutnya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

a. Gambaran Penyusunan Implementasi Program Hutan Desa.

- a) Penyusunan dalam menyelenggarakan Program Hutan desa Di Desa Jambi Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).
- b) Sumber Daya dalam Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.

b. Pelaksanaan Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

- a) Komunikasi antar Semua elemen yang Terlibat didalam Pelaksanaan program.

b) Sasaran pelaksanaan sebagai tujuan program Hutan desa di
Desa Jambi Kecamatan Baron.

**c. Dampak dari Implementasi Program Hutan Desa untuk
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable
Development*).**

- a) Secara Ekonomi
- b) Secara Sistem Sosial
- c) Secara Lingkungan

**2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program
Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan (*Sustainable Development*).**

a). Faktor Pendukung

a. Internal

- a) Sumber Daya Manusia
- b) Lokasi
- c) Kondisi Sosial Masyarakat

b. Eksternal

- a) Relevansi Program Hutan Desa dengan Ijo Royo royo
- b) Dukungan dari Pemerintah Daerah

b).Faktor Penghambat

a. Internal

- a) Perawatan Tanaman
- b) Terbatasnya Lahan Pekarangan Warga

b. Eksternal

a) Pengawasan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian.

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam suatu penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam Penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Baron, karena Kecamatan Baron adalah wilayah yang sukses menerapkan Program Pelestarian lingkungan yaitu Program Ijo Royo-royo dengan Predikat Juara Ke-Dua di dalam pelaksanaan program tersebut pada tahun 2008. Maka atas dasar tersebutlah peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Kecamatan Baron untuk mendapatkan informasi, data secara detail dan akurat untuk menganalisa apakah Implementasi program hutan desa sebagai bagian dari program ijo royo-royo tersebut memiliki dampak didalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Situs penelitian menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap objek yang akan diteliti, sehingga keakuratan data, informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh secara detail dan benar. Situs dalam penelitian ini adalah di Desa Jambi, alasan pemilihan lokasi tersebut adalah Desa Jambi merupakan Desa Unggulan di dalam kesuksesan pelaksanaan program kelestarian lingkungan sehingga Kecamatan Baron memperoleh

juara II di dalam Pelaksanaan program Ijo royo-royo di Kabupaten Nganjuk.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan (Arikunto, 2002:107) bahwa Sumber data dalam penelitian terbagi sebagai berikut:

a. Sumber data

a) Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana penentuan jumlah sampel bersifat tidak tentu. Artinya bila data yang diperoleh dari sampel yang ada sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel yang ada dinyatakan cukup.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa Jambi, serta Perangkat Desa Jambi dan Beberapa pegawai kecamatan Baron.

b) Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis seperti Peraturan Desa (Perdes) nomor 04 tahun 2008, bahan-bahan laporan seperti Proposal Kebun Bibit Rakyat di Desa Jambi Kecamatan Baron, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang tersedia dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

c) Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan dengan Implementasi Program Hutan Desa Untuk

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

b. Jenis Data

a) Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dan sebenarnya, dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kaitannya dengan penelitian ini, pihak yang dimaksud antara lain:

a. Pelaksana dan Sumber Daya yang dilibatkan dalam Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron, antara lain:

1. Bapak Imam Mahmudi (Pengawas dari Kecamatan).
2. Bapak H. In'am Ichwan (Kepala Desa Jambi) Ketua Kader Ijo royo-royo dan Penanggung Jawab program Hutan Desa.
3. Bapak Subroto (Ketua Program Hutan Desa).
4. Bapak Didik Sujarwo (Kebayan II) anggota Program Hutan Desa.
5. Bapak Agus Edy Tiono (Sekretaris Program Hutan Desa).
6. Bapak Durianto (Kamituwo Ringin Kembar), Pembuat Peraturan Desa (*Perdes*) tentang Pelestarian lingkungan dan Hutan Desa.

b) Data Sekunder

Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik Dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data Melalui informan secara tertulis ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data sekunder dalam Program Hutan Desa ini adalah arsip-arsip seperti Proposal Pembuatan Kebun Bibit Rakyat, Dokumen atau surat keputusan, laporan-laporan yang berupa surat Edaran terkait dengan Program Hutan Desa serta rancangan Peraturan Desa (Perdes) terkait Pelestarian lingkungan dan Hutan Desa yang dapat memuat informasi ataupun data-data yang terdapat di Kantor Desa Jambi, dan di Kantor Kecamatan Baron,

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:133).

Wawancara ini dilakukan dengan dua komponen Lembaga yaitu:

- 1) Pemerintahan Desa yang terdiri atas Bapak H. In'am Ichwan (Kepala Desa Jambi) Ketua Kader Ijo royo-royo dan

Penanggung Jawab program Hutan Desa. Bapak Subroto (Ketua Program Hutan Desa). Bapak Didik Sujarwo (Kebayan II) anggota Program Hutan Desa. Bapak Agus Edy Tiono (Sekretaris Program Hutan Desa). Bapak Durianto (Kamituwo Ringin Kembar), Pembuat Peraturan Desa (*Perdes*) tentang Pelestarian lingkungan dan Hutan Desa.

2) Pemerintahan di kecamatan, yaitu dengan Bapak Imam Mahmudin (Ketua Seksi Kesejahteraan Rakyat) di Kecamatan Baron dan Pengawas untuk Program Hutan Desa.

2. Observasi

Nawawi & Martini dalam (Afifudin dan A. Saebani, 2009: 134) mengatakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam suatu penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung di Desa Jambi berkaitan dengan Program Hutan Desa untuk memperoleh informasi dan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan masalah penelitian maupun fokus

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap Implementasi Program Hutan Desa.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi penelitian. data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya sudah ada, antara lain yaitu arsip-arsip, dokumen atau surat keputusan, laporan-laporan, dan rancangan Peraturan Desa. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah.

Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang *checklist* untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka tinggal membubuhkan tanda *check* ditempat yang sesuai untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2002:135).

Dokumentasi yang didapat di Desa Jambi yaitu berupa Surat Edaran baik dari Kecamatan maupun kabupaten tentang pelestarian lingkungan, Peraturan desa terkait Pelestarian lingkungan dan hutan desa, Proposal Kebun Bibit Rakyat.

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan Instrumen dalam pelaksanaannya Menurut (Moleong, 2007:168) mengatakan dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, maka instrument penelitian yang dipergunakan antara lain :

1. Peneliti sendiri

Disini peneliti sendirilah yang dijadikan instrumen, karena peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpul data. Peneliti berperan menjadi objek sekaligus sebagai subjek data penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan yang ikut berperan serta. Namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. (Moleong, 2006:163).

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Didalamnya terdapat serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti yang melakukan wawancara dengan informan atau

narasumber untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Fokus dari wawancara ini adalah kepada perwakilan perangkat Desa Jambi, yang memahami akan program ini.

3. Catatan Lapangan (*field note*)

Field note menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2006:209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

Catatan dilapangan ini, telah peneliti kemas melalui buku catatan untuk menjadi bukti dan arsip dari pelaksanaan penelitian di Desa Jambi Kecamatan Baron.

4. Perangkat Penunjang Lapangan

Perangkat penunjang lapangan merupakan alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera untuk merekam suara dan foto-foto aktivitas yang dilakukan responden, hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis ketika pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak dapat ditangkap langsung oleh penulis.

5. Dokumen dan Arsip-arsip

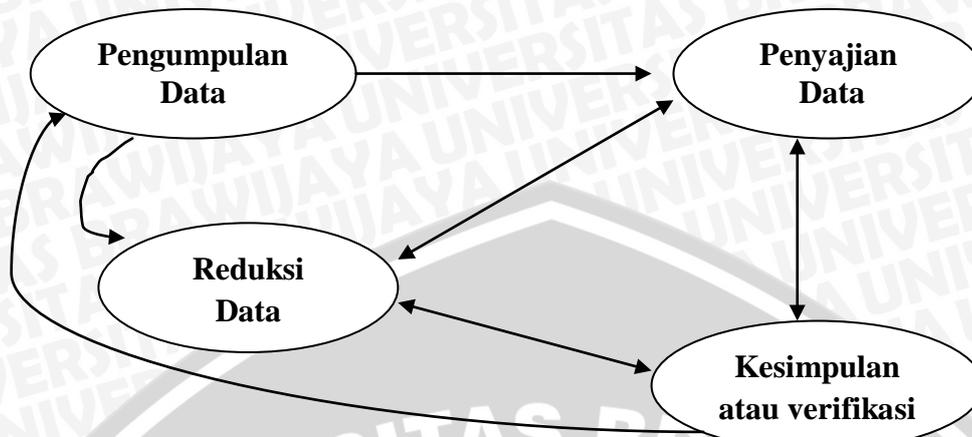
Instrumen ini berupa data dari salinan arsip atau catatan resmi yang diperoleh penulis dari Desa Jambi Kecamatan Baron,

yang kemudian nantinya digunakan penulis untuk menambah hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian.

G. Analisis Data

Proses menganalisis dalam metode kualitatif dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis model interaktif (Milles dan Hubberman, 1992:16-21). Model Interaktif dari Milles dan Huberman ini dipilih peneliti dengan pertimbangan secara penelitian kualitatif ini sesuai untuk mengetahui Faktor X guna mendapatkan suatu dampak berupa Y maka model ini sesuai dengan alur berfikir tersebut, artinya data yang nantinya di dapat dilapangan terkait Implementasi Program Hutan Desa harus terlebih dahulu direduksi untuk diperoleh suatu gambaran secara pasti terkait dengan detail masalah dan fenomena yang ada di lapangan, setelah itu dipilah melalui penyajian data, serta yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan untuk kemudian mengetahui apakah benar program ini mampu Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Analisis data kualitatif menurut (Miles dan Huberman ,1992:16-21) terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, model analisis interaktifnya bisa dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif

Sumber: Miles dan Huberman, dalam (Sugiyono, 2012: 208)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data: Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari Wawancara dan dokumentasi dengan narasumber-narasumber yang relevan dengan fokus penelitian, seperti Sumber Daya Manusia antara Lain Perangkat Desa serta perwakilan dari Kecamatan Baron di dalam Pelaksanaan Program Hutan Desa untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)
2. Reduksi Data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. artinya disini peneliti melakukan penelaahan terhadap semua

data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan dan yang telah dijelaskan diatas. Peneliti melakukan proses reduksi data terhadap data yang dikumpulkan dengan cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu berusaha membuat rangkuman pada masing-masing fokus. Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji adalah data yang memang berhubungan dengan judul dari penelitian itu sendiri.

3. Penyajian Data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya disini bahwa data yang telah direduksi peneliti dari Fakta dan kejadian dilapangan dari pelaksanaan Program Hutan Desa di Desa Jambi, kemudian peneliti melakukan display dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari situs di Desa Jambi dan lokasi penelitian di Kecamatan Baron kemudian disajikan sesuai dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diinterpretasikan oleh peneliti dan juga dihubungkan

dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisis pembahasan terkait dengan Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Baron. Kabupaten Baron adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gondang dan Patianrowo disebelah Utara, Kecamatan Kertosono dan Ngronggot disebelah Timur, Kecamatan Tanjunganom dan Ngronggot disebelah Selatan dan Kecamatan Tanjunganom disebelah Barat.

a. Pembagian Administratif

Kecamatan Baron terletak antara $111^{\circ} 45'$ - $112^{\circ} 13'$ Bujur Timur sampai dengan $7^{\circ} 20'$ - $7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan. Luas Kecamatan Baron adalah sekitar ± 3680.2 Ha yang terdiri atas:

- a) Tanah Sawah: 2115.3 Ha
- b) Tanah Kering: 597.9 Ha
- c) Tanah Bangunan dan Halaman: 807.5 Ha
- d) Tanah Kebonan: 75.3
- e) Lain-lain: 84.2

Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah, Kecamatan Baron memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan

sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus ditunjang adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha.

Jumlah curah hujan per bulan selama 2002 terbesar terjadi pada bulan Januari yaitu 7.416 mm dengan rata-rata 436 mm. Sedangkan terkecil terjadi pada bulan November dengan jumlah curah hujan 600 mm dengan rata-rata 50 mm. Pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tidak terjadi hujan sama sekali.

b. Pembagian Administratif Pemerintahan

Kecamatan Baron mempunyai 11 Desa, dengan jarak tempuh menuju kecamatan yang berbeda-beda Desa-Desa dan jarak tempuh tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL: 1
DESA dan JARAK ANTAR DESA
Ke KECAMATAN dan PASAR

DESA	KECAMATAN (KM)	PASAR (KM)
(1)	(2)	(3)
1. Sambiroto	3.0	3.2
2. Gebangkerep	2.4	2.6
3. Baron	0.2	0.3

DESA	KECAMATAN (KM)	PASAR (KM)
4. Waung	1.8	1.6
5. Kemlokelegi	3.5	3.3
6. Kemaduh	6.0	6.2
7. Garu	5.5	5.3
8. Jekek	3.8	3.6
9. Jambi	8.0	7.8
10. Mabung	7.0	6.8
11. Katerban	7.5	7.3

Sumber: Podes 2011

Kecamatan Baron sendiri secara keseluruhan memiliki 39 Dusun, 86 RW (Rukun Warga) dan 289 RT (Rukun Tetangga) serta 13.703 Kepala Keluarga adapun rincian secara jelasnya adalah sebagai berikut:

TABEL 2
JUMLAH DUSUN, RW, RT, DAN KEPALA KELUARGA
PER DESA TAHUN 2012

DESA	DUSUN	RW	RT	KEPALA KELUARGA
1. Sambiroto	3	4	18	1005
2. Gebangkerep	2	8	16	796
3. Baron	4	8	29	1420

DESA	DUSUN	RW	RT	KEPALA KELUARGA
4. Waung	3	9	36	1311
5. Kemlokolegi	4	5	24	1071
6. Kemaduh	4	9	27	1097
7. Garu	3	11	21	780
8. Jekek	5	10	30	1617
9. Jambi	2	4	18	737
10. Mabung	3	7	22	1551
11. Katerban	6	11	48	2318
Jumlah	39	86	289	13 703

Sumber: Kantor Desa

Sementara itu untuk mengurus kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga mengurus hubungan dengan pemerintahan pada level di atasnya, maka dibentuklah struktur organisasi pemerintahan kecamatan, dengan pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh bapak Camat, adapun beberapa Camat yang memimpin Kecamatan Baron terhitung tahun 2000 sampai sekarang adalah:

TABEL 3
DAFTAR NAMA CAMAT KECAMATAN BARON

NAMA	TAHUN MENJABAT
1. Drs. Achmad Sunarto	2000-2001

NAMA	TAHUN MENJABAT
2. Drs. Mochamad Muhadjir, ST	2001-2002
3. Drs. Ali Supandi	2002-2006
4. Muslan, S.Sos	2006-2008
5. Sopingi, Ap, MM	2008-2008
6. Drs. Heru Purnomo, MM	2009-2010
7. H. Imam Hambali, SH, MM	2010-Sekarang

Sumber: Kecamatan Baron

C. Penduduk

Syarat suatu wilayah secara *de facto* diakui menjadi pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah salah satunya terdapat masyarakat atau penduduk di dalamnya yang menempati tempat tersebut, serta sebagai bagian dari berdirinya suatu wilayah tersebut dan juga merupakan objek dari kegiatan serta pelayanan yang diberikan dari pemerintahan tersebut. Di Kecamatan Baron sendiri terdapat 55.012 penduduk yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan yang terhimpun terhitung tahun 2012.

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK DESA DI KECAMATAN BARON
2012

DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1. Sambiroto	2072	2097	4169
2. Gebangkerep	1353	1404	2757
3. Baron	2440	2664	5104

DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
4. Waung	2440	2499	4939
5.Kemlokolegi	2191	2252	4443
6.Kemaduh	2262	2263	4525
7. Garu	1817	1759	3576
8. Jekek	3313	3240	6553
9.Jambi	1443	1408	2851
10. Mabung	3205	3223	6428
11.Katerban	4910	4757	9667
Jumlah	27446	27566	55012

Sumber: Registrasi Penduduk.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

Situs Penelitian dalam hal ini adalah Desa Jambi yang merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Baron.

a) Sejarah Desa

Dilihat secara umum bahwa Desa Jambi yang terletak di Kecamatan Baron sama dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Nganjuk, yaitu Desa agraris dengan lahan pertanian terbentang relative luas, taka da keistimewaan yang menonjol, namun apabila diamati dengan lebih teliti, ternyata ada perbedaan yang menunjukkan peran Jambi dimasa lampau berupa sisa-sisa peninggalan kuno. Sisa-sisa itu adalah:

- 1) Banyaknya batu bata ukuran besar, bahkan oleh penduduk sering ditemukan seperti rangkaian bekas pondasi rumah, terutama disekitar tempat penggilingan padi sampai kearah utara. Oleh penduduk bekas batu bata tersebut dimanfaatkan untuk membangun rumah maupun pagar tembok
- 2) Di tengah sawah desa, tersisa satu buah lumpang batu yang belum sempat tercuri, oleh penduduk dipercaya masih keramat.
- 3) Tanah persawahan yang lebih rendah dari sekitarnya dengan lebar lebih dari 50 meter membujur dari selatan ke utara bersambung dengan desa-desa lain di sebelah dan utaranya oleh penduduk diyakini sebagai Bangsawan Brantas pada abad yang lalu.

Pada sekitar tahun 927-929 M, Sriwijaya mengirimkan suatu armada besar dari divisi Jambi ke Jawa Timur melalui perjalanan laut dengan route menyusuri pantai utara Jawa, memasuki Bengawan atau sungai Berantas. Sesampainya di Ujung galuh, perjalanan diteruskan ke kota pelabuhan berikutnya yaitu Bandar Alim. Kehadiran pasukan Jambi dalam jumlah banyak daerah sekitar menjadi mendadak ramai. Tempat inilah yang sekarang dinamakan Desa Jambi.

b) Sejarah Pemerintahan Desa

Adapun sejarah pemerintahan Desa atau sebagai kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) Mbah Ompong Masa Pemerintahan (.....)
- 2) Jokromo Masa Pemerintahan (.....)

- 3) Sairi Masa Pemerintahan (.....)
- 4) Jopawiro Masa Pemerintahan (1950 s/d 1958)
- 5) Soemaryono Masa Pemerintahan (1958 s/d 1958)
- 6) Subandi Masa Pemerintahan (1958 s/d 1967)
- 7) Tarmun Masa Pemerintahan (1967 s/d 1990)
- 8) Gunarso Masa Pemerintahan (1990 s/d 1998)
- 9) Siswoyo Masa Pemerintahan (1998 s/d 2007)
- 10) H. In'am Ichwan Masa Pemerintahan (2007 s/d Sekarang)

TABEL 5: SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

NO	PERIODE PEMERINTAHAN	TAHUN	KEGIATAN PEMBANGUNAN
1	Jopawiro	1950 s/d 1958	Pembangunan Masjid As-Salam
2	Subandi	1958 s/d 1958	Pembangunan Masjid Miftahul Ulum
3	Tarmun	1958 s/d 1967	Pelebaran Jalan Bogoran Tugu batas Desa Pos kampling 6 Buah Plengsengan a 147, a148, a163 Plengsengan apur 14Bogoran Sekolah Dasar Jambi I dan II Balai Desa Puskesmas pembantu



NO	PERIODE PEMERINTAHAN	TAHUN	KEGIATAN PEMBANGUNAN
			Gapuro jalan widas, masjid dan SDN Jambi 1 Jalan tembus dusun Bandaralim.
4	Gunarso	1990 s/d 1998	Pembangunan teras balai Desa Pembangunan MCK di Balai Desa Tempat parker sepeda Jembatan apur 14 Jembatan B26 Bogor Pembangunan Masjid Sunan Giri
5	Siswoyo	1998 s/d 2007	Pembangunan Gedung TK Darma Wanita Penerangan Jalan Perbaikan saluran A147, A148 Meninggikan jalan kesawah bengkok Pemasangan jembatan dan perbaikan lapangan.
6	In'am Ichwan	2007 s/d Sekarang	Perbaikan gedung TK Pafing jalan tembus Perbaikan saluran A147, A171,

NO	PERIODE PEMERINTAHAN	TAHUN	KEGIATAN PEMBANGUNAN
		2008	<p>A148</p> <p>Pembuatan pos kampling 2 tempar</p> <p>Perbaiki 6 pos kampling</p> <p>Perbaiki penerangan jalan</p> <p>Pembuatan jembatan</p> <p>Pengurukan jalan tangkis</p> <p>Pemeliharaan jalan desa</p> <p>Pemeliharaan saluran</p> <p>Makadam jalan gang widas</p> <p>Makadam jalan gang pande</p> <p>Makadam jalan gang seri</p> <p>Makadam jalan gang mantra</p> <p>Makadam jalan gang persil</p> <p>Perbaiki pos kampling dan pasang keramik</p> <p>Pengurukan tanah titi soro</p> <p>Pemugaran 2 rumah</p> <p>Pemeliharaan jalan pasir</p> <p>Tambah aspal jalan desa</p>

NO	PERIODE PEMERINTAHAN	TAHUN	KEGIATAN PEMBANGUNAN
		2009	Rehap mushola Al-Bayan Pemeliharaan gedung TK Pengurukan tepi jalan desa Penanaman seribu pohon di tepi jalan desa Pemasangan keramik balai desa Pengecoran dek balai desa Pengaspalan jalan Jambi Bogoran Makadam + aspal jalan jambi Pemeliharaan aspal Jalan Desa Pembuatan Serambi Masjid Miftahul Ulum Rehap Musholla An-Nur Pengurukan Jalan Makadam Makadam jalan Jambi Kedungrejo Makadam gang Mobin Rehap gedung SDN Jambi Pembuatan bangku Masjid Sunan Giri

NO	PERIODE PEMERINTAHAN	TAHUN	KEGIATAN PEMBANGUNAN
			Pembuatan plengsengan 147 Pemugaran 2 Rumah Pembuatan permainan luar TK dan RA Rehab gedung SDN Jambi 1 dan II Pembuatan Musholla SDN Jambi I Rehab serambi Masjid Sunan Giri Penataan jalan ke tanah bengkok Pemeliharaan jalan aspal desa

c) Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa adalah terdiri dari 723 KK, dengan jmlah total 2792 Jiwa, dengan rincian 1432 Laki-laki dan 1360 Perempuan.

Secara administrative, Desa Jambi terletak di Wilayah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mabung. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom. Di

sisi Selatan berbatasan dengan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Mabung.

Jarak tempuh Desa ke ibu kota Kecamatan adalah 4 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 Jam.

d) Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa. Hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilpres, Pemilukada, dan Pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (Kandidat)nya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut (*pulung*) dalam tradisi Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan,

etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan kepala desa pada tahun 2006. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa bagi warga masyarakat desa seperti acara perayaan desa.

Pada bulan juli dan November 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepada Desa, namun hampir 70% daftar pemilihan tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Kemeriahan warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong-menolong maupun gotong-royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Jambi mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Jambi kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa. Dalam hal kegiatan agama islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa atau Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapatkan respond dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa. dalam rangka merespon tradisi lama ini telah membawa dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis hal tersebut akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia), dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2009 warga yang sudah menempuh pendidikan S1 sebanyak 39 orang, Diploma 2 ada 12 orang, D1 ada 3 orang dan lulusan SLTA 304 orang.

Sedangkan dalam masalah kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas

masyarakat kedepan. Kondisi kesehatan warga masyarakat cukup baik didukung adanya bidan desa dan polides, kegiatan di posyandu berjalan cukup baik dan rutin dilaksanakan oleh bidan desa dibantu dengan kader posyandu dan pengurus PKK.

e) Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Jambi secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Jambi dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa atau perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 897 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 131 orang yang bekerja disektor industry 46 orang.

f) Visi dan Misi

1) Visi

Keberadaan Visi adalah merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Jambi. Visi yang diusung oleh Desa Jambi adalah “Mewujudkan Masyarakat yang Agamis, Hidup Sejahtera, Penuh Kerukunan dengan Dilandasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Jambi yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

2) Misi

Hakekat Misi Desa Jambi merupakan turunan Visi Desa Jambi. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Jambi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Jambi.

Untuk meraih Visi Desa Jambi seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jambi sebagai berikut:

Menjadikan Desa "J-A-M-B-I.

J = Jaya
A = Aman
M = Maju
B = Beriman
I = Indah

1. Mewujudkan dan mengembangkan masyarakat Desa Jambi yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (Wirausahawan)

3. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
 4. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
 5. Menata pemerintahan Desa Jambi yang kompak dan bertanggung jawab dalam amanat masyarakat.
 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
 7. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
 8. Menumbuh kembangkan kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
 9. Menumbuhkan usaha kecil dan menengah
- g) Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 5 tahun kedepan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti:

- 1) Wajib belajar anak didik 9 tahun dengan target 5 tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.
- 2) Penyediaan air bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
- 3) Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga.
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan di poskesdes sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
- 5) Revitalisasi peran dan fungsi posyandu.

2. Mengoptimalkan Potensi Pertanian

- 1) Memanfaatkan lahan tidur dan lahan perhutani yang ada dengan tanaman keras tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan perhutani.
- 2) Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bendungan.
- 3) Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
- 4) Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro.

- 1) Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK
- 2) Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
- 3) Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

Maka memperhatikan misi Desa Jambi di atas utamanya terkait arah kebijakan pembangunan Desa untuk memanfaatkan lahan tidur untuk dimanfaatkan secara maksimal lewat kerjasama pemerintah Desa dengan pemerintah daerah, perhutani dan seluruh masyarakat. Hal ini adalah salah satu keuntungan untuk mensukseskan suatu program yang tujuannya memang berbasis pada memanfaatkan lahan yang kosong dan program pelestarian lingkungan tentunya sangat relevan dengan misi tersebut. Karena tidak hanya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang kosong saja, namun juga untuk penghijauan serta menyimpan manfaat lain terutama untuk kebutuhan masyarakat untuk kehidupan mereka.

B. Hasil Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

a. Gambaran Penyusunan Implementasi Program Hutan Desa.

Penyusunan implementasi program hutan desa ini adalah sebagai bagian dari menindaklanjuti keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari menanam Pohon Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur untuk penyelamatan Bumi, peraturan diatas adalah pedoman bagi pelaksanaan pemeliharaan lingkungan di Kabupaten Nganjuk, lewat program penghijauan yang dinamakan Ijo Royo-royo, hal tersebut dipandang perlu untuk memberikan panduan, pedoman di dalam pelaksanaan Gerakan Menanam dan Memelihara pohon sebagai bagian menjaga ekosistem lingkungan dan alam, menuju Nganjuk Ijo Royo-royo.

(Sumber: Surat edaran nomor 522.4/691/411.302/2010 tentang Gerakan menanam dan memelihara pohon menuju Nganjuk Ijo royo-royo).

Gerakan menanam dan memelihara pohon menuju Nganjuk Ijo Royo-royo merupakan bentuk kepedulian masyarakat nganjuk dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global melalui perbaikan lingkungan di wilayah kabupaten Nganjuk. Penanaman tanaman kayu-kayuan dan tanaman produktif lainnya memiliki beberapa fungsi yaitu

menyerap karbondioksida diudara, konservasi Tanah dan air, pencegahan longsor dan peningkatan jumlah penutupan lahan oleh tanaman.

Pelaksanaan dari kegiatan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon Menuju Nganjuk Ijo Royo-royo ini kemudian di desentralisasikan ke tingkat kecamatan yang di koordinir oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah pada tingkat Desa atau kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, Desa Jambi membuat suatu program sebagai bagian dari pelaksanaan Program Ijo Royo-royo yaitu Program Hutan Desa secara tujuan, hakikat, maupun manfaat program Hutan desa adalah sama dengan Ijo Royo-royo, karena program Hutan desa ini adalah bagian dari program tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Jambi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa bahwa.

”Dengan telah dicanangkannya Program Ijo Royo-royo oleh pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, maka untuk menindaklanjuti dan melaksanakan program tersebut serta untuk melindungi dan melestarikannya, maka pemerintahan desa Jambi perlu membuat peraturan desa sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program tersebut”.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Perangkat Desa Jambi yang bertanggung Jawab terhadap program ini, yang menyatakan bahwa:

”Program hutan desa ini dasarnya adalah berawal dari program ijo royo-royo yang ada di kabupaten dan gerakan menanam sejuta pohon yang di canangkan ditingkat pusat, desa jambi melaksanakan program tersebut dengan nama Penghijauan desa atau masyarakat sering menyebutnya Hutan desa”.

(Sumber: Wawancara, 5 Maret 2013 pukul 09.00 Wib)

Dengan demikian cukup jelas bahwa program Hutan desa adalah gagasan yang bersumber dari program Ijo royo royo. Dan pelaksanaannya

sendiri adalah adanya bantuan distribusi tanaman dari pemerintah kabupaten, kemudian di amanahkan ke Kecamatan dan terakhir diteruskan ke desa-desa melalui kepala desa. Adapun jumlah tanaman dan nama tanaman yang didistribusikan adalah sebagai berikut:

TABEL 6
DISTRIBUSI TANAMAN KE DESA-DESA DI KECAMATAN BARON

NAMA TANAMAN	JUMLAH (BATANG)
1.Glodokan Tiang	250
2.Ketapang	50
3.Jati	2500
4.Mahoni	4000
5.Nyamplung	330
6.Wuni	125
7.Melinjo	250
8. Sukun	250
Jumlah	7755

Sumber: Kecamatan Baron 2010

Setelah pendistribusian tanaman sampai kepada Kepala Desa, maka Kepala Desa, langsung akan mendistribusikannya kepada masyarakat, bibit tanaman yang akan dihasilkan, rencananya akan ditanam dilahan-lahan kosong, termasuk pada lahan bengkok, tanah kas desa, halaman sekolah, pekarangan dan turus jalan dusun, jalan desa dan kecamatan. Semua tanaman yang didistribusikan ke desa Jambi untuk masyarakat semuanya tertanam karena antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk mensukseskan program ini.

Adapun perawatan serta penjagaan dari pelaksanaan program Hutan desa ini tanggung jawabnya adalah oleh seluruh warga masyarakat Desa jambi, namun aparaturnya Desa sebagai wakil dari pihak kecamatan

tetap memberikan pengawasa kelapangan secara berkala hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perangkat desa Jambi, bahwa:

“ Perawatan bibit tanaman sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga, baik itu yang ada dipekarangan mereka maupun yang ada di pinggir jalan sekitar rumah mereka. Namun disini perangkat desa melalui perwakilannya yang telah ditunjuk oleh kepala desa tetap memberikan pengawasan, agar tanaman dapat ditumbuh kembangkan dengan baik oleh masyarakat”.

(sumber: Wawancara, 7 Maret 2013 Pukul 10.00 Wib)

Untuk memperlancar dan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat tentunya juga agar tanaman terawat dengan baik, maka juga dibentuk suatu sanksi sebagai jembatan untuk memaksimalkan keberhasilan program tersebut. Adapun sanksinya sudah dikemas didalam peraturan desa (perdes) Jambi sebagaimana disebutkan didalam pasal 2 ayat 1,2 dan 3 yang menyatakan bahwa:

1. Apabila terdapat orang yang merusak/mencabut/membunuh/memotong tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan dikenakan sanksi.
2. Adapun sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) Pohon dikenakan sanksi menanam 100 (seratus) pohon.
3. Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersedia/menolak sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diproses sesuai hukum yang lebih tinggi”. (Sumber: Peraturan Desa nomor 04 tahun 2008)

Diharapkan dengan mekanisme berupa sanksi jalannya program akan menjadi lebih baik, karena memang hakikat dari program ini nantinya juga untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar dan untuk kehidupan mereka yang lebih baik dikemudian hari. Karena memang selain memiliki manfaat untuk penghijauan guna mengatasi dampak dari pemanasan global, membuat udara menjadi semakin sejuk, program ini juga memiliki

manfaat untuk nilai tambah penghasilan karena tanaman yang ditanam adalah berupa tanaman yang produktif.

Hal ini merupakan suatu strategi dari Desa Jambi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk semakin mencintai lingkungan dan peduli terhadap alam sekitar. Senada dengan apa yang dikatakan oleh perangkat desa jambi yang mengurus program ini, yang mengatakan bahwa.

“Bibit Tanaman yang di tanam adalah tanaman yang produktif, selain dari yang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui kecamatan, yaitu bibit pohon Glodokan tiang, Ketapang, Jati, Mahoni, Nyamplung, Wuni, dan Melinjo di Desa Jambi sendiri ada Nangka, Mangga, dan Sawo Hijau serta Jambu tanaman tersebut tidak ditanam di pinggir jalan, namun dipekarangan warga serta di belakang tanah dari Desa”.

(Sumber: Wawancara, 7 Maret 2013 pukul 11.00 Wib)

Pohon-pohon yang produktif tadi tentu memiliki manfaat ganda selain untuk tujuan utama yaitu pelestarian lingkungan dan penghijauan, manfaat yang lain secara jangka panjang adalah untuk meningkatkan nilai tambah penghasilan. Dengan mekanisme pohon yang ditanam dipinggir jalan serta di pekarangan rumah warga adalah milik warga tersebut sendiri, dan nantinya bisa dimanfaatkan mereka, dinikmati mereka dan dirasakan manfaatnya oleh mereka. Sementara tanaman yang ditanam di Lahan milik desa akan dimanfaatkan untuk kepentingan desa artinya masuk ke kas desa. hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perangkat Desa Jambi.

“Pemanfaatan tanaman nantinya, bila tanaman tersebut di tanam di Lahan milik warga tentu ini menjadi hak mereka, sementara Desa hanya memetik manfaat dari tanaman yang tertanam di lahan desa sendiri itu mekanismenya”.

(Sumber: Wawancara, Jum'at 8 Maret 2013 Pukul 08.15 Wib)

Sementara untuk perawatan tanaman baik itu yang ada di lahan desa maupun yang ada di pinggir jalan pengecualian yang ada di pekarangan warga (ditanggung warga sendiri) mendapat monitoring dan bantuan berupa pupuk dari desa yang dananya diambil dari APBD pos anggaran tidak terduga, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perangkat desa, bahwa.

“Perawatan tanaman khususnya untuk pemupukan mendapat dana subsidi dari pemerintahan Desa, dana tersebut kita ambil dari pos anggaran tidak terduga dari APBD, karena selama ini bantuan perawatan dari pemerintah daerah belum turun dan untuk mengantisipasi serta tetap menjaga kesuburan tanaman desa mengambil kebijakan seperti itu agar masyarakat juga tahu, dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk mereka juga”.

(Sumber: Wawancara, Jum'at 8 Maret 2013 Pukul 09.00 Wib)

Selain itu program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, rasa sosial masyarakat untuk selalu bersama-sama, bergotong-royong dan membina nilai-nilai sosial yang ada. Karena bentuk dari program pelestarian dan penghijauan ini dilaksanakan dengan cara bergotong-royong, secara serentak oleh masyarakat desa, artinya semua stakeholder yang ada di desa semuanya serempak ikut program ini, melaksanakan program ini bersama-sama.

Karena memang program tersebut adalah suatu program yang sifatnya partisipatif seluruh anggota masyarakat wajib mengikuti untuk menciptakan kondisi mikro yang kondusif sehingga dapat mengantisipasi

gejala-gejala yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang selama ini dirasakan bersama-sama.

(Sumber: Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kepada kader Ijo Royo-royo Tahun 2010).

Di Desa Jambi partisipasi warga di dalam mensukseskan program hutan desa ini secara bersama-sama, mereka membentuk kelompok tani amanah, yang anggotanya adalah seluruh warga jambi sehingga pelaksanaan program ini akan lebih terorganisir dengan rapi dan lancar. Kelompok tani amanah ini bergerak untuk mengorganisir warga agar pelaksanaan hutan desa di Desa Jambi ini ada suatu kelanjutan, artinya tidak hanya saat penanaman saja masyarakat berkumpul untuk bergotongroyong peduli terhadap lingkungan, tetapi juga saat perawatan, pengawasan juga tetap dilaksanakan secara bersama-sama agar lingkungan mereka terjaga untuk jangka panjang. Secara nyata tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tani amanah ini selain dari meningkatkan partisipasi warga secara *kontinu* untuk selalu bergotong royong, tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan keberhasilan kegiatan program hutan desa ini adalah untuk:

- a) Tersedianya bibit berkualitas berbasis pemberdayaan masyarakat.
- b) Sebagai sarana untuk mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi lahan.
- c) Sebagai tempat pemberian pengetahuan dan keterampilan mengenai pembuatan persemaian, penanaman dengan menggunakan benih/bibit yang berkualitas. (Sumber: *Proposal Kebun Bibit Rakyat (KBR)*).

Jadi cukup jelas bahwa program hutan desa di Jambi ini, selain berfungsi untuk penghijauan, sebagai peningkat nilai tambah ekonomi untuk masyarakat, juga berfungsi untuk meningkatkan rasa sosial warga masyarakat untuk selalu bergotong-royong dan peduli terhadap alam sekitar dan dunia sekitar. Hal senada juga diungkapkan oleh perangkat desa Jambi, bahwa.

“Program hutan desa ini selain untuk penghijauan dan jangka panjangnya untuk menambah nilai ekonomi masyarakat, juga diharapkan sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk semakin sering atau *intens* berkumpul dan bersosialisasi kepada warga lain agar tumbuh kepedulian sosial yang tinggi, antara warga yang satu dengan yang lainnya”.

(Sumber: Wawancara, Jum'at 8 Maret 2013 Pukul 10.00 Wib)

Secara mekanisme Proses program hutan desa ini adalah berawal dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia yang merupakan bagian dari gerakan menyelamatkan bumi dengan penanaman Satu miliar pohon (*One Million Tree*), yang kemudian di dekonsentrasikan ke Provinsi melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur untuk penyelamatan Bumi. Setelah itu diikuti oleh Kabupaten, di Nganjuk sendiri pedoman itu berdasarkan Surat Edaran tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon Menuju Nganjuk Ijo Royo-royo. Dan ditransformasikan ke Kecamatan dan Desa-desanya, dari pedoman tersebut Desa Jambi mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 04 Tahun 2008 untuk melaksanakan dan menindaklanjuti program dari pusat dan daerah tersebut, maka lahirlah Program hutan desa

sebagai bagian dari program penghijauan atau ijo-Royo-royo tersebut. Pelaksanaanya di Desa Jambi sendiri selain dikoordinir oleh aparat desa setempat, masyarakat Desa Jambi juga secara kreatif membentuk “Kelompok Tani Amanah” sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi dan rasa gotong-royong masyarakat setempat sehingga program hutan Desa dapat dipahami serta dilaksanakan secara *massif* oleh semua stakeholder.

a) Proses Penyusunan dalam menyelenggarakan Program hutan desa di Desa Jambi untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Menindaklanjuti surat edaran tentang gerakan menanam dan memelihara pohon menuju nganjuk ijo royo-royo dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, kemudian disampaikan ke Kecamatan Baron melalui kepala seksi di bidang pemberdayaan masyarakat, melalui bidang inilah selanjutnya dibuat instruksi yang ditujukan ke Desa-Desa untuk melakukan gerakan penanaman pohon untuk mensukseskan gerakan nganjuk ijo royo-royo. Hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh salah satu pegawai di Kecamatan Baron, yang mengatakan bahwa:

“Setiap program dari Kabupaten Nganjuk yang ditujukan untuk Desa-Desa selalu lewat kecamatan, dan untuk program ini kecamatan hanya sebagai fasilitator yang selanjutnya untuk masalah teknis dan pelaksanaan serta perawatan maupun pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Desa, yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa”

(Sumber: Wawancara, Senin 11 Maret 2013 Pukul 08.30 Wib)

Dalam rangka pelaksanaan setiap Desa memiliki Kader Ijo Royo-royo masing-masing, yang selanjutnya mereka membuat suatu agenda didalam kegiatan Penanaman pohon tersebut, di Desa Jambi Kader Ijo Royo-royo yang dikoordinasi oleh Kepala Desa (Kades) menamakan gerakan penanaman pohon mereka, yaitu Program Hutan Desa, sebagai bagian dari Kader Ijo Royo-royo.

Lewat Kepala Desa inilah selanjutnya dikoordinasikan kepada semua pejabat Desa atau aparat Desa untuk membuat suatu agenda kegiatan bersama-sama masyarakat, serta membuat suatu legalisasi kegiatan tersebut (Membuat Peraturan Desa (Perdes) serta membuat proposal kegiatan dari Penanaman pohon tersebut, guna mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, karena bila tidak membuat agenda kegiatan berupa proposal dan Peraturan Desa yang berkaitan dengan hal tersebut maka bibit bantuan untuk tanaman tidak akan turun dari pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu perangkat Desa Jambi yang menangani program ini, dikatakan bahwa.

“Untuk pengajuan bibit tanaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, Desa harus membuat proposal kegiatan, serta peraturan Desa sebagai legalitas kegiatan dan bukti konkrit telah dilaksanakannya suatu kegiatan sebagai bagian dari syarat untuk mendapat bantuan bibit tanaman dari yang sudah didapatkan yaitu 7.505 batang pohon yang dari bantuan Kabupaten melalui kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan ini secara keberlanjutan tentu diperlukan bibit tanaman lagi, maka dari pada itu Desa Jambi membuat proposal dan Peraturan Desa (*Perdes*) untuk mendapat bibit tanaman yang lebih banyak dari kabupaten”.

(*Sumber: Wawancara, Senin 11 Maret 2013 Pukul 10.00 Wib*)

Dengan dibuatnya Proposal serta Perdes inilah kemudian Desa Jambi mendapatkan bantuan berupa bibit pohon sebanyak 25.000 pohon pada tahun 2008 serta 25.000 pada tahun 2011 bibit pohon, bantuan dari kabupaten Nganjuk ini tidak hanya berupa tanaman Kayu-kayuan saja tetapi juga tanamanan dari jenis buah-buahan seperti Mangga, Nangka dan Sukun, serta Mlinjo. Hal tersebut selain untuk mendukung penghijauan juga akan mendukung peningkatan nilai ekonomi masyarakat.

Peraturan Desa (Perdes) dan Hutan Desa, di Desa Jambi ini juga menjadi percontohan bagi desa lainnya, untuk meniru serta mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Desa Jambi untuk melakukan kegiatan serupa sebagai langkah nyata mendukung pelestarian lingkungan, yang tidak sebatas serentak pada saat kegiatan Ijo Royo-royo saja, namun secara *kontinou* melakukan gerakan dengan program yang mandiri. Ini didasarkan dengan apa yang disampaikan oleh aparat Desa Jambi, yang mengatakan,

“ Peraturan Desa (Perdes) serta proposal kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan di Desa Jambi ini, dijadikan contoh untuk Desa Garu, Gebangkerep, Mabung serta Katerban. Tentu untuk kegiatan serupa sebagai penunjang Gerakan Ijo Royo-royo, namun pelaksanaannya dari mereka kami kurang tahu”.

(Sumber: Wawancara, Selasa 12 Maret 2013 Pukul 09.00 Wib)

Penyusunan pembuatan proposal kegiatan serta Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan desa sendiri didesa Jambi, melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Jambi baik itu masyarakat umum, Aparatur Desa, maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Ketua RT/RW, Rapat

Pembahasan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa pada 11 Maret 2008 memutuskan bahwa.

TABEL 7
RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA (PERDES) DESA JAMBI

NO	NAMA	JABATAN
1	Abdulloh Munahin, S.Ag	Ketua
2	Munir	Wakil Ketua
3	Durianto	Sekretaris
4	Ali Sabit	Anggota
5	Suparman	Anggota
6	Mulyono	Anggota
7	Moch. Bashori, S.Ag	Anggota

Sumber: Peraturan Desa Jambi (Perdes) 2008

Dengan Peraturan Desa (Perdes) tersebutlah Desa Jambi mampu melaksanakan Program Hutan Desa dengan baik, karena di dalam peraturan tersebut memuat beberapa aspek antara lain aspek latarbelakang yaitu program ini adalah bagian dari tindak lanjut dari Program Ijo Royo-royo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, serta untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Aspek pelaksanaan bahwa Program Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa ini dilaksanakan dengan penanaman pohon yang terletak di Tanah Kas Desa dan sepanjang tepi Jalan Poros Desa dan Poros Dusun yang masih dalam kawasan wilayah Desa Jambi, Penanaman Pohon diikuti dengan penjagaan dan perawatan yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Desa Jambi. Kemudian

aspek sanksi, yang intinya bahwa apabila terdapat seseorang yang merusak atau mencabut serta memotong tanaman dengan sengaja maka akan dikenakan sanksi menanam 100 (seratus) pohon.

Selanjutnya setelah menyusun Peraturan Desa (Perdes), Desa Jambi menyusun Proposal kegiatan untuk meng-agendakan kegiatan yang lebih terstruktur baik secara Bentuk Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Anggaran Kegiatan, Sumber Pembiayaan, Pelaksanaan Kegiatan serta Penyebaran Bibit Tanaman, proposal kegiatan ini disusun oleh Kelompok Tani Amanah yang anggotanya adalah seluruh warga Desa Jambi, yang tujuannya adalah untuk keberlanjutan program Hutan Desa ini secara lebih sistematis dan untuk jangka waktu panjang untuk mempercepat reboisasi dan terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta agar masyarakat juga lebih berpartisipasi secara aktif, tumbuh rasa gotong royong yang tinggi, serta menjaga solidaritas sosial agar semakin meningkat.

Adapun susunan kepengurusan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 8

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KEGIATAN PROGRAM HUTAN DESA
MELALUI ORGANISASI TANI AMANAH**

NO	NAMA	JABATAN
1	Subroto	Ketua
2	Agus Edy Tiono	Sekretaris
3	Adi Atmoko	Bendahara

NO	NAMA	JABATAN
4	Siti Kholifatin	Anggota
5	Zakaria	Anggota
6	Waras	Anggota
7	Kasmiran	Anggota
8	Suwito	Anggota
9	Sucipto	Anggota
10	Sukarmin	Anggota
11	Amrul Anam	Anggota
12	Sumarno	Anggota
13	Didik Sujarwo	Anggota
14	Darianto	Anggota
15	Imam Supardi	Anggota
16	Kadir	Anggota
17	Suparto	Anggota
18	Ilham Kurniawan	Anggota

Sumber: Proposal Tani Amanah 2011.

Peraturan Desa (Perdes) serta Proposal kegiatan tersebut yang telah dibuat adalah bagian untuk mendapatkan bantuan bibit tanaman dari Pemerintah Daerah Nganjuk, dan terbukti dalam dua tahapan pemberian bibit tanaman Desa Jambi, memperoleh 2 (Dua) kali yaitu di Tahun 2008 dan tahun 2011 yang masing-masing mendapatkan bantuan 25.000 Batang pohon. Dan semuanya diterima oleh warga dan tertanam secara keseluruhan di Pekarangan, di Tepi Jalan, di Tanah Desa dan Lahan-lahan kosong milik desa. hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh aparat desa setempat, yang menyatakan bahwa.

“ Dengan Pembuatan Peraturan desa serta Proposal kegiatan Desa Jambi mendapatkan 2 (Dua) kali bantuan bibit tanaman dari pemerintah daerah, yang masing-masing sebanyak 25.000 bibit tanaman pada periode tahun 2008 dan 2011, semua tanaman dapat didistribusikan ke semua warga untuk di tanam secara bergotong royong di tempat-tempat yang telah ditetapkan, yaitu dipinggir jalan, di pekarangan maupun di Belakang balai Desa, serta tanah desa dan dilahan-lahan kosong milik desa”.

(Sumber: Wawancara, 20 Maret 2013 Pukul 09.00 Wib).

Semua masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena pada prinsipnya program ini dilakukan secara menyeluruh tidak saja diperuntukkan untuk kalangan bawah, kalangan atas di Desa juga wajib berpartisipasi untuk menciptakan stabilitas dan kelestarian lingkungan serta untuk kemanfaatan mereka sendiri dari tanaman-tanaman yang telah mereka tanam untuk di petik manfaatnya dimasa yang akan datang. Karena ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu menciptakan keberlanjutan, keterpenuhan baik secara lingkungan, sosial maupun ekonomi, tidak hanya untuk saat ini

tetapi juga untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu dan generasi penerus.

b) Sumber Daya dalam Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program tentu kesuksesan akan ditunjang dari sumber daya, karena sumber daya adalah sebagai alat teknis maupun nonteknis didalam melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan akan berjalan sesuai arah, rencana, waktu dan biaya. Karena sumber daya adalah pedoman untuk kelancaran dan berjalanya suatu kegiatan.

Adapun sumber daya, memiliki beberapa dimensi antara lain, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Kesemua sumber daya tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil maupun gagalnya suatu program kegiatan. Karena setiap elemen memiliki fungsi masing-masing yang saling berpengaruh untuk menunjang dari pada kelancaran suatu kegiatan.

Program hutan desa di Jambi ini, juga demikian artinya memiliki elemen berupa sumber daya (Manusia, Anggaran dan Peralatan) sebagai motor penggerak di dalam berjalannya suatu program sesuai dengan yang diharapkan.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal didalam suatu kegiatan atau program yang fungsinya adalah menggerakkan jalannya rencana yang telah ditetapkan, dalam hal ini sumber daya manusia yang berperan di

dalam menjalankan, merencanakan, maupun mensukseskan program hutan desa di Jambi adalah seluruh masyarakat Jambi, mulai dari perangkat desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM (Lembaga Pemberdayaan Perempuan), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat.

(Sumber: Peraturan Desa Jambi Nomor 04 Tahun 2008, Tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa) .

Namun tentunya untuk lebih mengorganisir masa dibutuhkan suatu kepengurusan, agar ada yang mengatur dan menjalankan, ada yang bertindak secara teknis serta ada yang bertindak secara non teknis namun prinsipnya semua bekerja bersama-sama dalam suasana kegotongroyongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun susunan kepengurusan untuk mengatur jalannya kegiatan program penghijauan dan pelestarian lingkungan melalui program hutan desa tersebut dapat dilihat pada tabel 8 diatas. Adapun tanggung jawab tertingginya yaitu berada di Kepala Desa.

2) Sumber Daya Anggaran

Anggaran juga merupakan elemen penting lainnya selain sumber daya manusia, karena tanpa anggaran bisa jadi kegiatan akan menjadi vakum. Karena anggaran memiliki fungsi sebagai operasionalisasi kegiatan, dalam arti untuk menghidupi suatu kegiatan. Program hutan desa ini juga tidak bisa dilepaskan dari suatu sumber daya anggaran, untuk membiayai jalannya acara, untuk membiayai perawatan tanaman, semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya anggaran ataupun biaya.

Karena Desa Jambi melaksanakan kegiatan ini dalam dua periode, adapun dalam periode kedua berasal dari bantuan dari Pemerintah daerah melalui Direktorat jenderal RLPS (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia).
(Sumber: *Proposal Kebun bibit rakyat tahun 2011*).

Sementara untuk periode pertama biaya perawatan tanaman diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perangkat desa jambi, yang menyatakan

“Sebenarnya anggaran untuk perawatan tanaman atau untuk menumbuh kembangkan tanaman ada biaya dari pemerintah daerah Nganjuk namun sampai saat ini belum turun, maka desa mensiasatinya dengan mengambil dari APBD pos anggaran tidak terduga”.
(Sumber: *Wawancara, 22 Maret 2013 Pukul 09.30 Wib*).

Jadi dalam dua periode kegiatan program hutan desa di Desa Jambi, anggaran pertama berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBD) pos anggaran tidak terduga serta kegiatan periode kedua dilaksanakan dengan bantuan Direktorat jenderal RLPS (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia).

3) Sumber Daya Peralatan

Aspek berikutnya sebagai bagian untuk menunjang jalannya kegiatan adalah melalui kelengkapan berupa sumber daya peralatan, peralatan diperlukan sebagai bantuan untuk mengerjakan sesuatu secara lebih rinci, cepat dan tepat dan tentunya untuk lebih mempermudah. Adapun peralatan dalam hal ini yang digunakan didalam pelaksanaan

Program hutan desa di Desa Jambi adalah berupa peralatan teknis untuk menunjang keberhasilan program yang bisa digunakan untuk jangka waktu lama, yaitu berupa cangkul, Sabit, Ayakan, Gayung, Gembor, Selang, Hand Sprayer, Gerobak dorong, pompa air dan instalasi pengairan.. Sumber daya peralatan tersebut digunakan untuk mempermudah kinerja dari sumber daya manusia dan penunjang sumber daya anggaran. (Sumber: *Proposal Pembuatan Kebun Bibit Rakyat, (KBR)*).

b. Pelaksanaan Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Pelaksanaan dari Program hutan desa ini dimulai dari pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa, yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 8 maret 2008, yang kemudian disetujui pada tanggal 11 Maret 2008 kemudian pelaksanaannya sendiri yaitu pada tanggal 27 Mei 2008, dengan diikuti oleh seluruh masyarakat desa di seluruh kecamatan Baron. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu perangkat desa setempat yang menginformasikan bahwa.

“ Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa ini, dimulai dari agenda penyusunan Peraturan desa (*Perdes*) pada tanggal 8 Maret 2008, setelah terbentuk aturan, susunan kepengurusan, dan penanggung jawab, kemudian kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan Baron pada tanggal 27 Mei 2008”.
(Sumber: *Wawancara, Selasa 26 Maret Pukul 08.10 Wib*).

Seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penanaman ini, mulai dari pekarangan rumah mereka, di pinggir jalan sampai ke Lahan desa yang masih kosong, tanaman yang ditanam antara lain, Jati, Gmelina, Jabon, Mahoni, Nangka, Mangga, Pepaya, Jambu.

Penanaman ini diawasi secara langsung oleh kepala desa jambi selaku ketua kader Ijo Royo royo serta dipandu lewat pengawasan dari pihak kecamatan yang diwakili oleh perwakilan dari Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perangkat desa jambi bahwa.

“Pelaksanaan dari program ini berjalan lancar, dan antusias warga sangat tinggi, mereka saling bergotong-royong menanam pohon disekitar rumah mereka, dipinggir jalan dan di lahan Desa yang masih kosong, adapun dalam pelaksanaan ini langsung dibawah kendali Bapak Kepala Desa (Kades) serta mendapat *monitoring* dari pihak kecamatan yang diwakili dari perwakilan Kasi (Kepala Seksi) Pemberdayaan Masyarakat”.

(Sumber: Wawancara, Selasa 26 Maret Pukul 08.15 Wib).

Setelah hari pelaksanaan kegiatan, tentu program ini tidak berhenti sampai di situ saja, namun masih ada perawatan, serta upaya menumbuh kembangkan tanaman tersebut, karena tanaman yang di tanam tersebut tidak hanya sebatas untuk penghijauan, tidak hanya tanaman dari kayu-kayuan saja, melainkan tanaman yang produktif, yaitu dari jenis buah-buahan seperti yang telah disebutkan diatas ini adalah suatu strategi tersendiri agar rasa memiliki warga menjadi lebih besar sehingga timbul niat untuk memelihara.

Menumbuh kembangkan tanaman-tanaman tersebut nantinya akan memiliki suatu dampak positif karena selain desa menjadi lebih hijau, produktifitas tanaman dapat mereka manfaatkan sendiri untuk kehidupan mereka, karena mekanisme pembagiannya juga sudah disepakati bahwa tanaman yang selain ditanam ditanah milik Desa adalah hak milik

masyarakat untuk dimanfaatkan secara pribadi. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat dari Aparat desa setempat yang mengatakan bahwa.

“Tanaman tersebut harus dirawat dengan baik, agar tumbuh dan berkembang, karena ini akan membawa manfaat untuk mereka sendiri nantinya, untuk penghijauan desa mereka, untuk nilai tambah ekonomi mereka serta untuk generasi mereka yang akan datang, secara pembagian hasil sudah disepakati bahwa selain yang ditanam di tanah desa adalah sepenuhnya hak warga masyarakat Desa sendiri”

(Sumber: Wawancara, Selasa 26 Maret 2013 Pukul 10.30 Wib)

Dalam pelaksanaannya baik itu dari segi manfaat ataupun keuntungan akan didapatkan tiga aspek nantinya sesuai dengan tujuan program ini, yaitu aspek sosial berupa gotong-royong, aspek ekonomi berupa peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan tanaman yang mereka tumbuh kembangkan, baik itu dari buahnya ataupun kayu-kayuannya, serta aspek lingkungan, yaitu kelestarian lingkungan akan semakin terjaga dengan semakin hijaunya lahan desa yang dipenuhi dengan pepohonan. Fakta ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh aparat desa setempat terkait manfaat jangka pendek dan panjang dari program yang dilaksanakan ini, bahwa:

“Tentu program ini akan memiliki manfaat yang sangat berguna untuk masyarakat tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang, baik itu menyangkut ekonomi, maupun lingkungan serta sosial masyarakat, sehingga selain tujuan penghijauan sendiri dalam jangka pendek akan tercipta dalam jangka panjang ekonomi masyarakat juga akan ada penambahan dari sektor program ini”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 28 Maret 2013 Pukul 10.00 Wib)

Dengan aspek jangka panjang serta aspek jangka pendek tersebut, yang berupa aspek ekonomi, sosial serta lingkungan maka akan tercipta

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dari pelaksanaan program hutan desa tersebut yang dilaksanakan di Desa Jambi Kecamatan Baron.

a) Komunikasi antar semua elemen yang terlibat didalam pelaksanaan program hutan desa.

Di dalam suatu organisasi, salah satu elemen yang menjadi faktor kunci di dalam keberhasilan organisasi tersebut adalah adanya komunikasi antar semua anggota di dalam struktur organisasi tersebut. Baik itu di level atas (*top*) maupun di level bawah (*bottom*), kedua elemen tersebut harus mampu saling berinteraksi baik secara koordinatif maupun secara instruktif di dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk menunjang keberhasilan dari organisasi tersebut.

Interaksi baik secara koordinatif maupun secara instruktif harus ditunjang oleh adanya komunikasi, karena komunikasi sangat berguna agar semua anggota yang ada di organisasi mampu mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangannya di dalam suatu organisasi. komunikasi artinya menjadi sangat penting, tetapi tidak hanya dalam konteks organisasi saja, di dalam suatu implementasi kebijakan ataupun program komunikasi serta sosialisasi juga sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan program kegiatan tersebut menjadi suatu keberhasilan baik secara waktu, tujuan maupun anggaran.

Tentunya di dalam pelaksanaan Program Hutan Desa ini juga terdapat komunikasi dari para *stakeholder* yang terlibat di dalam program kegiatan tersebut, adapun tujuan dari komunikasi ini adalah bermanfaat untuk menjalankan program ini secara terstruktur dari tingkat koordinasi atas sampai tingkat koordinasi kebawah untuk kemudian nantinya dapat sampai kepada masyarakat.

Dalam program ini komunikasi dimulai ataupun diawali dari surat edaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk nomer: 522.4/691/411.302/2010, yang disampaikan kepada semua instansi yang ada di Kabupaten Nganjuk baik itu bagi lembaga pemerintah, non pemerintah maupun untuk seluruh masyarakat kabupaten Nganjuk mengenai Usulan Kader Ijo Royo-royo sebagai bagian dari pelaksanaan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon menuju Nganjuk Ijo Royo-royo. Adapun Surat Edaran Bupati Nganjuk adalah sebagai berikut,

TABEL 9

SURAT EDARAN BUPATI NGANJUK MENGENAI PANDUAN BAGI LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI DALAM PELAKSANAAN GERAKAN MENANAM dan MEMELIHARA POHON MENUJU NGANJUK IJO ROYO-ROYO

NO	INSTANSI
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten

NO	INSTANSI
	Nganjuk
4	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk
6	Kepala Badan dan Inspektorat se-Kabupaten Nganjuk
7	Kepala Dinas se-Kabupaten Nganjuk
8	Kepala Kantor dan Satuan se-Kabupaten Nganjuk
9	Camat se-Kabupaten Nganjuk
10	Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Nganjuk
11	Kepala Rumah Sakit Daerah Nganjuk
12	Kepala Rumah Sakit Daerah Kertosono
13	Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk
14	Kepala Kepolisian Resort Nganjuk
15	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk
16	Administratur Perum. Perhutani KPH Nganjuk
17	Administratur Perum. Perhutani KPH Jombang
18	Administratur Perum. Perhutani KPH Kediri
19	Administratur Perum. Perhutani Saradan
20	Direktur Utama BUMN, BUMD, BUMS dan Per Bankan se-Kabupaten Nganjuk.
21	Kepala Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk
22	Rektor Perguruan Tinggi se-Kabupaten Nganjuk
23	Kepala SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, Pondok Pesantren se-

NO	INSTANSI
	Kabupaten Nganjuk
24	Ketua LSM dan Ormas se-Kabupaten Nganjuk

Sumber: Surat Edaran Bupati Nganjuk, Nomor 522.4/691/411.302/2010

Surat edaran tersebut adalah bagian dari komunikasi dari Pemerintahan di level atas untuk di teruskan dan dilaksanakan di level bawah serta dilanjutkan kepada masyarakat. Untuk program Hutan Desa ini, komunikasi terlebih dahulu diawali dari kecamatan kemudian diteruskan kepada Desa melalui kepala desa, hal ini juga dikatakan oleh salah satu aparatur di kecamatan Baron.

“Komunikasi dari suatu program yang ada di kabupaten yang itu berkepentingan untuk keterlibatan masyarakat, selalu melewati kecamatan terlebih dahulu baru kemudian di sampaikan ke Desa biasanya melalui Kepala Desa, untuk selanjutnya setelah sampai ke desa program tersebut dapat dilaksanakan di Desa tanpa keterlibatan Kecamatan, kecamatan hanya mempunyai hak untuk fasilitator dan *monitoring* saja, untuk hak dan kewenangan, serta pengelolaan dari program tersebut sepenuhnya hak dari desa”.

(Sumber: Wawancara, Senin 1 April 2013 Pukul 08.45 Wib)

Di desa Jambi, program yang dari Kabupaten Nganjuk bernama Ijo Royo-royo, kemudian di implementasikan menjadi program Hutan desa, hal tersebut berdasarkan apa yang telah disepakati semua warga dan perangkat desa di Desa Jambi, dengan dikuatkan adanya Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2008. Hal tersebut juga di dasarkan atas wawancara dari aparatur Desa setempat yang mengatakan bahwa.

“ Program hutan desa ini adalah wujud dari implementasi program Ijo Royo-royo yang di canangkan oleh Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, hal ini dikarenakan agar masyarakat semakin memahami makna dari Ijo royo-royo tersebut, tidak sekedar membuat daerah, lahan mereka menjadi hijau saja, tetapi

mereka juga ada rasa memiliki untuk merawat serta melestarikan dari apa yang mereka tanam tersebut. Karena itu lewat program Hutan Desa ini, masyarakat diharapkan mampu serta dapat memperoleh manfaat yang banyak tidak hanya untuk menciptakan kelestarian lingkungan saja, tetapi ada rasa memiliki juga untuk merawat, memelihara dan menumbuhkembangkan tanaman tersebut untuk kepentingan Desa, serata kepentingan mereka sendiri untuk masa yang akan datang”.

(Sumber: Wawancara, 1 April 2013 Pukul 10.30 Wib)

Untuk sosialisasi dari pelaksanaan Program ini, kepala desa sebelumnya mengumpulkan seluruh aparatur desa atau pegawai yang ada di Kantor Desa untuk membuat suatu koordinasi melalui struktur organisasi untuk melaksanakan program ini kepada masyarakat. Struktur organisasi tersebut bisa kita lihat pada tabel 8 diatas, sebagai bentuk bagian untuk merpertanggung jawabkan keberhasilan serta pengawasan jalanya program tersebut kepada masyarakat.

Komunikasi menjadi sangat penting untuk secara detail merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi jalannya program kegiatan tersebut agar lebih mudah di kendalikan untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik. Hal ini juga dikuatkan dari wawancara dengan aparatur Desa Jambi yang mengatakan bahwa.

“Pelaksanaan program Hutan Desa ini, secara aspek pelaksanaan sangat membutuhkan adanya komunikasi dari level atas (Pemerintah) untuk dikoordinasikan dilevel bawah, karena hal itu adalah sebuah kunci untuk membawa atau mengarahkan kepada tujuan program tersebut kepada masyarakat”.

(Sumber: Wawancara, Selasa 2 April 2013 Pukul 09.30 Wib)

Jadi koordinasi melalui komunikasi memainkan peranan yang sangat penting di dalam kesuksesan program ini khususnya di dalam upaya

untuk mengarahkan kepada masyarakat akan pentingnya dari Penanaman Hutan Desa tersebut.

b) Sasaran pelaksanaan sebagai tujuan program hutan desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.

Pelaksanaan dari suatu program maupun kegiatan tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya sasaran serta tujuan, karena sasaran dan tujuan adalah salah satu indikator dari penilaian keberhasilan dari pelaksanaan program. Suatu program perlu memiliki sasaran serta tujuan karena program dibuat memang untuk menjadi suatu solusi ataupun pemecah masalah dari suatu objek masalah yang dituju untuk dijadikan sebagai bagian alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Begitu juga dalam pelaksanaan pohon Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron ini, sasaran pelaksanaan dari program ini adalah untuk seluruh warga masyarakat di Desa Jambi, Baik itu perangkat desa, Kepala Desa serta seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aparatur Desa setempat yang mengatakan:

“ Sasarannya dari program ini tentu adalah untuk seluruh masyarakat sendiri, tidak hanya untuk kepentingan desa dan keuntungan desa semata, namun menyeluruh dampaknya untuk masyarakat” .

(Sumber: Wawancara, 4 April 2013 Pukul 08.00 Wib).

Sasaran pelaksanaan oleh seluruh warga masyarakat tersebut juga dikuatkan dari peraturan desa (perdes) pasal 1 ayat 2 yang berbunyi,

Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penjagaan dan perawatannya dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Desa Jambi. Artinya jelas tanpa terkecuali sasaran pelaksanaan program ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Dari pelaksanaan tersebut tentu ada tujuan yang dicapai, dan dari program hutan desa ini tujuan yang dicapai adalah secara jangka pendek adalah untuk kelestarian lingkungan, menanggulangi terjadinya pemanasan global lewat penghijauan melalui penanaman ribuan pohon yang tertanam di pinggir jalan, Pekarangan warga, serta lahan Milik Desa.



Gambar 3: Tanaman yang ditanam di Pinggir Jalan, Pekarangan Warga, serta Lahan Milik Desa dari Program Hutan Desa di Desa Jambi

Sumber Dokumentasi Tanaman Program Pohon di Desa Jambi, Kamis 4 April 2013 Pukul 09.00 Wib.

Hal tersebut adalah diharapkan untuk mempercepat adanya penghijauan serta pelestarian lingkungan di Desa Jambi khususnya, dengan penanaman ribuan bibit pohon tersebut. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh aparat Desa setempat, yang mengatakan bahwa.

“Dengan penanaman tanaman tersebut baik yang ada dipinggir jalan, dilahan milik warga serta di Lahan Desa diharapkan secara jangka pendek untuk penghijauan serta kelestarian Lingkungan dapat tercapai”.

(Sumber: Wawancara, Rabu 10 April 2013 Pukul 10.00 Wib)

Secara jangka pendek pula, dari program ini akan didapat manfaat secara sosial, yaitu menumbuhkan rasa sosial tentunya dalam masyarakat, lewat kegiatan yang partisipatif tersebut, selain itu akan menumbuhkan penguatan rasa gotong royong antar semua warga, dengan begitu ikatan sosial yang ada dimasyarakat, untuk selalu memiliki jiwa sosial dan kebersamaan akan terjaga lewat program ini. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu aparatur desa setempat, yang mengatakan bahwa.

“Tidak hanya manfaat secara lingkungan yang di peroleh dari pelaksanaan program ini, secara sosial juga telah dipetik manfaatnya, karena dilapangan antusiasme masyarakat sangat tinggi akan program ini. Sehingga tumbuh rasa solidaritas serta kegotong-royongan ditengah-tengah masyarakat di Desa Jambi bisa dilihat dari tingginya partisipasi warga, solidaritas warga yang dibuktikan dari tingkat keikutsertaan masyarakat dari program ini dari tahun 2008-2011 yang semakin meningkat”.

(Sumber: Wawancara, Jum'at 12 April 2013 Pukul 09.00 Wib)

Selain itu dari Program ini tentu tidak hanya manfaat ataupun tujuan secara jangka pendek saja yang dapat dicapai, tujuan jangka panjang dari program ini juga diharapkan dapat terealisasi, selain dari segi manfaat secara lingkungan serta sosial dalam jangka pendek yang dapat terealisasi, manfaat serta tujuan jangka panjang yang akan terealisasikan adalah dari segi ekonomi. Segi ekonomi yang akan dicapai ini adalah lewat tanaman produktif yang ditanam baik itu tanaman dari kayu-kayuan seperti sengon, jati maupun mahoni, tentu dalam jangka waktu tertentu tanaman ini akan bernilai jual secara ekonomis baik itu untuk masyarakat

maupun untuk Desa. Serta tanaman dari buah-buahan seperti nangka maupun manga yang tentu juga pasti bernilai ekonomi.



Gambar 4: Salah satu Tanaman Kayu-kayuan dan Buah-buahan dari Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron

Sumber : Dokumentasi bersama Bapak Suparto (Pegawai Desa) 12 April 2013 Pukul 10.00 Wib di Lahan milik Desa.

Hasil tanaman tersebut sepenuhnya menjadi hak masyarakat, kecuali tanaman yang berada di wilayah lahan Desa, artinya hal tersebut adalah suatu strategi adanya penambahan nilai ekonomi masyarakat Desa Jambi. Hal tersebut juga dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu aparatur Desa Jambi (Kamituwo Ringin Kembar), yang mengatakan bahwa.

“Bisa dilihat manfaat untuk program penanaman pohon-pohon tersebut, selain memang yang paling utama adalah untuk penghijauan dan pelestarian lingkungan, tanaman seperti Jati, Mahoni, Sengon, Mangga maupun Nangka juga akan memberikan manfaat lain berupa nilai ekonomis yang di dapat, seperti kemarin penjualan pohon jati yang terletak di lahan Desa sebanyak 4 buah yang masing-masing di jual dengan harga Rp.500.000,00, artinya Desa sudah mendapat pemasukan untuk kas Desa sebanyak Rp.2 juta dan bila ini juga dilakukan warga dari tanaman yang mereka lestarikan dan tumbuh kembangkan tentu mereka juga akan mendapat pemasukan”.

(Sumber: Wawancara, Jum'at 19 April 2013 Pukul 10.00 Wib)

Manfaat secara ekonomi memang akan lebih lama dirasakan karena memang tanaman seperti Jati, Mahoni, maupun sengon memiliki masa tumbuh yang lama bisa antara 5-10 Tahun untuk bisa dipetik hasilnya, namun ini tentunya akan bermanfaat sebagai pembangunan berkelanjutan karena bisa di nikmati jangka panjangnya khususnya secara ekonomis. Hal tersebut juga sama seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Program Hutan Desa di Desa Jambi, kecamatan Baron, yang mengatakan bahwa.

“Masa tumbuh untuk Jati, Mahoni, dan Sengon tentu lama antara 5-10 Tahun untuk bisa bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan, namun hal ini tidak mengurangi manfaat dari program ini karena jangka pendek pelestarian lingkungan, penghijauan, serta dampak sosial telah dirasakan oleh masyarakat, program juga harus memiliki manfaat jangka panjang, dan nilai ekonomis inilah target jangka panjangnya”.

(Sumber: Wawancara, Senin 22 April 2013 Pukul 08.30 Wib).

Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat secara ekonomis dari program ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dirasakan oleh warga masyarakat, namun manfaat lain akan kelestarian lingkungan, penghijauan serta manfaat secara sosial akan tetap dapat dirasakan setidaknya dalam waktu yang lebih cepat dari manfaat secara ekonomis. Maka dari pada itu prinsip utama program Hutan Desa ini adalah adanya keberlanjutan, untuk ekonomi, untuk sosial serta untuk lingkungan.

c. **Dampak dari Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).**

a) **Secara Ekonomi**

Dari pemaparan diatas telah diuraikan bahwa manfaat dari Program hutan Desa adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu secara jangka pendek, serta dalam jangka panjang. Tujuan utama ialah untuk penghijauan serta untuk pelestarian lingkungan sebagai wujud untuk menyelamatkan bumi dari bahaya pemanasan global. Program ini adalah sebagai bagian dari Penanaman satu juta pohon maupun satu miliar pohon yang ada di pusat, serta Gerakan Penanaman Pohon Ijo Royo- royo yang ada di Kabupaten. (*Sumber: Peraturan Desa Jambi Nomor 04 Tahun 2008, Tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa*).

Secara tujuan yaitu sama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi tidak hanya itu Ribuan pohon tanaman yang ditanam dapat memberikan manfaat lain, salah satunya yaitu yang ada di Desa Jambi Kecamatan Baron. Pohon-pohon yang ditanam selain memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan yang lebih hijau juga memberikan dampak secara ekonomi berupa pemanfaatan tanaman tersebut untuk dapat bernilai secara ekonomis. Karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang produktif yang bisa untuk menghasilkan nilai jual. Pohon Jati, Sengon, Mahoni, Mangga

maupun Nangka adalah tanaman yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dari hasil observasi dilapangan peneliti mendapatkan suatu data Laporan yang berhasil dihimpun dari pemanfaatan hasil tanaman dari Lahan Desa serta dari pohon yang berasal dari lahan beberapa masyarakat di Desa Jambi kecamatan Baron, yang berhasil di arsipkan oleh aparat desa setempat. Hal tersebut bisa kita lihat pada tabel berikut ini.



TABEL 10
DATA HASIL LAPORAN TANAMAN PROGRAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN DI DESA JAMBI KECAMATAN BARON
TAHUN 2012

NO	NAMA POHON	PEMILIK	SATUAN (POHON)	HARGA (yang Terjual)	KETERANGAN
1	Jati	Desa	4	@500.000	Masuk Kas Desa
2	Mahoni	-	-	-	-
3	Aburia	-	-	-	-
4	Sengon	-	-	-	-
5	Nangka	Desa	1	@45.000	Masuk Kas Desa
6	Ketapang	-	-	-	-
7	Mlinjo	-	-	-	-
8	Mangga	Desa	3	@110.000	Masuk Kas Desa

Sumber: Dokumentasi Desa 2012

TABEL 11
DATA HASIL LAPORAN TANAMAN PROGRAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN DI DESA JAMBI KECAMATAN BARON
TAHUN 2012

NO	NAMA POHON	PEMILIK	SATUAN (POHON)	HARGA (yang Terjual)	KETERANGAN
1	Jati	Pak Hakim	1	@500.000	Pribadi
2	Mahoni	-	-	-	-
3	Aburia	-	-	-	-
4	Sengon	-	-	-	-
5	Nangka	-	-	-	-
6	Ketapang	-	-	-	-
7	Mlinjo	-	-	-	-
8	Mangga	-	-	-	-

Sumber: Dokumentasi Desa 2012

TABEL 12
DATA HASIL LAPORAN TANAMAN PROGRAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN DI DESA JAMBI KECAMATAN BARON
TAHUN 2012

NO	NAMA POHON	PEMILIK	SATUAN (POHON)	HARGA (yang Terjual)	KETERANGAN
1	Jati	-	-	-	-
2	Mahoni	-	-	-	-
3	Aburia	-	-	-	-
4	Sengon	-	-	-	-
5	Nangka	Komari	2	@45000	Pribadi
6	Ketapang	-	-	-	-
7	Mlinjo	-	-	-	-
8	Mangga	-	-	-	-

Sumber: Dokumentasi Desa 2012

TABEL 13
DATA HASIL LAPORAN TANAMAN PROGRAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN DI DESA JAMBI KECAMATAN BARON
TAHUN 2012

NO	NAMA POHON	PEMILIK	SATUAN (POHON)	HARGA (yang Terjual)	KETERANGAN
1	Jati	-	-	-	-
2	Mahoni	-	-	-	-
3	Aburia	-	-	-	-
4	Sengon	-	-	-	-
5	Nangka	-	-	-	-
6	Ketapang	-	-	-	-
7	Mlinjo	-	-	-	-
8	Mangga	Arifin	2	@85.000	Pribadi

Sumber: Dokumentasi Desa 2012

Dari keempat tabel diatas adalah dokumentasi desa untuk laporan Hasil Penanaman pohon dari program pelestarian lingkungan melalui Hutan desa, pada tabel pertama adalah hasil yang diperoleh dari tanah desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan desa sendiri. Sementara pada tabel 10,11 dan 12 adalah tanaman yang berhasil dihimpun dari lahan atau tanah milik warga, memang hanya sedikit yang terdokumentasi sampai setidaknya diakhir tahun 2012 karena sebagian besar warga belum melaporkan sehingga belum tercatat atau terdokumentasi di Laporan Desa. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh aparatur Desa setempat, yang mengatakan bahwa,

“Sampai saat ini memang untuk pelaporan evaluasi dari hasil tanaman masih minim sekali yang dilaporkan oleh warga karena tanaman yang dikembangkan juga masih dalam tahap pertumbuhan, namun Desa akan berusaha untuk terus memonitoring lagi, karena banyak tanaman yang potensial secara ekonomi baik yang ada di lahan milik Desa maupun milik warga”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 25 April 2013 Pukul 09.00 Wib)

Memang dilihat dari data diatas secara ekonomi tentu apa yang dihasilkan oleh desa dan sebagian kecil warga masih minim untuk dikatakan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Namun tetap dapat disimpulkan bahwa program ini telah membawa manfaat dari segi penambahan ekonomi untuk masyarakat karena yang diharapkan dari segi ekonomi adalah tidak secara signifikan untuk dalam jangka waktu pendek akan tetapi dalam jangka waktu lama (Masa yang akan datang).

b) Secara Sistem Sosial

Selain dampak ekonomi yang merupakan tujuan dalam jangka panjangnya, Program hutan Desa ini juga memiliki manfaat dalam jangka pendek artinya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam waktu yang singkat tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama. Dampak sosial ini dapat diketahui dari tumbuhnya rasa sosial masyarakat karena memang program ini adalah program yang sifatnya partisipatif. Rasa sosial ini dapat dilihat dari tumbuhnya rasa gotong-royong dalam kegiatan Desa melalui program hutan desa ini setiap tahunnya yang semakin meningkat dari tahun 2008-2011. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan aparatur Desa setempat yang mengatakan bahwa,

“ Manfaat secara sosial dari program ini tentu bisa dilihat dari tumbuhnya partisipasi warga lewat kegiatan gotong-royong untuk menanam tanaman ini secara bersama-sama, tingginya antusias warga setiap tahunnya dalam pelaksanaan program ini di Desa Jambi, menandakan bahwa rasa sosial telah tumbuh dan berkembang ditengah-tengah warga”.
(Sumber: Wawancara, 25 April 2013 Pukul 11.00 Wib).

Selain apa yang diungkapkan oleh aparatur Desa setempat, terdapat pula tabel terkait dengan pergerakan partisipasi warga dalam kegiatan Desa hal tersebut bisa dilihat sebagai berikut.

TABEL 14
LAPORAN PARTISIPASI WARGA DESA JAMBI DALAM KEGIATAN
DESA 2008-2011

No	NAMA KEGIATAN	JUMLAH PARTISIPASI WARGA				KETERANGAN
		TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	
1	Kerja Bakti Agustusan	43	38	77	59	-
2	Bersih Desa	65	49	62	61	Menyambut Bulan Muharram atau Bulan Suro
3	Pelestarian Lingkungan	103	128	142	232	Ijo Royo-royo, Penanaman Pohon di Seluruh Sudut Desa
4	Lain-Lain	89	93	77	111	-

Sumber: Arsip Desa Jambi Tahun 2012

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa partisipasi warga dari tahun ketahun semakin meningkat dan tinggi, terutama dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang diwujudkan dalam penanaman pohon diseluruh wilayah desa. Dampak sosial ini tentunya akan semakin

menguatkan posisi masyarakat sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Lewat kegiatan yang sifatnya gotong-royong ini akan tumbuh rasa kekeluargaan kepada semua anggota masyarakat tidak hanya dalam waktu singkat namun dalam waktu yang lama, karena ikatan batin akan terus terjaga dengan *kontinuitas* kegiatan-kegiatan secara partisipatif.

c) Secara Lingkungan

Secara lingkungan adalah esensi yang paling diharapkan dari program ini, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah dampak secara lingkungan ini adalah adanya perubahan untuk lingkungan yang semakin hijau dan desa yang semakin hijau dari adanya program penanaman pohon dengan program Hutan Desa ini. Sehingga tujuan untuk pelestarian lingkungan dapat tercapai.

Penanaman ribuan bibit tanaman disepanjang jalan, dilahan warga serta lahan desa terutama di Desa Jambi sudah mampu membawa perubahan lingkungan menjadi lebih asri, sejuk dan lebih hijau hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan salah satu warga di Desa Jambi yang mengatakan bahwa.

“Masyarakat telah merasakan sejauh ini, ternyata lingkungan sekitar menjadi lebih segar, indah serta udara menjadi lebih sejuk sangat berbeda dari sebelum adanya penanaman pohon ini”.
(Sumber: Wawancara, Selasa 30 April 2013 Pukul 08.30 Wib).

Selain itu juga ada perubahan secara nyata di lingkungan Desa Jambi sendiri, khususnya yang ada di pinggir jalan yang sebelum program

ini jalan nyaris tanpa pepohonan yang hijau sekitar tahun 2005 sebelum adanya program penanaman pohon ini kemudian di tahun 2012 ini sudah sangat berubah. Sekitar jalan menjadi lebih hijau dan indah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5: Perbandingan Sebelum adanya program Hutan Desa dan sesudah adanya program.

Sumber : Dokumentasi Desa Jambi 2012

Pada gambar tersebut diatas jelas sekali adanya perubahan dari lingkungan yang menjadi lebih hijau artinya dapat disimpulkan bahwa dampak secara lingkungan dari program ini telah terwujud khususnya di Desa Jambi meskipun kendala juga ada terkait dengan tidak meratanya penanaman yang dilakukan serta adanya tanaman yang mati, namun secara

umum dampaknya sudah lebih positif dengan adanya perubahan dari lingkungan sekitar Desa Jambi.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Dalam proses pelaksanaan program Hutan Desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Desa Jambi Kecamatan Baron, sejak program ini di gulirkan pada tahun 2008 dan dengan pelaksanaanya yang masih sampai sekarang, tentu ada hambatan maupun dukungan dari pelaksanaan program ini.

Hambatan tersebut muncul seiring dengan pelaksanaan program ini ketika dijalankan, terutama sekali menyangkut internal Desa yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan sumber daya, namun dibalik hambatan tersebut juga terdapat faktor pendukung dari pelaksanaan program ini, sehingga program ini mampu berjalan dengan lancar dan sukses untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di Desa Jambi Kecamatan Baron. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Jambi Kecamatan Baron.

“ Pelaksanaan program ini tentu tidak terlepas dari 2 aspek yang mana 2 aspek itu saling mempengaruhi untuk keberhasilan program ini. Yakni aspek berupa hambatan dan dukungan karena yang namanya kegiatan tentu ada variabel tersebut. Selain aspek pendukung untuk memperlancar jalanya kegiatan, ada juga pastinya kendala serta hambatan yang di hadapi”.

(Sumber: Wawancara, Rabu 1 Mei 2013 Pukul 11.00 Wib).

Jadi aspek pendorong dan penghambat secara besar saling mempengaruhi terhadap pelaksanaan dari pada program ini. Adapun secara detail faktor pendukung dari pelaksanaan program Hutan Desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) antara lain:

a) Faktor Pendukung

a. Internal

a) Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan program hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), banyak sumber daya manusia yang mendukung kelancaran program tersebut, baik itu dari Aparatur Desa, serta masyarakat umum, kepedulian serta antusiasme yang tinggi menjadi point positif di dalam pelaksanaan program ini. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Bapak Kepala Desa (Kades), yang mengatakan bahwa.

“ Kegiatan pelestarian lingkungan di Desa Kami, lewat program Hutan desa tidak akan berjalan lancar bila tidak ada partisipasi masyarakat, dan Syukur alhamdulillah masyarakat desa Jambi, memiliki itu. Semua bisa berperan aktif mulai perangkat desa sampai kepada masyarakat umum”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 2 Mei 2013 pukul 08.15 Wib).

Jadi berdasarkan penuturan dari bapak Kades diatas dapat diketahui bahwa peran Masyarakat (Sumber daya Manusia) sangatlah besar dalam menunjang terlaksananya program ini.

b) Lokasi

Lokasi dalam konteks ini berkaitan dengan faktor geografis yang menunjang program Hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Desa Jambi dengan pelaksanaan program ini sangat terbantu karena Desa mereka memiliki tanah yang subur serta dikelilingi sungai-sungai besar sebagai penunjang tumbuh dan berkembangnya tanaman yang ditanam di dalam program ini. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak kepala Desa yang mengatakan bahwa.

“Dengan dikelilingi oleh sungai-sungai yang ada di batas Desa, ini menjadikan tanah desa menjadi subur, tidak kekurangan pengairan secara tradisional, dan ini menunjang dari adanya program ini khususnya didalam menumbuhkembangkan tanaman”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 2 Mei 2013 Pukul 08.20 Wib).

Artinya dengan lokasi strategis tersebut Desa Jambi memiliki suatu keuntungan untuk mendapatkan hasil maksimal dari program ini.

c) Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Jambi yang sebagian besar adalah Petani, dan bekerja di sektor pertanian adalah salah satu aset di dalam kelancaran pelaksanaan program tersebut. Karena dengan pemahaman mereka terkait dengan bagaimana merawat serta menumbuh kembangkan tanaman ini menjadi modal di dalam keberhasilan pelaksanaan program hutan desa ini. Hal ini juga

senada dengan apa yang disampaikan oleh Kamituwo Ringin Kembar Desa Jambi, yang mengatakan

“Terlaksananya program hutan desa di Jambi ini dengan baik salah satu faktor suksesnya adalah karena masyarakat Desa adalah petani sebagian besarnya. Dengan itu tentu tidak terlalu sulit untuk melaksanakan program ini terutama pemahaman untuk bagaimana merawat serta menumbuhkan kembangkan tanaman”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 2 Mei 2013 Pukul 09.30 Wib).

Jadi faktor mata pencaharian penduduk Desa Jambi yang sebagian besar adalah petani, majadi point penting suksesnya program ini.

b. Eksternal

a) Relevansi dengan Program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Program Ijo Royo-royo, yang memang mempunyai tujuan untuk melestarikan lingkungan dan penyelamatan lingkungan, artinya program tersebut adalah suatu acuan untuk Desa Jambi melaksanakan program serupa dengan lingkup yang lebih spesifik tetapi dengan tujuan dan sasaran yang sama. Ini bisa dilihat dari adanya peraturan desa (perdes) nomor 04 tahun 2008 tentang pelestarian lingkungan dan hutan desa.

b) Dukungan dari pemerintah Daerah baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten di dalam mensukseskan program ini, melalui dukungan Dana, Pengawasan, serta sosialisasi secara berkala dan Pemberian bibit tanaman. Hal ini bisa dilihat

dari bantuan tanaman serta dukungan dana, dan pengawasan, sesuai dengan apa yang dituturkan oleh perangkat Desa setempat yang menyatakan bahwa.

“Dukungan dari pemerintah Daerah sangat besar di dalam kesuksesan program hutan desa di Desa Jambi ini, selain dari Kabupaten berupa ribuan bibit tanamandan dukungan dana, dari Kecamatan juga memberikan perhatian lewat pengawasan secara berkala”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 2 Mei 2013 Pukul 10.00 Wib).

Selain beberapa dukungan yang diberikan sehingga program Hutan Desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Desa Jambi Kecamatan Baron, di dalam pelaksanaan program ini juga terdapat beberapa Hambatan antara lain:

b. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

a) Perawatan Tanaman.

Perawatan Tanaman dalam hal ini datang dari tingkat antusiasme masyarakat yang berbeda di dalam merawat atau menumbuh kembangkan tanaman yang telah ditanam, sehingga perkembangan tanaman menjadi terhambat serta tingkat pemerataan tanaman yang ditanam menjadi berkurang karena dengan perawatan yang kurang tanaman menjadi mati. Sehingga ini akan mengurangi banyaknya tanaman yang telah ditanam. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kamituwo Ringin Kembar Desa Jambi

“Antusiasme masyarakat untuk merawat tanaman dari program hutan desa ini menjadi hambatan utama, dengan berbagai kesibukan serta kegiatan yang berbeda-beda dari masyarakat, ini menjadikan tanaman ada beberapa yang mati meskipun tidak banyak terutama yang terdapat di pinggir jalan”.

(Sumber: Wawancara, Kamis 2 Mei 2013 Pukul 10.30 Wib)

Dapat terlihat bahwa hambatan utama adalah masalah perawatan tanaman, masyarakat terlihat kurang secara serempak dan menyeluruh melaksanakan hal tersebut hanya sebagian.

b) Terbatasnya Lahan Pekarangan Warga

Terbatasnya lahan yang dimiliki warga Desa Jambi, terutama untuk menanam Pohon yang diletakkan di pekarangan.warga yang memiliki pekarangan yang luas tentu mendapatkan manfaat yang lebih besar dari warga yang tidak memiliki lahan pekarangan yang luas atau bahkan tidak memiliki lahan pekarangan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh aparaturnya desa setempat yang mengatakan bahwa.

“Salah satu kendala yang dihadapi di Desa Jambi adalah masalah lahan pekarangan, rata-rata penduduk di sini sempit lahan pekarangannya, sehingga hasil yang di dapat untuk semua warga tidaklah merata, tapi kedepannya akan diupayakan memaksimalkan lahan dari desa”.

(Sumber: Wawancara, Jum'at 3 Mei 2013 Pukul 08.45 Wib).

Memang terbatasnya lahan ini akan menjadi kendala karena pemerataan tanaman sangat bermanfaat untuk masyarakat agar penghijauan dan manfaat lain dapat diperoleh secara menyeluruh.

b. Faktor Eksternal

a) Sosialisasi dan Pengawasan

Hambatan ini datang dari Pemerintahan Kecamatan sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dampak yang terdapat dilapangan adalah berimbas ke faktor perawatan serta penumbuhkembangan terhadap tanaman. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua dari Pelaksanaan program ini, yang mengatakan bahwa.

“Selama ini memang untuk perawatan tanaman yang saya lihat dilapangan memang kurang, hal tersebut sebagai imbas dari kurangnya sosialisasi serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan di dalam pelaksanaan program ini”.

(Sumber: Wawancara, Rabu 8 Mei 2013 Pukul 08.00 Wib)

Dalam wawancara tersebut dapat disebutkan bahwasanya yang menjadi kekurangan adalah terutama pada point sosialisasi serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan yang seharusnya memiliki kewenangan untuk hal tersebut.

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

a. Gambaran Penyusunan Implementasi Program Hutan Desa.

Program adalah penjabaran dari suatu kebijakan. Program disamping bersifat alokatif dan diskriptif, program juga harus bersifat inovatif dan multifungsi (Zauhar, 1993:2). Implementasi bukan sekedar bersangkut paut dengan penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crusial*, (Widodo, 2006:85).

Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam penyusunan implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan, artinya diperlukan suatu penyusunan terkait bagaimana penerapan implementasi itu secara baik, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal.

Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Dalam hal ini, Program Hutan desa adalah bagian dari penjabaran kebijakan pelestarian lingkungan, maka di dalam pelaksanaannya tentu harus memenuhi konsep implementasi kebijakan publik, dan dalam hal ini, implementasi program hutan desa telah sesuai dengan konsep implementasi kebijakan publik diatas. Karena telah melewati serangkaian proses mulai dari persiapan yang berupa perencanaan dengan adanya peraturan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan berpedoman kepada keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari menanam Pohon Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur untuk penyelamatan Bumi, peraturan diatas adalah pedoman untuk menghasilkan atau mensukseskan tujuan kebijakan tersebut bagi pelaksanaan pemeliharaan lingkungan di Kabupaten Nganjuk, lewat program penghijauan yang dinamakan Ijo Royo-royo, hal tersebut dipandang perlu untuk memberikan panduan, pedoman di dalam pelaksanaan Gerakan Menanam dan Memelihara pohon sebagai bagian menjaga ekosistem lingkungan dan alam, menuju Nganjuk Ijo Royo-royo.

Gerakan menanam dan memelihara pohon menuju Nganjuk Ijo Royo-royo merupakan bentuk kepedulian masyarakat Nganjuk dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global melalui perbaikan lingkungan di wilayah kabupaten Nganjuk. Penanaman tanaman kayu-kayuan dan tanaman produktif lainnya memiliki beberapa fungsi yaitu menyerap karbondioksida diudara, konservasi Tanah dan air, pencegahan longsor dan peningkatan jumlah penutupan lahan oleh tanaman.

Pelaksanaan dari kegiatan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon Menuju Nganjuk Ijo Royo-royo ini kemudian di desentralisasikan ke tingkat kecamatan yang di koordinir oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah pada tingkat Desa atau kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, Desa Jambi membuat suatu program sebagai bagian dari pelaksanaan Program Ijo Royo-royo yaitu Program Hutan Desa secara tujuan, hakikat, maupun manfaat program hutan desa adalah sama dengan Ijo Royo-royo, karena program hutan desa ini adalah bagian dari program tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Jambi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa.

Artinya dapat disimpulkan bahwa serangkaian penyusunan, mulai dari perencanaan yaitu untuk kelestarian lingkungan, perumusan suatu program dengan mengacu kepada pedoman hukum, serta tujuan yang tertuang di dalam pedoman hukum tersebut telah ditetapkan dan di tata dengan baik dari program ini, maka ini secara konsep implementasi program telah memenuhi seperti yang dijelaskan oleh Brian W. Hogwood

dan Lewis A.Gunn dalam (Wahab, 1991:36), yang mengungkapkan bahwa ada sejumlah tahapan dalam implementasi program dan sesuai dengan proses diatas maka ini termasuk kedalam Tahap 1 dari Implementasi program bahwa harus tergambar rencana dengan penetapan tujuan yang jelas. Ini tentunya sesuai dengan proses serta tujuan dari program hutan desa di Desa Jambi kecamatan Baron.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mazmanian & Sabatier dalam (Widodo, 2006:88) yang menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan-keputusan kebijaka dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan point pertama dari kalimat yang dikatakan oleh Mazmanian & Sabatier bahwa proses implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintah dari eksekutif, ini tentunya sesuai dengan Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron, yang mana dari serangkaian pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sudah mengacu terhadap undang-undang No.32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terutama

pada pembukaan yaitu point e yang mengatakan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada Undang-undang tersebut Desa Jambi membuat program pelestarian lingkungan dan Hutan Desa melalui dikeluarkannya Peraturan Desa (Perdes) nomor 04 Tahun 2008, peraturan tersebut juga sekaligus menindaklanjuti dan melaksanakan program Ijo-royo royo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Jadi Program Hutan Desa ini adalah tindak lanjut dari adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, kemudian sesuai juga dengan perintah dari eksekutif yang telah mengeluarkan keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari menanam Pohon Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur untuk penyelamatan Bumi.

Jadi secara konsep gambaran penyusunan implementasi kebijakan yang mengacu kepada Undang-undang serta Perintah dari eksekutif, maka Program Hutan desa di desa jambi kecamatan baron, telah memenuhi kesesuaian dengan konsep tersebut, untuk dapat diimplementasikan kemasyarakat untuk mewujudkan pelestarian lingkungan.

a) **Proses Penyusunan dalam menyelenggarakan Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).**

Penyusunan dari Program Hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) ini seperti yang sudah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya bahwa sebagai tidaklanjut (menindaklanjuti) surat edaran tentang gerakan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon Menuju Nganjuk Ijo Royo-royo dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, kemudian disampaikan ke Kecamatan Baron melalui Kepala Seksi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, melalui Bidang inilah selanjutnya dibuat instruksi yang ditujukan ke Desa-desa untuk melakukan gerakan penanaman pohon untuk mensukseskan gerakan Nganjuk Ijo Royo-royo.

Tidak berhenti sampai disini saja, selanjutnya perwakilan dari desa yang di dalam hal ini Desa Jambi kecamatan Baron melalui kepala desa (Kades) bertindak sebagai Kader Ijo royo-royo yang selanjutnya mereka membuat suatu agenda didalam kegiatan Penanaman pohon tersebut, di Desa Jambi Kader Ijo Royo-royo yang dikoordinasi oleh Kepala Desa (Kades) menamakan gerakan penanaman pohon mereka, yaitu Program Hutan Desa, sebagai bagian dari Kader Ijo Royo-royo.

Lewat Kepala Desa inilah selanjutnya dikoordinasikan kepada semua pejabat Desa atau aparat Desa untuk membuat suatu agenda kegiatan bersama-sama masyarakat, serta membuat suatu legalisasi

kegiatan tersebut (Membuat Peraturan Desa (Perdes) serta membuat proposal kegiatan dari Penanaman pohon tersebut, guna mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, karena bila tidak membuat agenda kegiatan berupa proposal dan Peraturan Desa yang berkaitan dengan hal tersebut maka bibit bantuan untuk tanaman tidak akan turun dari pemerintah daerah.

Dengan dibuatnya Proposal serta Perdes inilah kemudian Desa jambi mendapatkan bantuan berupa bibit pohon sebanyak 25.000 pohon pada tahun 2008 serta 25.000 pada tahun 2011 bibit pohon, bantuan dari kabupaten Nganjuk ini tidak hanya berupa tanaman Kayu-kayuan saja tetapi juga tanamanan dari jenis buah-buahan seperti Mangga, Nangka dan Sukun serta Mlinjo. Hal tersebut selain untuk mendukung penghijauan juga akan mendukung peningkatan nilai ekonomi masyarakat.

Berdasarkan fenomena inilah terlihat bagaimana ada suatu proses penyusunan agenda program dari mulai pedoman, kemudian pendayagunaan sumber daya manusia, manajemen program serta tujuan dan manfaat pada publik. Ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Darwin dalam (Widodo, 2006:89) yang mengatakan bahwa persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat kepada publik.

Dari teori diatas terlihat bahwa di dalam pelaksanaan Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan baron telah memperlihatkan bagaimana program tersebut telah di susun berdasarkan pedoman Undang-undang serta instruksi eksekutif dari Pemerintahan Daerah, kemudian adanya pendayagunaan sumber daya manusia, yang dalam bentuk pengorganisasian massa melalui kegiatan Hutan Desa mulai dari tahun 2008-2012, yang dilakukan oleh seluruh warga Desa Jambi. Serta dibentuknya Susunan kepengurusan kegiatan Hutan Desa Melalui Organisasi Tani Amanah untuk memperlancar jalanya kegiatan agar lebih terkoordinasi dengan baik serta di dapat suatu pertanggung jawaban, dan juga evaluasi dari kegiatan yang dijalankan.

Terakhir adanya manajemen serta tujuan yang di dapat dari pelaksanaan suatu program, dalam hal ini manajemen di dalam pelaksanaan program hutan Desa langsung bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan melalui kesepakatan dari semua elemen masyarakat Desa Jambi. Dari kesepakatan tersebutlah kemudian dibentuk struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Hutan Desa di Desa Jambi yang diketuai oleh Bapak Subroto, kemudian Agus Edy Tiono sebagai sekretaris, Adi Atmoko sebagai Bendahara, dan 15 anggota yaitu, Siti Kholifatin, Zakaria, Waras, Kasmiran, Suwito, Sucipto, Sukarmin, Amrul Anam, Sumarno, Didik Sujarwo, Darianto, Imam supardi, Kadir, Suparto, Ilham Kurniawan. mereka yang bertanggung jawab membantu kegiatan untuk lebih terorganisir.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Darwin, Jones dalam (Widodo, 2006:89) mengatakan bahwa aktivitas di dalam menyelenggarakan atau mengimplementasikan kebijakan terdapat tiga macam, antara lain: *Organization activity*, yang merupakan aktivitas pengorganisasian sebagai suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi (*Interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments*).

Sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Jones di atas hal tersebut berkaitan dengan temuan fakta dari implementasi program Hutan Desa di Desa Jambi dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Bahwa yang pertama dari program ini adalah membentuk suatu organisasi untuk menjalankan kegiatan tersebut di desa karena memang program ini

adalah program yang sifatnya partisipatif dan gotong royong, pembentukan organisasi dimaksudkan untuk mengkoordinir dan mengkoordinasikan warga masyarakat agar ikut dalam suatu kegiatan. Karena tujuan akhir dari program ini adalah agar masyarakat dapat memetik hasilnya secara bersama-sama, baik itu dari segi lingkungan, sosial serta ekonomi.

Aktivitas interpretasi dari program ini dijabarkan dengan lebih detail dan lebih operatif agar masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi untuk ikut serta di dalam mensukseskan program ini. Di Desa Jambi program yang sebelumnya di Kabupaten Nganjuk disebut dengan Ijo Royo-royo dikemas dengan lebih operatif agar masyarakat tidak hanya memahami esensi dari pentingnya penghijauan saja, tetapi masyarakat juga paham akan nilai-nilai sosial serta keberlanjutan secara ekonomi, maka dari itu program tersebut di namakan dengan Program Hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan untuk mendukung program tersebut secara lingkungan, ekonomi maupun secara sosial, di Desa Jambi ketiga tujuan yang ingin dilaksanakan tersebut diupayakan lewat penanaman ribuan bibit pohon atau tanaman yang bentuk tanaman atau bibit pohon tersebut tidak hanya untuk penghijauan saja contoh, Jati, Gmelina, Jabon, dan Mahoni tetapi ada penambahan tanaman yang produktif, yaitu Mangga, Nangka, dan Mlinjo tanaman-tanaman ini tentunya memiliki nilai ekonomis, artinya tidak hanya bermanfaat untuk

penghijauan tetapi ada manfaat ganda lainnya. Sehingga dengan fungsi ganda dari program tersebut dapat memancing keikutsertaan warga masyarakat untuk berpartisipasi dan terbukti tingkat antusiasme warga Desa jambi sangat tinggi dari mulai kegiatan tersebut pada tahun 2008 dengan partisipasi warga sebanyak 103 orang sampai tahun 2012 yaitu sebanyak 232 orang. Artinya terdapat peningkatan jumlah partisipan yang cukup banyak ini membuktikan bahwa secara sosial ada suatu perilaku untuk menerima program ini dan tumbuh keinginan untuk bagaimana membuat program ini semakin berkembang lewat keikutsertaan warga masyarakat yang semakin banyak.

Aktivitas kegiatan dari program ini adalah warga masyarakat secara bergotong royong dan serempak di RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) menanam bibit tanaman yang telah diberikan dari Desa untuk ditanam di Lahan mereka, kemudian di lahan desa sendiri serta di pinggir jalan. Desa jambi sendiri memberikan tanaman yang tidak hanya berupa kayu-kayuan saja namun juga terdapat tanaman yang produktif khususnya dari jenis buah-buahan hal tersebut dimaksudkan untuk merangsang niat serta lancarnya kegiatan dari awal sampai akhir berupa tercapainya tujuan yaitu untuk masyarakat desa sendiri. Dengan adanya tanaman yang nantinya bermanfaat untuk mereka dimasa yang akan datang khususnya tanaman dari buah-buahan terbukti masyarakat Jambi sangat antusias di dalam kegiatan ini.

Selain itu proses di dalam pelaksanaan Program Hutan Desa tersebut juga sesuai dengan konsep yang di sampaikan oleh (Hessel Nogi, 2003:32), yang menyebutkan bahwa suatu program terimplementasi dengan efektif atau tidak dapat diukur dengan standar penilaian, yaitu organisasi yaitu telah dibentuknya Susunan kepengurusan kegiatan Hutan Desa Melalui Organisasi Tani Amanah untuk memperlancar jalanya kegiatan agar lebih terkoordinasi dengan baik serta di dapat suatu pertanggung jawaban, dan juga evaluasi dari kegiatan yang dijalankan.

Kemudian Interpretasi yang dimaknai sebagai menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Di Desa Jambi program yang sebelumnya di Kabupaten Nganjuk disebut dengan Ijo Royo-royo dikemas dengan lebih operatif agar masyarakat tidak hanya memahami esensi dari pentingnya penghijauan saja, tetapi masyarakat juga paham akan nilai-nilai sosial serta keberlanjutan secara ekonomi, maka dari itu program tersebut di namakan dengan Program Hutan desa, dengan memberikan tanaman yang multifungsi sehingga didapat hasil yang ganda oleh masyarakat, dengan strategi ini antusiasme masyarakat telah tumbuh tinggi di dalam menjalankan program kegiatan ini dengan baik.

Aktivitas yang terakhir dari implmentasi program adalah penerapan, yang didefinisikan segala keputusan dengan aktivitas kegiatan-kegiatan untuk terealisasi tujuan dari program. Dalam

penerapan program hutan desa aktivitasnya adalah penanaman pohon yang telah diberikan oleh desa kepada masyarakat untuk ditanam di Lahan pekarangan mereka, di tepi jalan, dan dilahan desa, tujuannya yaitu untuk mendapatkan penghijauan, pelestarian lingkungan serta tujuan lain berupa aspek sosial terkait partisipasi warga dalam suatu kegiatan serta penambahan nilai ekonomi, lewat tanaman buah atau tanaman produktif yang di tanam.

b) Sumber Daya dalam Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.

Sumber daya adalah salah satu bagian terpenting di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Berhasil atau gagalnya suatu kegiatan sangat di tentukan oleh faktor sumber daya tersebut. sumber daya, memiliki beberapa dimensi antara lain, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Kesemua sumber daya tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil maupun gagalnya suatu program kegiatan. Karena setiap elemen memiliki fungsi masing-masing yang saling berpengaruh untuk menunjang dari pada kelancaran suatu kegiatan. Program Hutan Desa di Jambi ini, juga demikian artinya memiliki elemen berupa sumber daya (Manusia, Anggaran dan Peralatan) sebagai motor penggerak di dalam berjalannya suatu program sesuai dengan yang diharapkan.

Pentingnya aspek sumber daya ini seperti yang dikatakan oleh Edward III dalam (Widodo, 2006:98), yang mengemukakan bahwa faktor sumber daya memainkan atau punya peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun anggaran diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kegiatan maupun suatu program. Begitu juga terkait dengan Program Hutan desa di Desa Jambi Kecamatan Baron tersebut, temuan di lapangan bahwasanya telah menguatkan bahwa aspek sumber daya utamanya manusia, peralatan serta anggaran sangat mempengaruhi dari kelancaran kegiatan ini. Selanjutnya terkait dengan aspek sumber daya, kita akan membahas lebih dalam mulai dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sumber Daya Perlengkapan.

1) Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2006:98) kemudian menegaskan bahwa “

Probably the most essential resources in implementing policy staff”.

Sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian).

Edward III juga lebih menegaskan lagi bahwa “ *No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective*”. Jadi, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

Jadi, berdasarkan teori diatas ini sesuai dengan apa yang kemudian ada dilapangan terkait dengan program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron, bahwa ada sumber daya manusia yang terlibat di dalam program tersebut. Mulai dari keterlibatan perangkat desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM (Lembaga Pemberdayaan Perempuan), PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat. Selain keterlibatan semua warga tersebut dalam program ini juga telah ada pembagian secara organisasi untuk mengefektifkan program yang di jalankan. Pembentukan organisasi ini berdasarkan kesepakatan seluruh warga dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan

peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Sumber daya anggaran di dalam suatu program atau kegiatan sangatlah penting karena, apabila kurang dalam hal sumber daya anggaran kondisi tersebut akan menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapat *incentive* sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Berkaitan dengan itu Van Horn & Van Matter dalam (Widodo, 2006:100) menyatakan "*new towns study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Terbatasnya insentif tersebut tidak akan mampu mengubah sikap dan perilaku (disposisi) para pelaku kebijakan. Oleh karena itu, agar para pelaku kebijakan memiliki disposisi (sikap dan perilaku) tinggi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan insentif yang cukup.

Berdasarkan teori diatas bahwasanya sumberdaya anggaran sangatlah diperlukan agar kebijakan, program, maupun kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Tentu sebagai bagian dari suatu kebijakan pelestarian lingkungan, program Hutan Desa di Desa Jambi kecamatan Baron ini mempunyai anggaran untuk membiayai jalannya program kegiatan, untuk membiayai perawatan tanaman, semua itu tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya anggaran ataupun biaya. Karena Desa Jambi melaksanakan kegiatan ini dalam dua periode, adapun dalam

periode kedua mendapat bantuan dari Pemerintah daerah melalui Direktorat jenderal RLPS (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) sementara untuk periode pertama biaya perawatan tanaman diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

3) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan, peralatan diperlukan sebagai bantuan untuk mengerjakan sesuatu secara lebih rinci, cepat dan tepat dan tentunya untuk lebih mempermudah suatu agenda kegiatan. Adapun peralatan dalam hal ini yang digunakan didalam pelaksanaan Program Hutan Desa di desa jambi adalah berupa peralatan teknis untuk menunjang keberhasilan program yang bisa digunakan untuk jangka waktu lama, yaitu berupa cangkul, Sabit, Ayakan, Gayung, Gembor, Selang, Hand Sprayer, Gerobak dorong, pompa air dan instalasi pengairan. (Sumber: Proposal Program Kebun Bibit Rakyat, (KBR)). Sumber daya peralatan tersebut digunakan untuk mempermudah kinerja dari sumber daya manusia dan penunjang operasionalisasi sumber daya anggaran. Dalam kegiatan ini sangat terhambat manakala terbatasnya sumber daya peralatan yang ada terutama yang digunakan untuk pelaksanaan penanaman serta perawatan tanaman. Tentu perawatan dan penanaman dari tanaman tidak akan berjalan secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut yang menyatakan bahwa pentingnya sumber daya peralatan dan apabila terbatas dari sumber daya peralatan akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ini sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Widodo, 2006:102) bahwa.

“Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won’t succeed”.

Dengan demikian, terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Karena dengan terbatasnya fasilitas (apalagi yang sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

Oleh karena itu Program Hutan Desa di desa Jambi, juga mengandalkan sumber daya peralatan yang telah disediakan seperti yang disebutkan diatas, agar dalam melaksanakan program ini dapat berhasil dengan baik.

b. Pelaksanaan Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Sesuai dengan apa yang ada di lapangan, bahwa Pelaksanaan dari Program Hutan Desa ini dimulai dari pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa, yang dilaksanakan pada

hari sabtu tanggal 8 maret 2008, yang kemudian disetujui pada tanggal 11 Maret 2008 kemudian pelaksanaannya sendiri yaitu pada tanggal 27 Mei 2008, dengan diikuti oleh seluruh masyarakat desa di seluruh kecamatan Baron.

Seluruh masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan penanaman ini, mulai dari pekarangan rumah mereka, di pinggir jalan sampai ke Lahan desa yang masih kosong, tanaman yang ditanam antara lain, Jati, Gmelina, Jabon, Mahoni, Nangka dan Mangga. Penyediaan tanaman yang disebutkan diatas yang berupa tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan ini dilakukan untuk mendapatkan dampak baik secara lingkungan yaitu lewat penghijauan, serta tanaman buah-buahan dengan tujuan agar ada manfaat lain yang di dapat masyarakat berupa nilai tambah ekonomis. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wahab dalam (Widodo, 2006:86) yang mengatakan bahwa implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Artinya dapat disimpulkan bahwa implementasi program Hutan Desa ini adalah bagian dari kebijakan pelestarian lingkungan, dengan tanaman-tanamana yang telah disediakan baik itu dari jenis kayu-kayuan maupun buah-buahan dengan tujuan untuk mendapatkan dampak selain ke lingkungan juga ke masyarakat sendiri.

Tidak berhenti sampai pada tahap pelaksanaan saja, namun setelah pelaksanaan program Hutan Desa di Desa Jambi masih ada kegiatan

berupa pengawasan yang diawasi secara langsung oleh kepala desa jambi selaku ketua kader Ijo Royo royo serta dipandu lewat pengawasan dari pihak kecamatan yang diwakili oleh perwakilan dari Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk Menumbuh kembangkan tanaman-tanaman tersebut dengan baik agar ada suatu dampak positif yang dapat dipetik. Karena selain Desa menjadi lebih hijau, produktifitas tanaman yang berupa buah-buahan yang berupa Nangka, Mangga dan Sukun serta Mlinjo dapat mereka manfaatkan sendiri untuk kehidupan mereka, karena mekanisme pembagiannya juga sudah disepakati bahwa tanaman yang selain ditanam ditanah milik Desa adalah hak milik masyarakat untuk dimanfaatkan secara pribadi. Karena pengawasan tersebut bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan program tersebut baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang.

Berkaitan dengan pengawasan serta kontrol pada pelaksanaan program Hutan Desa di Desa Jambi, ini sesuai dengan teori kontrol pelaksanaan kebijakan publik dari (Widodo, 2006:94), yang menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kontrol diartikan sebagai proses usaha untuk melihat, dan menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Dari konsep diatas apabila dikaitkan dengan fakta temuan dilapangan terlihat jelas bahwa selain pelaksanaan atau implementasi dari suatu program maka kontrol atau pengawasan juga memainkan peranan yang penting, agar suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang telah dirancang khususnya untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat diwujudkan.

a) **Komunikasi antar Semua elemen yang Terlibat didalam Pelaksanaan Program.**

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam teori diatas bahwasanya disebutkan pentingnya komunikasi, hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan suatu program

dalam hal ini terkait dengan program Hutan Desa di desa Jambi, agar program tersebut dapat diterima dan dilaksanakan secara baik oleh masyarakat Desa.

Sesuai dengan teori diatas, Tentunya di dalam pelaksanaan Program Hutan Desa ini juga terdapat komunikasi serta sosialisasi dari para *stakeholder* yang terlibat di dalam program kegiatan tersebut, adapun tujuan dari komunikasi serta sosialisasi ini seperti yang disebutkan diatas adalah bermanfaat untuk menjalankan program ini secara terstruktur dari tingkat koordinasi atas sampai tingkat koordinasi kebawah untuk kemudian nantinya dapat sampai kepada masyarakat.

Dalam program hutan desa ini komunikasi dimulai ataupun diawali dari surat edaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk nomer: 522.4/691/411.302/2010, yang disampaikan kepada semua instansi yang ada di Kabupaten Nganjuk baik itu bagi lembaga pemerintah, non pemerintah maupun untuk seluruh masyarakat kabupaten Nganjuk mengenai Usulan Kader Ijo Royo-royo sebagai bagian dari pelaksanaan Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon menuju Nganjuk Ijo Royo-royo.

Dapat dilihat bahwa secara komunikasi program ini adalah merujuk kepada instruksi surat edaran pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang kemudian di teruskan ke Desa melalui kepala Desa, untuk dilaksanakan berdasarkan musyawarah serta rapat yang dipimpin langsung oleh kepala Desa, dari kesepakatan tersebut gerakan menanam

dan memelihara pohon menuju Nganjuk Ijo royo-royo, ditransformasikan menjadi program hutan desa di desa jambi, sebagai strategi mendapatkan hasil ganda tidak hanya dalam konteks penghijauan saja, tetapi bisa juga untuk ekonomi serta terdapat pula manfaat secara sosial. Dan setelah adanya kesepakatan berdasarkan musyawarah pengurus desa, selanjutnya secara serempak program ini dilaksanakan secara bersama-sama seluruh warga.

Dalam komunikasi kebijakan, juga dikenal adanya dimensi-dimensi, yaitu dimensi transformasi (*transformission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.

Pada program hutan desa tersebut adapun secara dimensi transformasi program ini adalah menjadi agenda pemerintah daerah kabupaten Nganjuk yang menggagas kebijakan pelestarian lingkungan lewat program Ijo royo-royo, program ini kemudian ditransformasikan ke seluruh Instansi yang ada di seluruh Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Edaran Bupati Nganjuk, Nomor 522.4/691/411.302/2010, adapun instansi yang dituju adalah, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah

Kabupaten Nganjuk, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk, Kepala Badan dan Inspektorat se-Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas se-Kabupaten Nganjuk, Kepala Kantor dan Satuan se-Kabupaten Nganjuk, Camat se-Kabupaten Nganjuk, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Nganjuk, Kepala Rumah Sakit Daerah Nganjuk, Kepala Rumah Sakit Daerah Kertosono, Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk, Kepala Kepolisian Resort Nganjuk, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, Administratur Perum Perhutani KPH Nganjuk, Administratur Perum. Perhutani KPH Jombang, Administratur Perum. Perhutani KPH Kediri, Administratur Perum. Perhutani Saradan, Direktur Utama BUMN, BUMD, BUMS dan Per Bankan se-Kabupaten Nganjuk, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk, Rektor Perguruan Tinggi se-Kabupaten Nganjuk, Kepala SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, Pondok Pesantren se-Kabupaten Nganjuk, Ketua LSM dan Ormas se-Kabupaten Nganjuk.

Kemudian dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari suatu kebijakan tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak

akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam dimensi kejelasan (*clarity*) ini program hutan desa yang ada di desa Jambi, sebelumnya adalah bentuk dari program Ijo royo-royo, di implementasikan menjadi program Hutan Desa, hal tersebut berdasarkan apa yang telah disepakati semua warga dan perangkat desa di Desa Jambi, dengan dikuatkan adanya Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2008.

Kemudian untuk komunikasi dari pelaksanaan Program ini, kepala desa sebelumnya mengumpulkan seluruh aparatur desa atau pegawai yang ada di Kantor Desa untuk membuat suatu koordinasi melalui struktur organisasi untuk melaksanakan program ini kepada masyarakat, sebagai bentuk bagian untuk merpertanggung jawabkan keberhasilan serta pengawasan jalanya program tersebut kepada masyarakat. Komunikasi menjadi sangat penting untuk secara detail merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi jalannya program kegiatan tersebut agar lebih mudah di kendalikan untuk melaksanakan program kegiatan dengan baik. Dengan hal itu secara maksud, tujuan dan sasaran serta substansi program ini telah dapat terimplementasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat dengan antusiasme yang tinggi.

Terakhir, terkait dengan dimensi konsistensi dalam program hutan desa di Desa Jambi telah dilaksanakan dalam tempo 2 (dua) periode

yaitu periode pertama pada tahun 2008, serta periode tahun kedua pada tahun 2011, pelaksanaannya tersebut dari tahun 2008 serta tahun 2011 desa Jambi secara konsisten menanam tanaman dengan fungsi ganda yaitu disatu sisi ditujukan untuk penghijauan, serta disisi yang lainnya difungsikan untuk meningkatkan nilai tambah khususnya pada ekonomi masyarakat, serta terdapat pula keeratan dalam aspek sosial berupa tingkat partisipasi dari warga akan pentingnya bergotong royong dan jiwa sosial.

Dari paparan data diatas secara dimensi transformasi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi pelaksanaan program pohon desa telah jelas terpapar bahwa program ini adalah bentuk transformasi dari program Ijo royo-royo di kabupaten Nganjuk, yang kemudian di Desa Jambi lebih ditafsirkan dengan program hutan desa. Ini dimaksudkan agar secara tujuan, manfaat dan kejelasan masyarakat Desa dapat lebih memahami dan ikut serta karena manfaatnya adalah untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk keberlanjutan masa depan baik generasi mereka, maupun generasi yang akan datang. Serta dari segi konsistensi program hutan desa ini telah secara *continou* dilaksanakan dalam dua periode, dengan tetap mempertahankan fungsi tanaman secara ganda, panghijauan dan ekonomi. Ini tidak lain dimaksudkan untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

b) Sasaran Pelaksanaan Sebagai Tujuan Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.

Suatu program perlu memiliki sasaran serta tujuan karena program dibuat memang untuk menjadi suatu solusi ataupun pemecah masalah dari suatu objek masalah yang dituju untuk dijadikan sebagai bagian alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Begitu juga dalam pelaksanaan Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron ini, sasaran pelaksanaan dari program ini adalah untuk seluruh warga masyarakat di Desa Jambi, Baik itu perangkat desa, Kepala Desa serta seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Sasaran pelaksanaan oleh seluruh warga masyarakat tersebut juga dikuatkan dari peraturan desa (perdes) pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penjagaan dan perawatannya dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Desa Jambi. Artinya jelas tanpa terkecuali sasaran pelaksanaan program ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Dari pelaksanaan tersebut tentu ada tujuan yang dicapai, dan dari program hutan desa ini tujuan yang dicapai adalah secara jangka pendek adalah untuk kelestarian lingkungan, menanggulangi terjadinya pemanasan global lewat penghijauan melalui penanaman ribuan pohon yang tertanam di pinggir jalan, Pekarangan warga, serta lahan Milik Desa.

Hal tersebut adalah diharapkan untuk mempercepat adanya penghijauan serta pelestarian lingkungan di Desa Jambi khususnya,

dengan penanaman ribuan bibit pohon tersebut. Secara jangka pendek pula, dari program ini akan didapat manfaat secara sosial, yaitu menumbuhkan rasa sosial tentunya dalam masyarakat, lewat kegiatan yang partisipatif tersebut, selain itu telah menumbuhkan penguatan rasa gotong royong antar semua warga, dengan begitu ikatan sosial yang ada dimasyarakat, untuk selalu memiliki jiwa sosial dan kebersamaan terjaga lewat program ini.

Pelaksanaan dari program hutan desa ini, yang secara konsep telah memiliki sasaran dan tujuan yang telah disebutkan diatas, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wahab dalam (Widodo, 2006:13) yang mengartikan bahwasanya kebijakan adalah sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Wujud dari pada tujuan dan sasaran yang dicapai dalam program Hutan desa di desa Jambi ini diformulasikan melalui tujuan jangka pendek dan jangka panjang, tujuan jangka pendek sangat jelas lewat penanaman ribuan pohon tersebut dapat membantu mewujudkan adanya penghijauan. Selain itu dari Program ini tentu tidak hanya manfaat ataupun tujuan secara jangka pendek saja yang dapat dicapai, tujuan jangka panjang dari program ini juga diharapkan dapat terealisasi, selain dari segi manfaat secara lingkungan serta sosial dalam jangka pendek yang dapat terealisasi,

manfaat serta tujuan jangka panjang yang terealisasikan adalah dari segi ekonomi. Segi ekonomi yang dicapai ini adalah lewat tanaman produktif yang ditanam baik itu tanaman dari kayu-kayuan seperti sengon, jati maupun mahoni, tentu dalam jangka waktu tertentu tanaman ini akan bernilai jual secara ekonomis baik itu untuk masyarakat maupun untuk Desa. Serta tanaman dari buah-buahan seperti nangka maupun manga yang tentu juga pasti bernilai ekonomi.

Hasil tanaman tersebut sepenuhnya menjadi hak masyarakat, kecuali tanaman yang berada di wilayah lahan Desa, artinya hal tersebut adalah suatu strategi adanya penambahan nilai ekonomi masyarakat Desa Jambi. Manfaat secara ekonomi memang akan lebih lama dirasakan karena memang tanaman seperti Jati, Mahoni, maupun sengon memiliki masa tumbuh yang lama bisa antara 5-10 Tahun untuk bisa dipetik hasilnya, namun ini tentunya akan bermanfaat sebagai pembangunan berkelanjutan karena bisa di nikmati jangka panjangnya khususnya secara ekonomis.

Maka dapat disimpulkan secara teori pelaksanaan dari program hutan desa ini mampu mencapai sasaran-sasaran serta tujuan yang telah disepakati secara bersama, baik itu dalam jangka waktu pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang.

c. **Dampak dari Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).**

a) **Secara Ekonomi.**

Telah diuraikan bahwa manfaat dari Program Hutan Desa adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu secara jangka pendek, serta dalam jangka panjang. Tujuan utama ialah untuk penghijauan serta untuk pelestarian lingkungan sebagai wujud untuk menyelamatkan bumi dari bahaya pemanasan global. Program ini adalah sebagai bagian dari Penanaman satu juta pohon maupun satu miliar pohon yang ada di pusat, serta Gerakan Penanaman Pohon Ijo Royo-royo yang ada di Kabupaten.

Secara tujuan yaitu sama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi tidak hanya itu Ribuan pohon tanaman yang ditanam dapat memberikan manfaat lain, salah satunya yaitu yang ada di Desa Jambi Kecamatan Baron. Pohon-pohon yang ditanam selain memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan yang lebih hijau juga memberikan dampak secara ekonomi berupa pemanfaatan tanaman tersebut untuk dapat bernilai secara ekonomis. Karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang produktif yang bisa untuk menghasilkan nilai jual. Pohon Jati, Sengon, Mahoni, Mangga maupun Nangka adalah tanaman yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Maka ketika dihubungkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, hal tersebut tampak sesuai karena penghijauan dengan jalan melalui program hutan desa tersebut, selain memiliki manfaat untuk jangka pendek dan ada manfaat untuk jangka panjang yakni dikhususkan pada ekonomi, artinya ini bila melihat konsep Pembangunan berkelanjutan dalam Undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikatakan sebagai:

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Artinya hal tersebut telah sesuai dengan prinsip pembangunan yang memadukan manfaat secara ekonomi serta penghijauan. Manfaat secara ekonomi pula telah terlihat dari paparan data yang terhimpun di kantor desa, meskipun data hanya sebagian kecil saja yang telah terhimpun, seperti ada beberapa warga yang telah menjual mangga, jati, dan Nangka ini membuktikan bahwa penghijauan dengan manfaat untuk kelestarian lingkungan serta penambahan nilai ekonomi masyarakat telah tercapai walaupun dalam skala kecil, karena secara ekonomi memang diharapkan secara signifikan untuk jangka pendek. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi esensi nilai pembangunan berkelanjutan sendiri (*sustainable development*) yang mengaplikasikan manfaat-manfaat tersebut untuk tidak hanya jangka

pendek saja, tetapi untuk jangka panjang. Maka dari pemaparan diatas tersebut, di dapat suatu benang merah bahwa esensi dari dampak secara ekonomi ini adalah adanya keberlanjutan secara ekonomi, yaitu bagaimana mempertahankan sumber daya alam lewat tanam-tanaman yang ditanam lewat program hutan desa ini. Hal ini tentunya sesuai dengan teori paradigma Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) pada point keberlanjutan secara ekonomi sesuai apa yang dituturkan oleh Dieren dalam (Asdak, 2012:41). Yang dalam pengertiannya adalah “Mempertahankan” kapital atau menjaga agar kapital (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan ketika kapital tersebut dimanfaatkan.

b) Secara Sistem Sosial

Selain dampak ekonomi yang merupakan tujuan dalam jangka panjangnya, Program Hutan Desa ini juga memiliki manfaat dalam jangka pendek artinya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam waktu yang singkat tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama. Dampak sosial ini dapat diketahui dari tumbuhnya rasa sosial masyarakat karena memang program ini adalah program yang sifatnya partisipatif. Rasa sosial ini dapat dilihat dari tumbuhnya rasa gotong-royong dalam kegiatan Desa melalui program hutan desa ini setiap tahunnya yang semakin meningkat dari tahun 2008-2011.

Dengan mengacu kepada Paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada point keberlanjutan secara sistem sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Putnam (1993) dalam (Asdak, 2012:40), bahwa keberlanjutan sistem sosial dapat dicapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis.

Pernyataan diatas terlihat bahwa di dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga memperhatikan aspek pada sistem sosial, yang menurut hemat peneliti di dalam penelitian ini, aspek sosial tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan rasa solidaritas masyarakat seperti yang disebutkan diatas, bahwa ada peningkatan secara partisipasi dari tahun 2008 yaitu sebanyak 103 orang, kemudian 128 orang pada tahun 2009, 142 orang pada tahun 2010, serta meningkat menjadi 232 orang pada tahun 2012.

Dengan semakin tingginya rasa gotong royong serta berpartisipasi tersebut maka, akan tumbuh rasa kekeluargaan kepada semua anggota masyarakat tidak hanya dalam waktu singkat namun dalam waktu yang lama, karena ikatan batin akan terus terjaga dengan *kontinuitas* kegiatan-kegiatan secara partisipatif. Ini tentu sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) khususnya terkait aspek sosial.

c) Secara Lingkungan

Selalu di dengungkan bahwa pembangunan dimasa yang akan datang haruslah ramah lingkungan, pembangunan yang memperhatikan akan aspek lingkungan, pelestarian dan penjagaan. Dan lewat program hutan desa ini adalah salah satu solusinya, karena tujuan utama dari program ini adalah untuk hal tersebut, sebagai bagian dari penghijauan di desa. Langkah untuk penyelamatan memang harus dimulai dari yang kecil dari mulai Desa dengan masyarakat sebagai objeknya dan nantinya akan berimbas ke langkah yang lebih besar.

Program Hutan Desa di Desa Jambi, yang dilakukan dengan penanaman ribuan bibit tanamana adalah bertujuan untuk penyelamatan lingkungan, untuk mencegah adanya dampak pemanasan global artinya ini akan menyelamatkan baik itu generasi kini, maupun generasi masa yang akan datang. Dan hal tersebut telah sesuai tentunya dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terutama aspek lingkungan, sebagaimana diungkapkan oleh (Asdak, 2012:41), yang mengharuskan agar manusia belajar untuk hidup selaras dan tidak melawan hukum lingkungan, agar eksistensi dari lingkungan tetap terjaga.

Dengan program ini pula Desa Jambi telah terlihat lebih hijau, Selain itu juga ada perubahan secara nyata di lingkungan Desa Jambi sendiri, khususnya yang ada di pinggir jalan yang sebelum program ini

jalan nyaris tanpa pepohonan yang hijau sekitar tahun 2005 sebelum adanya program penanaman pohon ini kemudian di tahun 2012 ini sudah sangat berubah dengan banyaknya tumbuh tanaman baik itu dipinggir jalan serta di lahan-lahan milik warga atau desa yang masih kosong. Semua telah tertanami oleh berbagai tanaman dan sekarang terlihat lebih hijau, serta suasana desa menjadi lebih sejuk dan nyaman.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dalam pelaksanaan program hutan desa yang dilaksanakan di Desa Jambi, Kecamatan Baron, tentunya dari awal program sampai akhir pelaksanaan program tersebut, banyak faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat program tersebut. Dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) program hutan desa ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh Desa Jambi, Kecamatan Baron. Pembangunan berkelanjutan tersebut diwujudkan dengan cara pemanfaatan tanaman yang ditanam di Desa, tanaman tersebut berupa tanaman kayu-kayuan serta tanaman dari jenis buah-buahan yang dapat dimanfaatkan secara ganda oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang memengaruhi baik itu secara positif maupun negatif, baik itu dari dalam maupun dari luar program tersebut. Secara positif ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan dari program ini, diantaranya adalah:

a) Faktor Pendukung

a. Internal

a) Sumber daya Manusia

Dalam pelaksanaan program hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), banyak sumber daya manusia yang mendukung kelancaran program tersebut, baik itu dari Aparatur Desa mulai dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab, kemudian terbentuknya organisasi untuk melaksanakan program ini, serta dukungan masyarakat umum, kepedulian serta antusiasme yang tinggi menjadi point positif di dalam pelaksanaan program ini.

Ini sesuai dengan teori Model Implementasi Kebijakan Publik, dari Edward III dalam (Widodo, 2006:98), yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia juga harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Disamping itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan.

Bahwasanya ini telah sesuai dengan apa yang ada pada Program Hutan Desa di Desa Jambi, di bentuknya penanggung jawab, ketua pelaksana, anggota, serta terkoordinasinya masyarakat dengan baik adalah bukti adanya faktor pendukung keberhasilan program tersebut.

b) Lokasi

Lokasi dalam konteks ini berkaitan dengan faktor geografis yang menunjang program hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Desa Jambi dengan pelaksanaan program ini sangat terbantu karena Desa mereka memiliki tanah yang subur serta dikelilingi sungai-sungai besar sebagai penunjang tumbuh dan berkembangnya tanaman yang ditanam di dalam program ini.

Faktor lokasi ini menjadi salah satu hal terpenting juga karena program ini dilakukan dengan penanaman pohon, tentu daerah yang secara strategis memiliki tanah yang subur dan adanya pengairan yang memadai, mampu melaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan Desa Jambi.

c) Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Jambi yang sebagian besar adalah Petani, dan bekerja di sektor pertanian adalah salah satu aset di dalam kelancaran pelaksanaan program tersebut. Karena dengan pemahaman mereka terkait dengan bagaimana merawat serta menumbuhkan kembangkan tanaman ini menjadi modal di dalam keberhasilan pelaksanaan program hutan desa ini.

Jadi faktor mata pencaharian penduduk Desa Jambi yang sebagian besar adalah petani, menjadi point penting suksesnya program ini. Artinya ini bila mengacu kepada teori Model Kebijakan Publik dari Edward III dalam (Widodo, 2006:99) adalah berkaitan dengan faktor sumber daya dalam hal keahlian untuk mendukung keberhasilan suatu program.

b. Eksternal

Program ini berada dalam lingkungan yang secara luas tidak dapat terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dimana program ini dijalankan, keberhasilannya juga tentu didukung oleh banyak hal, selain secara internal seperti yang telah dibahas di atas, program ini secara kesuksesan juga tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal. Yaitu terkait dengan:

- a) Relevansi dengan Program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Program Ijo Royo-royo, yang memang mempunyai tujuan untuk melestarikan lingkungan dan penyelamatan lingkungan, artinya program tersebut adalah suatu acuan untuk Desa Jambi melaksanakan program serupa dengan lingkup yang lebih spesifik tetapi dengan tujuan dan sasaran yang sama. Hal tersebut telah didasarkan pada Peraturan Desa No.04 Tahun 2008, bahwa telah dibuat program oleh Desa Jambi, sebagai tindak lanjut dari program Ijo Royo-royo, yang ada di kabupaten Nganjuk sebagai wujud untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

b) Dukungan dari pemerintah Daerah baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten di dalam mensukseskan program ini, melalui dukungan Dana, Pengawasan, serta sosialisasi secara berkala dan Pemberian bibit tanaman. Ini sesuai dengan teori Model Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam (Widodo, 2006:104), terkait dengan disposisi, maksudnya adalah bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementor*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan untuk memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dengan memperhatikan fakta, bahwa dukungan dari pemerintahan Daerah, dan kemudian pemerintahan Desa terhadap kegiatan ini, yang telah berjalan sampai dua periode, dan selama periode itu terdapat peningkatan partisipasi masyarakat ini membuktikan bahwa disposisi secara positif telah berjalan dengan baik, untuk mempengaruhi keberhasilan daripada

pelaksanaan program hutan desa tersebut di Desa Jambi kecamatan Baron.

Selain beberapa dukungan yang ada sehingga program Hutan Desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dapat berjalan dengan baik di Desa Jambi Kecamatan Baron, di dalam pelaksanaan program ini juga terdapat beberapa Hambatan antara lain:

b. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

a) Sumber Daya Manusia

Di dalam konteks ini sumber daya selain sebagai faktor pendukung, juga dapat menjadi faktor penghambat atau menjadi suatu hambatan di dalam pelaksanaan program ini. Hambatan datang dari tingkat antusiasme masyarakat yang berbeda di dalam merawat atau menumbuhkan kembangkan tanaman yang telah ditanam, sehingga perkembangan tanaman menjadi terhambat serta tingkat pemerataan tanaman yang ditanam menjadi berkurang karena dengan perawatan yang kurang tanaman menjadi mati. Sehingga ini akan mengurangi banyaknya tanaman yang telah ditanam. Artinya bahwa sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan program hutan desa di Desa Jambi kecamatan Baron, seperti fakta bahwa sumber daya manusia yang ada di Desa Jambi menunjukkan tingkat antusiasme yang rendah khususnya dalam merawat tanaman. Berarti ini sesuai dengan Teori yang

disampaikan oleh Edward III dalam (Widodo, 2006:98) yang disebutkan bahwa sumber daya (*resources*) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Faktor yang menjadi hambatan dari program hutan desa dapat terlihat pada masalah perawatan tanaman, masyarakat terlihat kurang secara serempak dan menyeluruh melaksanakan hal tersebut, hanya sebagian saja yang berperan aktif.

b) Lokasi

Sama halnya dengan sumber daya manusia, faktor lokasi juga dapat menjadi faktor penghambat. Di dalam program hutan desa di Desa Jambi, faktor penghambat dari lokasi adalah terbatasnya lahan yang dimiliki warga Desa Jambi terutama untuk menanam Pohon yang diletakkan di pekarangan. warga yang memiliki pekarangan yang luas tentu mendapatkan manfaat yang lebih besar dari warga yang tidak memiliki lahan pekarangan yang luas atau bahkan tidak memiliki lahan pekarangan.

Ketidakmerataan dalam hal lokasi ini tentu mempengaruhi hasil yang di dapat masyarakat terutama pada hasil secara ekonomi, terlihat hanya warga yang memiliki lahan pekarangan luas yang mendapat hasil maksimal.

b. Faktor Eksternal

a) Sosialisasi dan Pengawasan

Dari fakta dilapangan hambatan datang dari Pemerintahan Kecamatan sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan sosialisasi

dan pengawasan terhadap pelaksanaan program hutan desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dilihat sangat kurang pengawasan hanya terjadi pada saat penanaman saja, namun belum ada saat perawatan tanaman. Dampak yang terdapat dilapangan adalah berimbas ke faktor perawatan serta penumbuh kembangan terhadap tanaman. Ini tentu sesuai dengan Model keberhasilan maupun kegagalan dari Implementasi Kebijakan pada point Disposisi, seperti yang ditegaskan oleh Edward III dalam (Widodo, 2006:104), bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, artinya bila secara disposisi tidak ada kemauan, keinginan, dan kecenderungan yang kuat dari para pelaku kebijakan, maka peluang untuk kegagalan suatu kebijakan tentu sangat besar. Dan salah salah satu point dari pelaksanaan program hutan desa di Desa Jambi Kecamatan Baron, adalah kurangnya disposisi terutama pada kemauan, serta keinginan dari pelaku kebijakan dari pihak Kecamatan Baron untuk melakukan pengawasan secara berkala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan oleh penulis tentang Implementasi Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron, hasil kesimpulan ini berdasarkan apa yang telah dikaji dari penyajian data serta pembahasan terkait bagaimana Pelaksanaan Program Hutan Desa di Desa Jambi. Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Gambaran penyusunan Implementasi Program, Dalam hal ini implementasi program hutan desa dibuat berdasarkan pedoman kepada keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di Jawa Timur untuk penyelamatan Bumi, Berdasarkan hal tersebut, Desa Jambi membuat suatu program sebagai bagian dari pelaksanaan Program Ijo Royo-royo di Kabupaten Nganjuk, yaitu Program Hutan Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Jambi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa.
2. Sumber Daya dalam Program Hutan Desa di Desa Jambi Kecamatan Baron.

- a) Sumber Daya Manusia.
 - b) Sumber Daya Anggaran
 - c) Sumber Daya Peralatan
3. Pelaksanaan Program Hutan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), Pelaksanaan dari Program hutan desa ini dimulai dari pembuatan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa, yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 8 maret 2008, yang kemudian disetujui pada tanggal 11 Maret 2008 kemudian pelaksanaannya sendiri yaitu pada tanggal 27 Mei 2008, dengan diikuti oleh seluruh masyarakat desa di seluruh kecamatan Baron.
 4. Komunikasi antar Semua elemen yang terlibat didalam Pelaksanaan Program. Komunikasi program ini adalah merujuk kepada instruksi surat edaran pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang kemudian di teruskan ke Desa melalui kepala Desa, untuk dilaksanakan berdasarkan musyawarah serta rapat yang dipimpin langsung oleh kepala Desa, dari kesepakatan tersebut gerakan menanam dan memelihara pohon menuju Nganjuk Ijo royo-royo
 5. Sasaran pelaksanaan sebagai tujuan program hutan desa di Desa Jambi Kecamatan Baron, adalah untuk seluruh warga masyarakat di Desa jambi, dan Program Hutan Desa ini tujuan yang dicapai adalah secara jangka pendek untuk kelestarian lingkungan, Secara jangka pendek pula, dari program ini akan didapat manfaat secara sosial, yaitu

menumbuhkan rasa sosial tentunya dalam masyarakat, serta tujuan jangka panjang yang terealisasi adalah dari segi ekonomi. Segi ekonomi yang dicapai ini adalah lewat tanaman produktif yang ditanam baik itu tanaman dari kayu-kayuan seperti sengon, jati maupun mahoni, serta tanaman dari buah-buahan seperti nangka maupun mangga.

6. Dampak dari Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

- a) Secara Ekonomi.
- b) Secara Sistem Sosial
- c) Secara Lingkungan

7. Dalam pelaksanaan program hutan desa ini telah didapat manfaat oleh Desa Jambi, hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen yang terlibat di dalam program ini baik itu faktor internal maupun eksternal, faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Internal

- a) Sumber daya Manusia
- b) Lokasi
- c) Kondisi Sosial Masyarakat

b. Eksternal

- a) Relevansi dengan Program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

- b) Dukungan dari pemerintah Daerah baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Selain beberapa dukungan yang ada sehingga program Hutan Desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dapat berjalan dengan baik di Desa Jambi Kecamatan Baron, di dalam pelaksanaan program ini juga terdapat beberapa Hambatan antara lain:

a. Faktor Internal

- a) Perawatan tanaman
- b) Terbatasnya lahan yang dimiliki warga Desa Jambi terutama untuk menanam Pohon yang diletakkan di pekarangan.

b. Faktor Eksternal

- a) Pengawasan

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan diatas dan dari hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi Desa Jambi dalam upaya untuk menerapkan Hutan Desa, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Harus ada pengembangan secara menyeluruh terkait dengan program hutan desa di Desa Jambi, dengan lebih optimal agar nantinya penyebar luasan program ini tidak hanya memberikan

hasil secara internal namun juga dapat tersebar secara eksternal dalam lingkup di Kecamatan Baron, serta di Kabupaten Nganjuk.

Cara yang dilakukan adalah dengan meninjau ke daerah lain dengan mengadakan studi banding antar Desa di Seluruh Kabupaten Nganjuk, desa Jambi sebagai pioneer nantinya harus mampu memberikan penyuluhan dan pembelajaran ke pada Desa lain, agar manfaat dari pelaksanaan program Hutan Desa ini nantinya dapat secara luas di nikmati oleh masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

2. Di dalam pelaksanaannya agar lebih maksimal Desa harus mengeluarkan anggaran khususnya untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dengan memberikan bantuan berupa pupuk agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.
3. Desa harus memacu antusiasme warga dengan lebih lagi karena tingkat antusiasme masyarakat untuk merawat tanaman sangatlah rendah, caranya selain memberikan subsidi berupa pupuk juga harus dilakukan dengan membuat perlombaan antar RT terkait keberhasilan RT mana yang lebih berhasil dari RT lain didalam melaksanakan Program Hutan Desa lewat penanaman pohon ini.
4. Karena ini adalah program berkelanjutan maka Desa harus terus mensuplai kepada masyarakat berupa bibit tanaman, baik itu dari jenis kayu-kayuan maupun buah-buahan apabila ada tanaman yang mati, agar target penghijauan dan penanaman nilai ekonomis

lebih maksimal dengan hal tersebut tentunya misi jangka panjang sebagai bagian dari Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dapat secara maksimal dicapai khususnya oleh Desa Jambi.

5. Desa perlu lebih pro aktif untuk meninjau serta melakukan pencatatan untuk tanaman yang telah mampu dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mengetahui data tanaman yang mati untuk dilakukan penggantian, agar ini bisa dijadikan suatu bahan untuk mengetahui keberhasilan dari Program ini dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aisyah, Siti. 2010. *Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Konservasi Lingkungan di Dieng Plateau*.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Basuki , Slamet . 2008 *Baron, Juara II Program Nganjuk Ijo Royo-Royo*. Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2012, Melalui kecbaron.blogspot.com/.../baron-juara-ii-program-nganjuk-ijo-royo.html.
- Budimanta, Arif. 2005. *Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Cahyat, Ade. dkk .2007. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. Bogor.: CIFOR.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Milles, dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, L.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik.*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Jambi Tahun 2011-2015
- Sariffuddin dan Retno Susanti. 2011. *PENILAIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT UNTUK Mendukung Peremukiman Berkelanjutan Di Kelurahan Terboyo Wetan, Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Sugiyono, 2012 . *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Edaran nomor 522.4/691/411.302/2010 tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon Menuju Nganjuk Ijo Royo-royo.
- Sutisna, Endang. 2006. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Usman, H. dan Akbar, P.M. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *implementasi Kebijakan Publik:Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI
- Wahab, Solichin Abdul.1997. *Analisis Kebijakan:dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2006. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yakin, Addinul. 2004. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan: Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Zauhar, Soesilo.1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*.Malang: IKIP MALANG.
-2012, Kecamatan Baron dalam Angka.
-2011, Pedoman Sistem Pendataan Profil Desa dan Kelurahan Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
-2011, Proposal Program Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Desa Jambi Kecamatan Baron.
-2010, *sayangi bumi*. Diakses Tanggal 11 Desember 2012, Melalui <http://www.sayangibumi.blogspot.com>.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Desa No.04 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan dan Hutan Desa.

